



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Kolonel Soetadji Nomor 76 RT 13 RW 5, Tanjung Selor, Bulungan 77212



LAKIN 2023.

(Laporan Akuntabilitas Kinerja)

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara tahun 2023. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara pada tahun 2022.

Tanjung Selor, 23 Januari 2024

Kepala
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Kalimantan Utara

Dr. Jarwoko, M.Pd

NIP 197003191997031001



Daftar Isi



i

Halaman Sampul

Lakin BPMP Kaltara 2022

Kata Pengantar

Oleh Dr. Jarwoko, M.Pd.

ii



iii

Daftar Isi

Lakin BPMP Kaltara 2022

iv

Ikhtisar Eksekutif

Lakin BPMP Kaltara 2022

Bab I Pendahuluan

Gambaran Umum | Dasar Hukum
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Isu-isu Strategis dan Pemasalahan

01

99

Bab IV Penutup

Kesimpulan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran

15

Bab II Perencanaan Kinerja

Visi dan Misi BPMP Provinsi Kalimantan Utara
Tujuan Strategis

10

IKHTISAR EKSEKUTIF





Piagam Penghargaan Sekjen Kemdikbud Ristek
Anugerah keterbukaan informasi publik dengan kategori cukup informatif



Piagam Penghargaan Dirjen PAUD Dikdasmen
Atas keberhasilan membangun ZI WKB tahun 2022 dengan capaian nilai 78,11



Piagam Penghargaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Terbaik 1 atas Nilai Kinerja Keuangan pada Kategori UPT dengan raihan Skor 99,67 Tahun 2019



Piagam Penghargaan dari Sekjen Kemdikbud sebagai UPT dengan ULT Daerah dengan Predikat Cukup Tahun 2020



Piagam Penghargaan dari Disdikbud Kab. Bulungan kepada Kepala BPMP Prov. Kaltara Dr. Jarwoko M.Pd. atas kerjasamanya dalam bidang pendidikan Tahun 2020



Piagam Penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung Selor Sebagai Peraih Nilai IKPA terbaik Tahun 2020



Piagam Penghargaan dari INOVASI atas kerjasama dalam peningkatan pendidikan Tahun 2020

Laporan kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian dua sasaran kegiatan (SK) dengan 4 indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Uraian tingkat ketercapaian indikator lebih detail diuraikan pada BAB III. Secara umum capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96	1,41	71,94%
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	100	333,33%
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	BB (76,80)	A (84,40)	109,90%
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	84	96,35	114,70%
RATA-RATA CAPAIAN				157,47%

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa seluruh capaian IKK BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 berada diatas 100%, kecuali persentase capaian IKK 1.1 yakni capaian persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. Capaian IKK 1.1 adalah sebesar 1,41% dari target sebesar 1,96% dengan persentase capaian sebesar 71,94%.

Sedangkan dari segi penyerapan anggaran, berhasil terserap **Rp 17.770.531.767,-** dari total **Rp 17.857.239.000,-** dengan persentase **99,51%**.

Jika dilihat dari perjenis belanja, maka serapan BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	2.363.962.000	0	2.334.275.477	98,74	2.334.275.477	98,74
2	BELANJA BARANG	9.343.277.000	54.000.000	9.286.673.882	99,39	9.286.673.882	99,39
3	BELANJA MODAL	6.150.000.000	0	6.149.582.408	99,99	6.149.582.408	99,99
	TOTAL	17.857.239.000	54.000.000	17.770.531.767	99,51	17.770.531.767	99,51

Sumber : <https://molk.kemdikbud.go.id/2023/>

A. Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. BPMP Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi langsung dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan;
2. Implementasi Kurikulum Merdeka belum diadopsi oleh seluruh satuan pendidikan;
3. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar oleh satuan pendidikan pelaksana IKM belum optimal di wilayah remote area;
4. Rapor Pendidikan belum digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan berbasis data; dan
5. Belum maksimalnya pencapaian nilai Literasi dan Numerasi berdasarkan Profil Pendidikan.

B. Upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan/kendala yang muncul antara lain:

1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan;
2. Memberikan advokasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan pelaksana IKM di daerah remote area untuk mengoptimalkan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar;
4. Membangun koordinasi kepada pemangku kepentingan dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan rapor pendidikan; dan
5. Melakukan advokasi dan pendampingan ke pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi Literasi dan Numerasi peserta didik.

A. Gambaran Umum

BPMP Provinsi Kalimantan Utara merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. BPMP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Utara dengan 5 (lima) kabupaten/kota, meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.



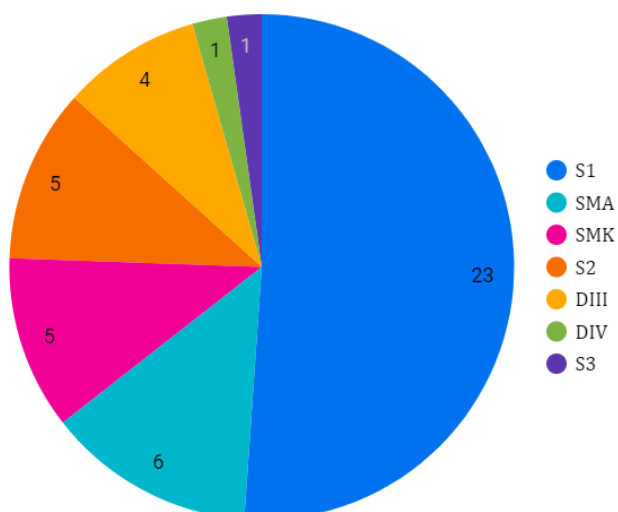
Pada periode pembangunan 2022-2024, BPMP Provinsi Kalimantan Utara akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dimana BPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Masyarakat di Provinsi.

Dianalisis dari segi jumlah, kualifikasi pendidikan, kompetensi dan ketersediaan sumber daya pendidikan pegawai di BPMP Provinsi Kalimantan Utara dinilai belum cukup memadai untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi BPMP. Hingga Desember 2023, jumlah pegawai di BPMP Provinsi Kalimantan Utara hanya sebanyak 45 pegawai yang terdiri atas 19 orang PNS dan 26 orang PPNPN. Adapun rekapitulasi jumlah pegawai di BPMP Provinsi Kalimantan Utara per Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Utara

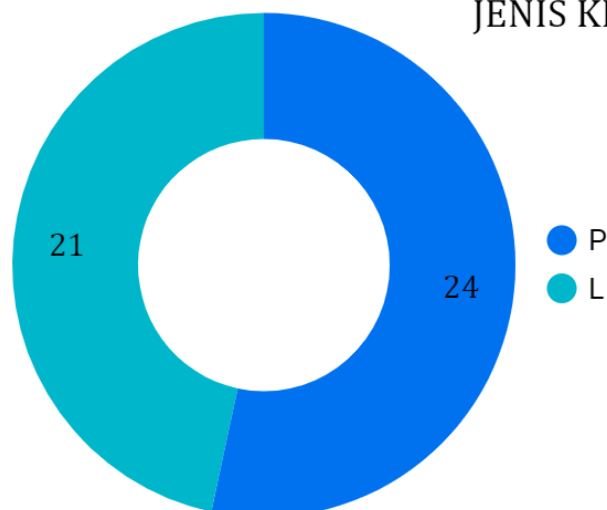
NO	Jabatan	Jumlah
1	PNS: a. Kepala b. Kasubbag Umum c. Jabatan Fungsional d. Jabatan Pelaksana	1 1 1 16
2	PPNPN	26
Total		45

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN





Gambar: Kantor Sementara BPMP Provinsi Kalimantan Utara

BPMP Provinsi Kalimantan Utara sampai saat ini masih bertempat di Jalan Kolonel Soetardji (Ex-Ruko Fajar Baru) No 76 Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Bulungan 77212. Namun pada tahun 2022 BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah membangun gedung kantor utama yang bertempat di Jl. Poros Tanjung Selor Tanah Kuning Desa Bumi Rahayu Kec. Tanjung Selor, namun masih dalam proses penyempurnaan pada tahun 2023 sehingga direncanakan akan dimanfaatkan pada tahun 2024.



Gambar : Gedung baru BPMP Provinsi Kalimantan Utara

Adapun sejarah singkat sebelum terbentuknya BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2016 BPMP Provinsi Kalimantan Utara masih bernama Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara (LPMP Prov. Kaltara) didirikan atas permintaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian disetujui pendiriannya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi di

tanggal 15 November 2016 dan ditetapkan dalam Peraturan Perundangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 13 Februari 2017 dan termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 tahun 2017. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia periode 2016-2019 Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tanjung Selor dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP).

2. Pada Agustus 2017 BPMP Kalimantan Utara (Kaltara) pertama kali dibentuk tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017. Meskipun BPMP Kaltara belum memiliki gedung kantor sendiri, tapi BPMP Kaltara telah resmi beroperasi pada tanggal 28 Agustus 2017 dan akan segera berkantor di Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, BPMP Kalimantan Utara termasuk dalam kategori Eselon III dengan satu sub bagian umum dan dua seksi, yaitu:

- Kepala instansi;
- Sub Bagian Umum;
- Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu; dan
- Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pada September 2017 awal pendiriannya selama 3 bulan pertama BPMP Provinsi Kalimantan Utara beroperasi di Jalan Sengkawit Pasar Induk Gedung II dengan Peta kepegawaian per Agustus 2017 BPMP Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas 4 PNS/ASN yaitu Kepala, Kepala Sub bagian Umum dan 2 Orang Kepala seksi, dan dibantu oleh 4 Non PNS (tenaga Honorer) yaitu Satpam dan 3 orang staf administrasi. Untuk operasional keuangan sendiri BPMP Kalimantan Utara masih berinduk pada BPMP Kalimantan Timur.

3. Pada Januari 2018 BPMP Kalimantan Utara merekrut 25 orang Tenaga Honorer yang terdiri dari 5 Tenaga Keamanan dan 2 Tenaga Kebersihan serta 18 orang tenaga administrasi yang diterima secara bertahap. Pada bulan April 2018 BPMP Kalimantan Utara berpindah lokasi ke Jalan Mangga II No 065 Rt 090, Tanjung Selor, 8ulungan 77212 dengan jumlah pegawai per April 2018 jumlah pegawai BPMP sebanyak 10 orang PNS dan 25 Non PNS.
4. Pada Tahun 2019 Pada saat itu dilakukan rekrutmen Non PNS sejumlah 30 orang dengan rincian 5 Satuan Keamanan, 2 Tenaga Kebersihan dan 28 tenaga Administrasi. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pegawaidi BPMP Kalimantan Utara, maka pada bulan Februari 2019 BPMP Kalimantan Utara berpindah lokasi ke gedung yang lebih luas di Jalan Kolonel Soetardji (Ex-Ruko Fajar Baru) No 76 Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Bulungan 77212. Pada bulan Mei 2019 terdapat penambahan jumlah pegawai sebanyak 7 orang CPNS hasil rekrutmen PNS 2018 yang mulai bekerja di BPMP Kalimantan Utara. Dan diakhir Agustus 2019 total pegawai BPMP Provinsi Kalimantan

Utara sejumlah 47 orang dengan 17 orang PNS dan 30 orang PPNPN dengan 1 orang PNS Perbantuan.

5. Pada Tahun 2020 Kemendikbud menerbitkan peraturan terkait OTK terbaru yaitu Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terjadi perubahan struktur organisasi di BPMP Kalimantan Utara sebagai berikut:

- Kepala instansi;
- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan OTK tersebut, BPMP Kalimantan Utara telah melaksanakan 2 kali upacara pelantikan yaitu pada tanggal 22 Juli 2020 dilaksanakan Upacara Pelantikan 3 Pejabat Struktural ke Jabatan Fungsional secara daring dan pada tanggal 13 Agustus 2020 dilaksanakan Upacara Pelantikan Pejabat Kemendikbud (Kepala dan Kasubbag Tata Usaha) secara daring. Hingga Agustus 2020, jumlah pegawai di BPMP Kalimantan Utara sebanyak 46 pegawai yang terdiri atas 18 orang PNS dan 28 orang PPNPN.

6. Pada Tahun 2021 struktur organisasi di BPMP Kalimantan Utara sebagai berikut:

- Kepala instansi;
- Subbagian Tata Usaha; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Hingga Desember 2021, jumlah pegawai di BPMP Kalimantan Utara sebanyak 48 pegawai yang terdiri atas 20 orang PNS dan 28 orang PPNPN.

7. Pada Tahun 2022 Kemendikbudristek menerbitkan peraturan terkait OTK terbaru yaitu Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya terjadi perubahan struktur organisasi di BPMP Kalimantan Utara sebagai berikut:

- Kepala instansi;
- Subbagian Umum; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan OTK tersebut, pada tanggal 20 Juni 2022 dilaksanakan Upacara Pelantikan Pejabat Kemendikbud (Kasubbag Umum) di Gedung Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Hingga Desember 2022, jumlah pegawai di BPMP Kalimantan Utara sebanyak 48 pegawai yang terdiri atas 20 orang PNS dan 28 orang PPNPN.

8. Dan sampai akhir tahun 2023 BPMP Provinsi Kalimantan Utara masih bertempat di Jalan Kolonel Soetardji (Ex-Ruko Fajar Baru) No 76 Tanjung Selor Hilir, Tanjung Selor Bulungan 77212 dengan pegawai berjumlah 18 orang PNS dan 26 orang PPNPN.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

c. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1. Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara mempunyai tugas yakni “*Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi Kalimantan Utara*”.

Adapun fungsi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara Mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- b. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;

- c. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. Pelaksanaan urusan administrasi.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, maka struktur organisasi BPMP Kalimantan Utara dapat ditunjukkan pada gambar berikut:



Gambar : Struktur Organisasi BPMP Provinsi Kalimantan Utara

3. Isu strategis dan Peran Strategis

- a. Isu strategis
 - 1) Implementasi Kurikulum Merdeka yang berkaitan dengan optimalisasi PMM, Komunitas Belajar, dan Penerapan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila);
 - 2) Kompetensi Literasi dan Numerasi di provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Profil Pendidikan belum optimal;

- 3) Peran Pemerintah Daerah terhadap Implementasi Program Sekolah Penggerak dan Perencanaan Berbasis Data;
- b. Peran Strategis
- Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat eselon III, BPMP Provinsi Kalimantan Utara mempunyai peran strategis baik dalam bidang Pendidikan maupun dalam tata Kelola kelembagaan. Peran strategis BPMP Provinsi Kalimantan Utara diantaranya:
- 1) Mitra penting bagi sekolah dan pemerintah daerah dalam membantu Implementasi Kurikulum Merdeka, pelaksana Program Sekolah Penggerak, Perencanaan Berbasis Data, dan peningkatan kompetensi Literasi Numerasi;
 - 2) Mitra penting bagi pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan di wilayahnya; dan
 - 3) Mengawal pelaksanaan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Provinsi Kalimantan Utara agar berjalan sukses.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



A. Visi dan Misi BPMP Provinsi Kalimantan Utara

BPMP Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan UPT di lingkungan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD, Dikdas dan Dikmen) Kemendikbudristek, mendukung visi Presiden untuk mewujudkan:

1. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.
2. Visi di atas akan dicapai Kemendikbudristek dengan melaksanakan dukungan misi Presiden terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dalam bentuk dukungan sebagai berikut:
3. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi;
4. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra;
5. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

B. Rencana Kinerja Jangka Menengah 2022-2024

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun yang dituangkan kedalam Renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara 2020-2024, namun pada tahun 2022 terjadi perubahan terhadap IKK BPMP Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Atas dasar peraturan tersebut, maka dilakukan revisi Renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2022 dan menetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) dan targetnya sebagai berikut:

Sasaran/ Indikator	Sasaran Kegiatan (SK)	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
SK1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
IKK 1.1	Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	0,98	1,96	3,92
IKK 1.2	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	25	30	35
SK2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Kalimantan Utara				
IKK 2.1	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Utara	Nilai	A	A	A
IKK 2.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/KL	Nilai	83	84	85

c. Tujuan Strategis

BPMP Provinsi Kalimantan Utara menetapkan 2 (dua) tujuan strategis mengacu pada tujuan strategis pada renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024, yaitu:

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
1	Peningkatan mutu satuan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	35
2	Peningkatan tata kelola serta pelibatan publik yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.	Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	A

Dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan strategis, BPMP Provinsi Kalimantan Utara merancang perjanjian kinerja kelembagaan yang diusulkan pada tahun 2023, sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Awal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96
		[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 12.104.393.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 6.087.407.000
TOTAL			Rp. 18.191.800.000

2. Perjanjian Kinerja Akhir

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,96
		[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 5.848.536.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 12.008.703.000
TOTAL			Rp. 17.857.239.000

D. Program Prioritas

Pada tahun 2023 BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan sebuah program prioritas dan merupakan salah satu program prioritas nasional. Untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional terkait **Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran**, maka BPMP Provinsi Kalimantan Utara melalui unit utama menetapkan satu KRO (Klasifikasi Rincian Output) yakni **Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga** yang didukung oleh dua RO (Rincian Output) yakni **Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya** dan **Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya** dengan target dan alokasi anggaran yang diuraikan berikut ini:

Kode	Uraian	Satuan	Target	Alokasi
6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Lembaga	1372	5.848.536.000
6397.QDB.750	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	748	5.282.123.000
6397.QDB.850	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	624	566.413.000

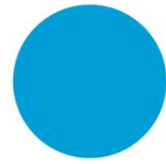
Output prioritas yang disasar tersebut mengerucut pada enam program yang akan dikawal yakni:

1. Pelaksanaan Pembinaan Kurikulum Merdeka;
2. Pelaksanaan Pembinaan Asesmen Nasional;
3. Pelaksanaan Pembinaan Transfer Daerah;
4. Pelaksanaan Pembinaan Sekolah Penggerak;
5. Pelaksanaan Pembinaan Perencanaan Berbasis Data; dan
6. Pelaksanaan Pembinaan Kemitraan

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Utara menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96	1.41	71,94%
	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	100	333,33%
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	BB (76,80)	A (84,40)	109,90%
	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	84	96.35	114,70%
RATA-RATA CAPAIAN				157,47%

1. Sasaran Kegiatan 1 (satu)

Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen.

Peningkatan mutu pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah merupakan sasaran kegiatan prioritas yang telah diperjanjikan oleh kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan unit eselon 1 (satu), sasaran kegiatan ini adalah sasaran kegiatan untuk satuan kerja BB/BPMP yang dituangkan kedalam perjanjian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Sasaran kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan, sebagai berikut:

a. Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.

Indikator kinerja kegiatan ini menggambarkan kondisi mutu pembelajaran satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat kondisi tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang sumber atau basis pengukurannya itu berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen nasional. Indikator kinerja kegiatan ini dihitung berdasarkan persentase dari satuan paud dan dikmas di wilayah masing masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas yang rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar meningkat}}{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur peningkatan mutu pembelajaran jenjang PAUD, maka dibutuhkan hasil Asesmen Nasional dalam tahun 2022 dan 2023. Dikarenakan rapor pendidikan tahun 2023 belum terbit sampai dengan Januari 2024. Peningkatan mutu pembelajaran jenjang PAUD juga tidak diukur berdasarkan hasil AN tahun 2021 dan 2022, dikarenakan pada tahun 2021 jenjang PAUD belum melakukan Sulingjar sehingga tidak ditemukan data pembandingan, oleh karena itu untuk indikator 1.1 tentang persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya ini dihitung berdasarkan data akreditasi 2022 dan 2023 yang bersumber dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP. Adapun metode perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IKK \text{ 1.1. } (\Delta) = \frac{(0,5 \times A_{23}) + (0,35 \times B_{23}) + (0,15 \times C_{23})}{\text{total sekolah TA 2023}} - \frac{(0,5 \times A_{22}) + (0,35 \times B_{22}) + (0,15 \times C_{22})}{\text{total sekolah TA 2022}}$$

Keterangan :

Δ : Persentase kenaikan mutu pembelajaran TA 2022 ke TA 2023 yang dilihat dari nilai akreditasi

A_{23} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2023

B_{23} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2023

C_{23} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2023

A_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2022

B_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2022

C_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2022

Adapun pembobotan yang diberikan adalah sebagai berikut:

Akreditasi A : 0,5

Akreditasi B : 0,35

Akreditasi C : 0.15

Berikut ini data akreditasi berdasarkan *cut off* Dapodik Semester Ganjil (Desember) tahun 2022 dan 2023 di provinsi Kalimantan Utara:

No	Status Akreditasi	Jumlah Sekolah	
		2023	2022
1	A	19	16
2	B	231	194
3	Belum Terakreditasi	1	1
4	C	310	353
5	Terakreditasi	0	0
6	Tidak diisi	60	61
7	Tidak Terakreditasi	3	3
8	Jumlah Sekolah	624	628

Sumber : BAN PAUD

Berdasarkan data akreditasi tersebut, maka IKK 1.1 dapat dihitung dengan menggunakan metode/formula perhitungan diatas sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Indeks 2023} &= \frac{(19 \times 0,5) + (231 \times 0,35) + (310 \times 0,15)}{624} \times 100 \\ &= 21,96 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Indeks 2022} &= \frac{(16 \times 0,5) + (194 \times 0,35) + (353 \times 0,15)}{628} \times 100 \\ &= 20,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{IKK 1.1} &= 21,96\% - 20,54\% \\ &= 1,41\% \end{aligned}$$

Setelah melalui proses perhitungan menggunakan formula diatas, maka ditemukan capaian IKK 1.1 tahun 2023 berdasarkan indeks akreditasi yakni sebesar 1,41%.

Berikut ini juga kami tampilkan Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra.



Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja untuk IKK 1.1 terkait persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. Dapat diketahui bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 ini belum mampu mencapai target yang telah diperjanjikan. Adapun target IKK 1.1 tahun 2023 adalah sebesar 1,96% satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya sedangkan capaiannya hanya sebesar 1,41% dengan persentase capaian sebesar 71,94% masih dibawah target yang telah ditetapkan.

Tabel diatas juga menggambarkan perbandingan capaian tahun 2022 dengan capaian tahun berkenaan, dimana terjadi penurunan capaian dari 4,01% di tahun 2022 menjadi 1,41% di tahun 2023. Selanjutnya perbandingan capaian 2023 dengan target akhir renstra, terlihat capaian di tahun 2023 ini masih belum mencapai target akhir renstra walaupun capaian BPMP Provinsi Kalimantan Utara sudah pernah melampaui target akhir renstra untuk IKK 1.1 pada tahun 2022.

Hasil yang diperoleh ini belum sepenuhnya menggambarkan capaian IKK 1.1 terkait Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya, dikarenakan basis data yang digunakan untuk menghitung capaian tersebut tidak sesuai dengan definisi operasional yang telah ditetapkan dalam renstra BPMP Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020-2024.

👉 Program dan Kegiatan Pendukung IKK 1.1

Dalam upaya mencapai target IKK 1.1 terkait Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya BPMP Kaltara didukung oleh beberapa program prioritas, dimana program tersebut

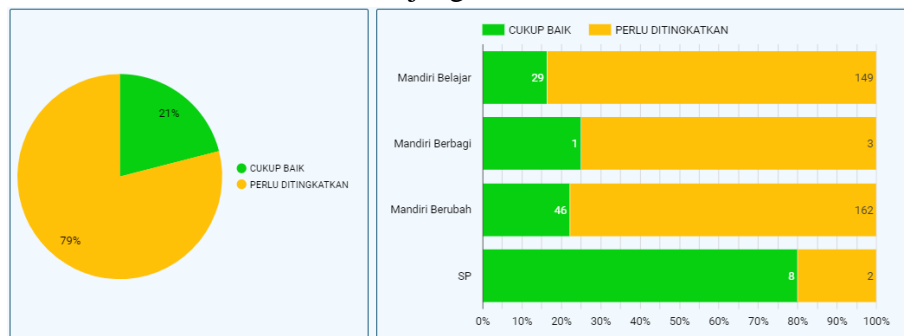
diistilahkan dengan PDM singkatan dari Paud, Dikdas dan Dikmen yang terdiri dari 11 PDM dan 5 diantaranya mengintervensi IKK 1.1. Berikut ini disajikan capaian dari masing-masing PDM di BPMP Kaltara:

1) PDM-02 IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) Jenjang PAUD dan Dikmas

Capaian PDM 02

a) Peningkatan Pemanfaatan PMM oleh Sekolah pelaksana IKM menjadi 90% Jenjang PAUD dan Dikmas

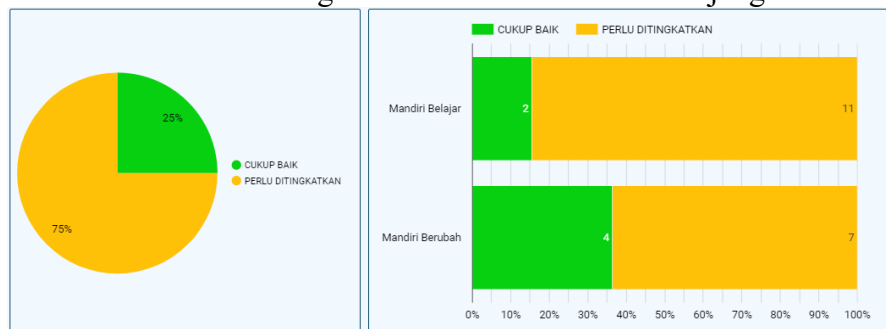
Pemanfaatan PMM Bagi Sekolah Pelaksana IKM Jenjang PAUD



Sumber : Dasbor Penggunaan PMM Nasional Per 14 Januari 2024

Data diatas menunjukkan persentasi capaian seluruh target PDM 02 terkait Peningkatan pemanfaatan PMM oleh sekolah pelaksana IKM jenjang PAUD kategori perlu ditingkatkan 79% dan cukup baik 21%. Sedangkan kategori baik belum tercapai untuk jenjang PAUD.

Pemanfaatan PMM Bagi Sekolah Pelaksana IKM Jenjang Dikmas

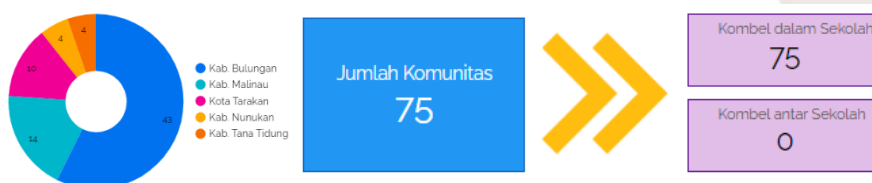


Sumber : Dasbor Penggunaan PMM Nasional Per 14 Januari 2024

Data Peningkatan pemanfaatan PMM oleh sekolah pelaksana IKM jenjang Dikmas (Kesetaraan) pada data diatas untuk kategori perlu ditingkatkan 75% dan cukup baik sebesar 25%. Sedangkan untuk kategori baik belum tercapai untuk jenjang Dikmas.

b) Peningkatan Aktivitas Komunitas Belajar Intrasekolah Berdasarkan Permasalahan Belajar Pesdik Menjadi 50% Jenjang PAUD dan Dikmas

Komunitas Belajar dalam Sekolah Pelaksana IKM Jenjang PAUD dan Dikmas



Sumber : <https://s.id/sikomika> Per 14 Januari 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah komunitas belajar dalam sekolah untuk jenjang PAUD dan Dikmas sebanyak 75 komunitas belajar yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

Jumlah Sekolah Pelaksana IKM Jenjang PAUD dan Dikmas

Bentuk Pendidikan	Jumlah Sekolah	Sudah IKM	Persentase
1. KB	413	221	53,51%
2. TK	192	159	82,81%
3. PKBM	47	22	46,81%
4. TPA	18	14	77,78%
5. SPS	11	9	81,82%
6. SKB	4	4	100%
Total keselu...	685	429	62,63%

Sumber : <https://s.id/sikomika> Per 14 Januari 2024


Perbandingan sekolah pelaksana IKM jenjang PAUD dan Dikmas berjumlah 429 dengan 75 komunitas belajar dalam sekolah, sehingga untuk peningkatan aktivitas komunitas belajar intrasekolah berdasarkan permasalahan belajar pesdik sebesar 17,5%.

Program dan Kegiatan Pendukung PDM 02

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait Implementasi Kurikulum Merdeka:

- Melakukan pendampingan terkait miskonsepsi IKM
- Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam pendampingan IKM kepada satuan pendidikan
- Menggalang mitra pembangunan di daerah terkait IKM
- Rakor Pembahasan Miskonsepsi IKM dengan Pemda
- Pendampingan Komunitas Belajar
- Sosialisasi peran mitra pembangunan dalam mendukung IKM
- Melakukan refleksi dan koordinasi berkala dengan mitra pembangunan terkait perkembangan IKM
- Penguatan materi P5 ke Pemda dan Satuan Pendidikan



 bpmp.kaltara

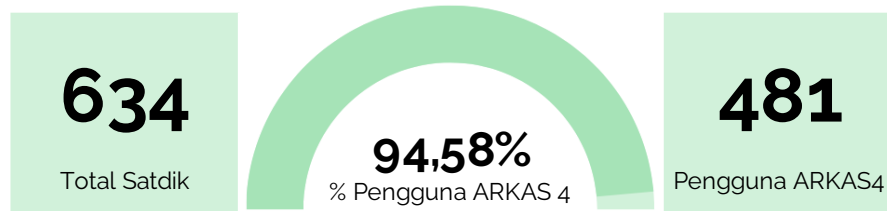


BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan Koordinasi Peran Mitra Pembangunan tentang IKM, bertempat di AULA BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan diikuti oleh seluruh pegawai dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara dan BGP Provinsi Kalimantan Utara.

2) PDM 03 (Trasnformasi Digital) Jenjang Paud Dikmas

Persentase capaian seluruh target PDM 03 terkait Transformasi Digital berada di atas 80% pada jenjang Paud dan Dikmas

a) Satuan Pendidikan Penerima BOP Menggunakan ARKAS 4

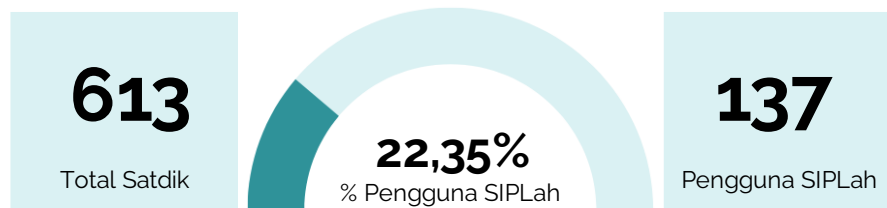


Jenjang	Total Satdik	Pengguna ARKAS 4	Persentase
PAUD	588	440	74.83%
Kesetaraan	46	41	89.13%

Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024

Dari data di atas diketahui bahwa sekolah penerima BOP berjumlah 634 satuan pendidikan, yang telah menggunakan ARKAS 4 sebanyak 481 satuan pendidikan dengan persentase capaian yaitu sebesar 94,58%, hal ini telah melewati target PDM 03 yaitu sebesar 50% satuan pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas menggunakan ARKAS 4.

b) Satuan Pendidikan Menggunakan SIPLah



Jenjang	Total Satdik	Pengguna SIPLah	Persentase
PAUD	569	133	23.37%
Kesetaraan	44	4	9.09%

Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024

Data di atas menunjukkan bahwa satuan pendidikan yang menggunakan SIPLah sebanyak 137 sekolah dari total 613 satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan Dikmas. Persentase yang dicapai yaitu sebesar 22,35%. Masih rendahnya penggunaan SIPLah oleh satuan pendidikan dikarenakan beberapa hal seperti:

- Masih ada satuan pendidikan yang berada pada area blank spot
- harga yang masih relative lebih mahal
- sedikitnya penyedia yang ada pada aplikasi SIPLah.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut dengan menghimbau pemerintah daerah untuk mendorong UMKM menjadi mitra pada aplikasi SIPLah.

c) Penerima Chromebook Memanfaatkan untuk Pembelajaran



Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id
Per 18 Januari 2024

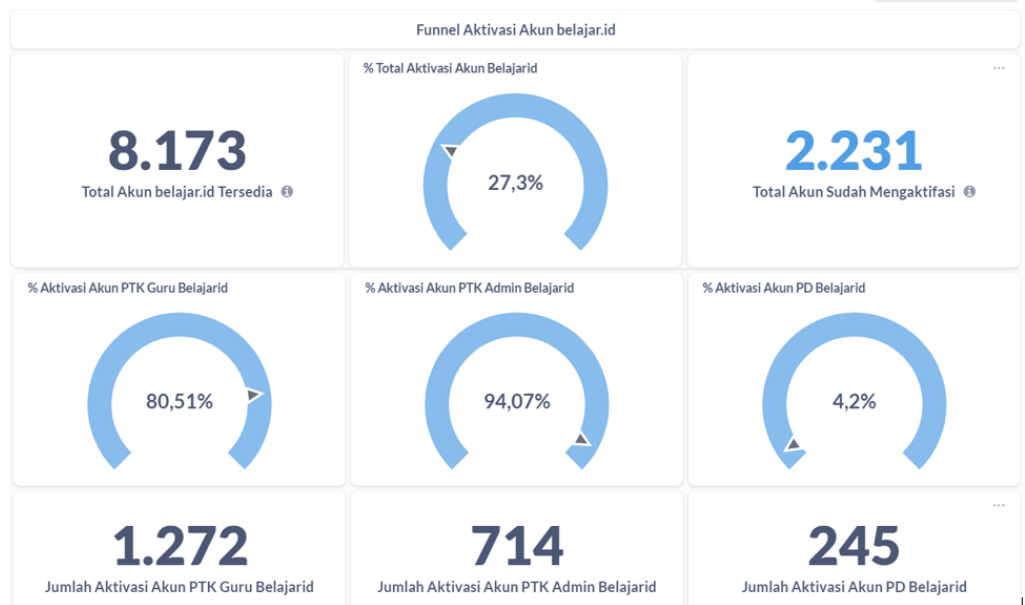
Terdapat 7 satuan pendidikan penerima bantuan Chromebook dan telah memanfaatkan Chromebook tersebut dalam pembelajaran, seperti; Guru memanfaatkan untuk pembelajaran (Pembuatan bahan ajar, presentasi di kelas, akses PMM) serta Siswa memanfaatkan dalam proses pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Hal ini dikarenakan satuan pendidikan penerima chromebook berada pada daerah yang mempunyai jaringan internet yang stabil, sehingga pemanfaatan chromebook dalam pembelajaran dapat dioptimalkan.

d) Akun belajar.id Aktif

Akun belajar.id merupakan nama akun (User ID) yang bertanda belajar.id dan kata sandi (password) yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran.

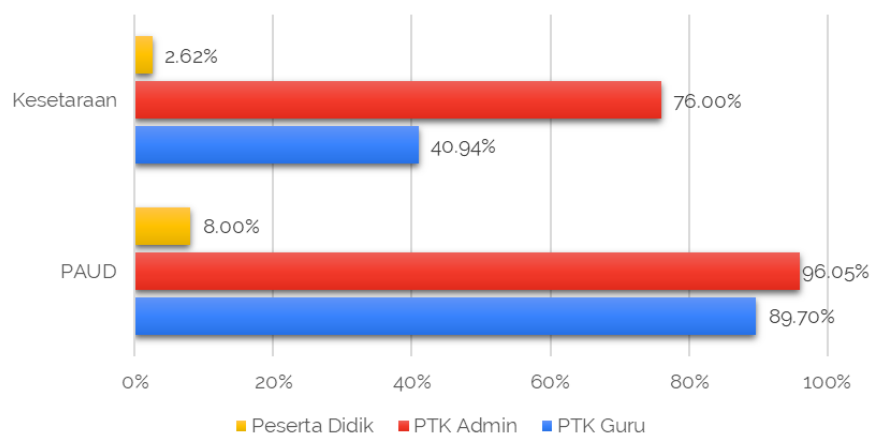
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan akun belajar tersebut sebagai berikut:

- Lebih mudah dan efektif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, seperti: konferensi video, dokumen daring, pengarsipan kelas, dan lain-lain;
- Dapat mengakses berbagai platform Kemendikbudristek hanya dengan satu akun;
- Menyimpan data secara daring dengan lebih aman;
- Mengakses dan menggunakan Chromebook; dan
- Menerima informasi resmi dari Kemendikbudristek.



Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024

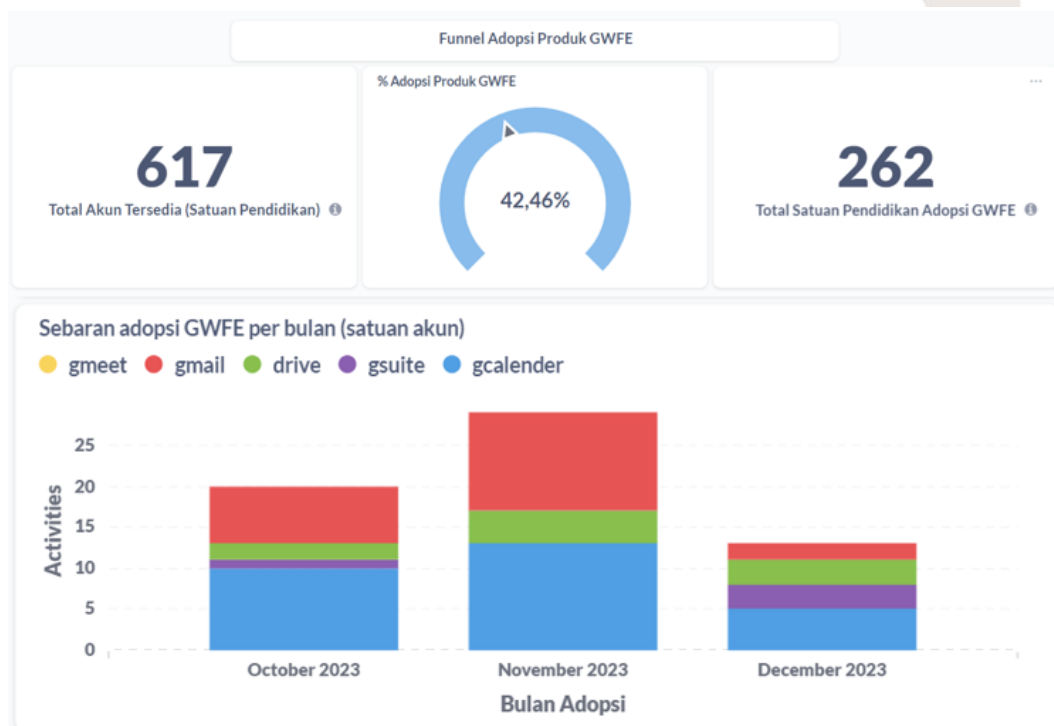
Dari data di atas dapat diketahui bahwa akun yang tersedia di Dapodik untuk jenjang PAUD dan Dikmas sebanyak 8.173 akun namun yang sudah aktivasi sebanyak 2.231 akun dengan persentase sebesar 27,30%. Jumlah aktivasi pada akun PTK Guru sebanyak 1.272 akun atau sebesar 80,51%, untuk akun PTK Admin yaitu 714 atau sebesar 94,07%, sedangkan aktivasi untuk akun peserta didik yaitu 245 akun atau sebesar 4,20%. Untuk aktivasi akun belajar.id dari masing-masing jenjang Dikdas dan Dikmen pada setiap tipe akun adalah sebagai berikut:



Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat rendahnya aktivasi akun belajar.id terdapat pada akun peserta didik, hal ini dikarenakan peserta didik tidak/belum mempunyai gawai dan atau belum boleh menggunakan gawai sehingga tidak dapat mengaktifkan akun belajar.id.

e) Satuan Pendidikan Memanfaatkan Google Workspace for Education



Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024

Dari 617 satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmas terdapat 262 satuan pendidikan yang telah mengadopsi Google Workspace for Education dengan persentase sebesar 42,46%. Capaian ini belum mencapai target dari PDM 03 yaitu sebesar 50%. Hal tersebut dikarenakan banyak satuan pendidikan jenjang PAUD berada di wilayah yang tidak terjangkau jaringan internet dan minimnya informasi tentang manfaat penggunaan Google Workspace for Education. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengadakan bimtek atau pendampingan tentang manfaat dari google workspace for education dalam pembelajaran.

Program dan Kegiatan Pendukung PDM 03

- a) Coaching Clinic Kepada Pemerintah daerah dan satuan Pendidikan
- Kegiatan ini menggunakan metode tatap muka (luring)
- Kegiatan ini akan dimulai pada tanggal 19 s.d. 21 Juni 2023
- Pertemuan tatap muka difasilitasi oleh BPMP Provinsi Kalimantan Utara dengan rangkaian kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber dan diakhiri dengan diskusi, saran dan tanya jawab. Adapun tujuan Coaching clinic kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan adalah melakukan pendampingan secara teknis kepada Satuan Pendidikan terkait

dengan Pengelolaan Dana BOS serta memfasilitasi kepada Satuan Pendidikan terkait pengelolaan dana BOS untuk peningkatan mutu pendidikan



b) Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pemanfaatan Platform SDS dan Percepatan Pelaporan Dana BOSP



Tujuan dari kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan Pemanfaatan Platform SDS (SIPLah dan ARKAS) dan Percepatan Pelaporan Dana BOSP adalah membantu satuan pendidikan untuk memaksimalkan pemanfaatan Platform SDS dan SIPLah, dan mendorong satuan pendidikan untuk melakukan percepatan dalam melaporkan Dana BOSP melalui ARKAS.

Kegiatan ini dilaksanakan secara Hybrid (Luring dengan Narasumber daring) yang dimulai dengan Pembukaan oleh Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara, kemudian dilanjutkan dengan paparan materi oleh narasumber.

c) Verifikasi dan Validasi Pemanfaatan Chromebook

Petugas mendampingi satuan pendidikan dalam melakukan verifikasi serial number chromebook pada aplikasi verifikasi CB dan melakukan tanya jawab terkait optimalisasi pemanfaatan chromebook pada satuan pendidikan baik oleh guru ataupun siswa.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan solusi terhadap kepada satuan pendidikan dalam menginput data serial number (SN) dan memberikan pemahaman tentang pemanfaatan chromebook oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran



3) PDM 04 (Implementasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data) Jenjang PAUD Dikmas

Rapor Mutu dan Rapor Pendidikan seringkali dianggap sama bagi sebagian pengguna. Namun, pada konteksnya Rapor Mutu dan Rapor Pendidikan merupakan dua hal yang berbeda. Rapor Pendidikan adalah pengganti atau penyempurnaan dari Rapor Mutu, di mana indikatornya disusun berdasarkan input, proses, dan output pendidikan. Dalam Rapor Pendidikan satuan pendidikan tidak melakukan pengisian data langsung ke dalam instrumen, melainkan data diambil dari sistem yang sudah ada, termasuk dari Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (SIMPKB), Badan Pusat Statistik (BPS), dan sumber lain yang relevan. Satuan pendidikan hanya dipersyaratkan memasukkan data di Dapodik dan kemudian mengikuti Asesmen Nasional.

Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian

pendidikannya dan bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan.

Perencanaan Berbasis Data (PBD) bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret. Selain itu, Perencanaan Berbasis Data (PBD) juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan kegiatan peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan. Terdapat 3 langkah sederhana dalam proses Perencanaan Berbasis Data (PBD), yaitu Identifikasi, Refleksi, dan Benahi (IRB).

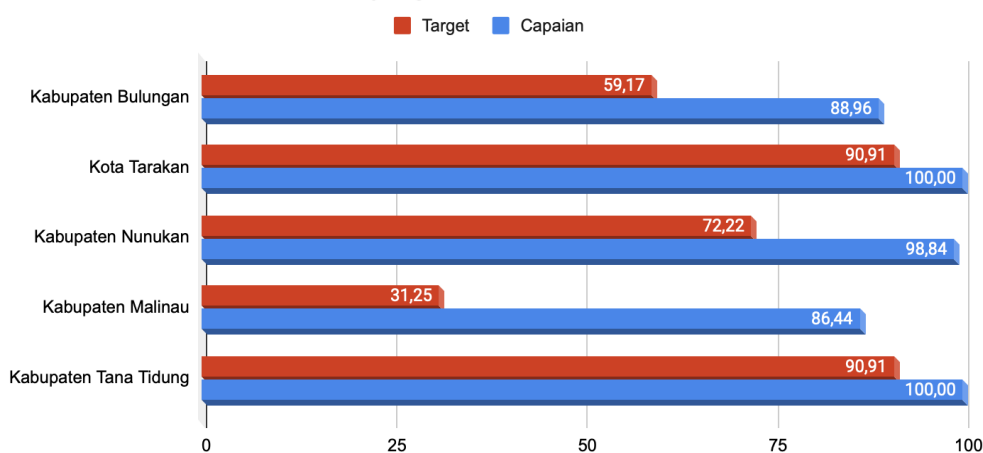
Berikut laporan Implementasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data di Provinsi Kalimantan Utara

a) Akses Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan

Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Walaupun Jenjang PAUD Tidak melaksanakan Asesmen Nasional tetapi Jenjang PAUD diminta mengakses Rapor Pendidikan untuk mempelajari Indikator Rapor Pendidikan Jenjang PAUD dan mengunduh Lembar Kerja PBD).

Akses Rapor Pendidikan Jenjang PAUD

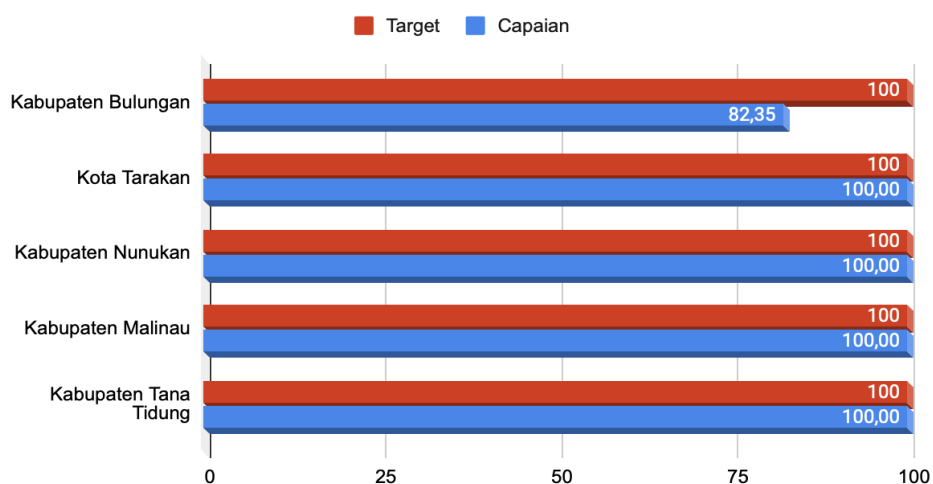


Pada grafik diatas dapat kita simpulkan bahwa Capaian Akses Rapor Pendidikan untuk seluruh Satuan Pendidikan Jenjang PAUD yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan wujud komitmen dari Pemerintah Daerah dalam hal Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar ke-19 pada Jenjang PAUD.

Jenjang Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Tidak ada pengecualian terhadap satuan pendidikan jenjang Pendidikan Masyarakat pun memiliki kewajiban untuk melakukan akses pada rapor pendidikan yang dapat diakses oleh masing-masing satuan pendidikan menggunakan akun belajar.id.

Akses Rapor Pendidikan Jenjang Dikmas

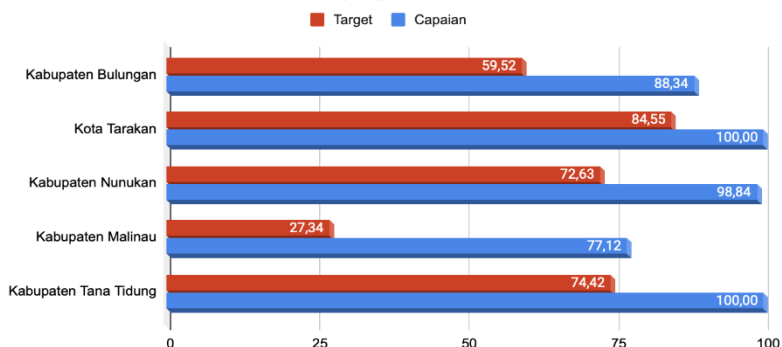


Satuan Pendidikan jenjang Dikmas yang memiliki rapor pendidikan mengakses hasilnya di platform rapor pendidikan, adapun diantaranya yakni meliputi PKBM dan SKB yang masing-masing memiliki PKBM A, B, dan C. Penyebaran tidak sentral hanya pada satu wilayah, walaupun tidak merata komposisi tiap jenisnya tetapi secara holistik satuan pendidikan jenjang Dikmas di wilayah Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung dapat memenuhi target 100%. Kabupaten Bulungan berhasil mengoptimalkan capaian sebesar 82,35% dari target 100%.

b) Implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada dasarnya proses PBD untuk satuan PAUD sama dengan PBD untuk satuan Dasmen yaitu merupakan program dan pengadaan yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Untuk Tahun 2023, Satuan PAUD masih harus mengisi Lembar Kerja PBD.

Perencanaan Berbasis Data Jenjang PAUD

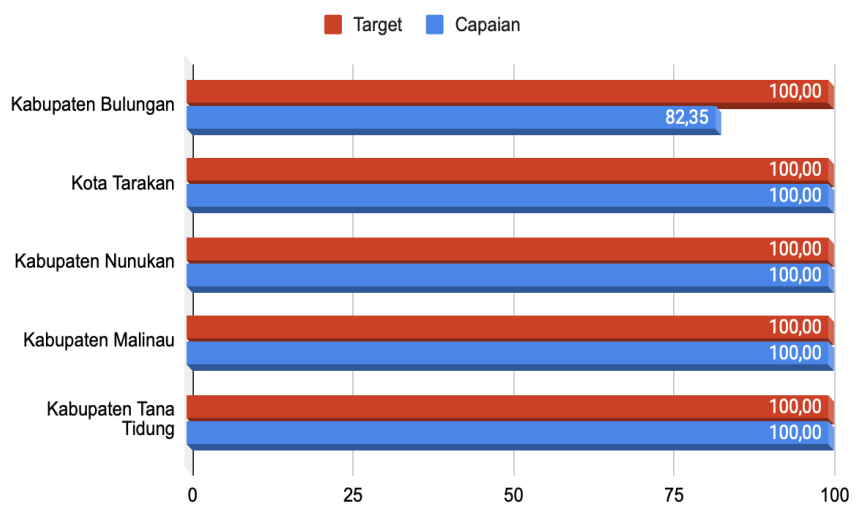


Dapat dilihat pada grafik diatas secara keseluruhan Kab/Kota di wilayah Kalimantan Utara melampaui target yang telah ditetapkan. secara rinci dapat dijabarkan bahwa Kabupaten Bulungan mencapai 88,34% dari 59,52%; Kabupaten Nunukan menduduki 98,84% dari 72,63%, Kabupaten Malinau berhasil mendapatkan capaian sebesar 77,12%, sedangkan capaian di Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan optimal bergerak sampai 100%.

Jenjang Pendidikan Masyarakat (Dikmas)

Satuan Pendidikan jenjang Dikmas perlu melakukan PBD dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih terarah, efektif, dan berkesinambungan menggunakan data-data yang tersedia dalam platform Rapor Pendidikan guna merancang anggaran pendidikan yang lebih efisien, transparan, dan konkret.

Perencanaan Berbasis Data Jenjang Dikmas



Berdasarkan pada grafik diatas bahwa 3 Kabupaten (Nunukan, Malinau, Tana Tidung) dan Kota Tarakan telah mencapai target 100% melakukan PBD di seluruh satuan Pendidikan jenjang Dikmas, Kabupaten Bulungan belum dapat memenuhi target dengan capaian terkini sebesar 82,35%, tidak mencapai target karena ada 1 PKBM yang sudah tidak aktif melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar.

4) PDM 06 (Asesmen Nasional)

Program dan Kegiatan Pendukung

- a) Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Sulingjar PAUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara

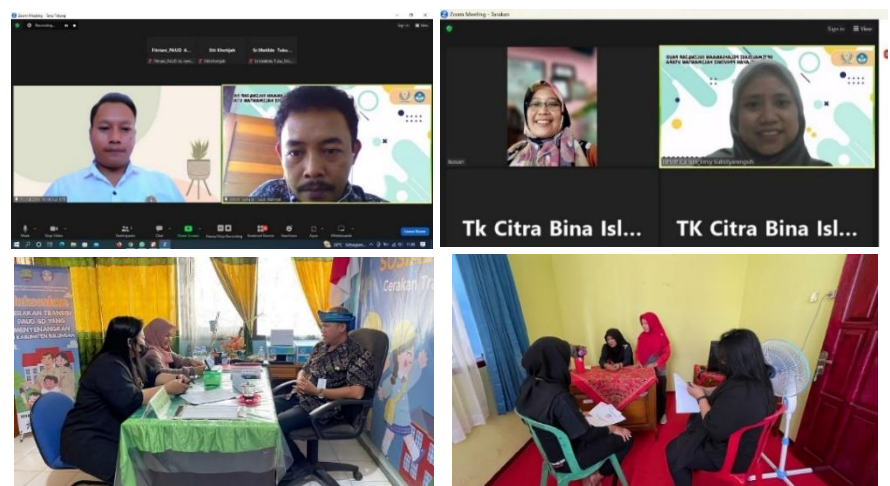
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat PAUD dan mengundang Dinas Pendidikan yang menangani bidang PAUD dan

satuan PAUD se Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sulingjar PAUD di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berdiskusi tanya jawab terkait permasalahan yang terjadi di satuan PAUD terkait pelaksanaan Sulingjar.



b) **Monitoring Pelaksanaan Sulingjar pada jenjang PAUD**

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring bagi daerah Tarakan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung pada tanggal 18 Oktober 2023 dan dilaksanakan secara luring untuk daerah Bulungan pada tanggal 20 Oktober 2023. Sasaran kegiatan ini adalah Dinas Pendidikan dan satuan PAUD. Monitoring pelaksanaan Sulingjar pada jenjang PAUD bertujuan untuk memantau pelaksanaan pengisian Sulingjar PAUD dan memetakan isu – isu terkini terkait dengan pengisian Sulingjar PAUD.



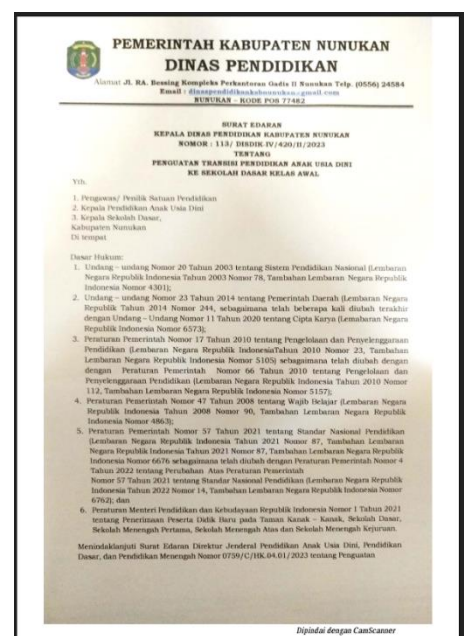
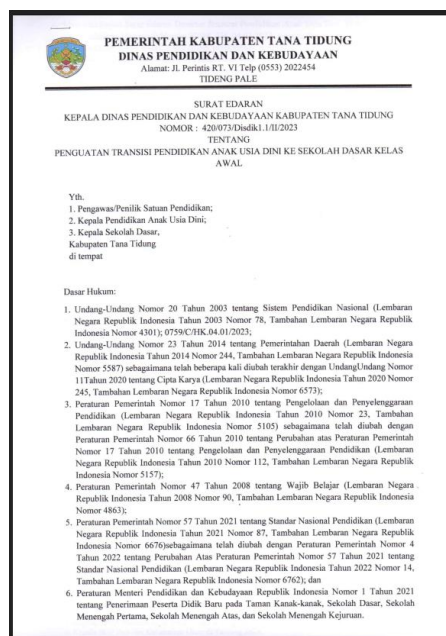
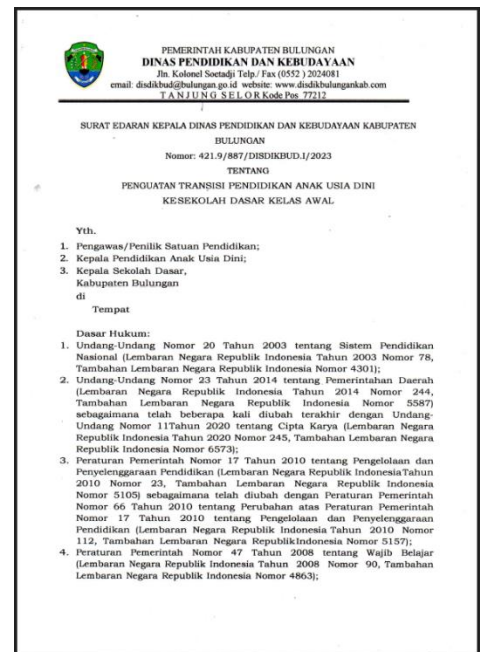
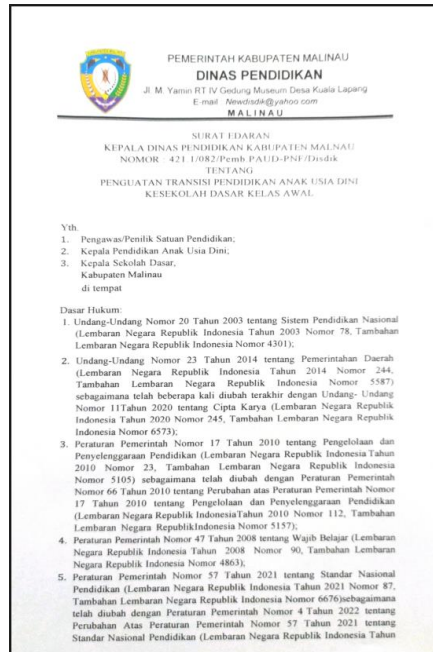
5) PDM 09 (Transisi PAUD SD)

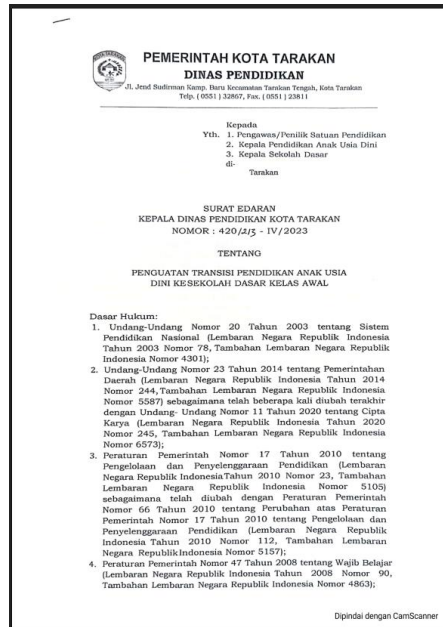
Capaian PDM

a) 75% Kabupaten/ Kota melaksanakan advokasi serta aksi konkret untuk penguatan Transisi PAUD-SD

Dari data yang diperoleh, 100% Kabupaten/ Kota telah melaksanakan advokasi serta aksi konkret untuk penguatan Transisi PAUD SD, hal ini ditunjukkan melalui penerbitan Surat Edaran sebagai tindak lanjut dari SE Dirjen Paud Dikdas Dikmen Nomor 0759/C/HK.04.01/ 2023 tentang Penguatan Transisi PAUD ke SD kelas awal.

Berikut adalah Surat Edaran yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas masing-masing Kabupaten/ Kota.





- b) 10% Satuan Pendidikan (PAUD) mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru

Mulai Belajar			
Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan	Mulai Belajar	Presentase
PAUD	629	103	16.38%
SD	485	248	51.13%

Akses Modul Pembelajaran (Lulus Posttest)			
Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan	Akses Modul (Lulus Posttest)	Presentase
PAUD	629	88	13.99%
SD	485	209	43.09%

Unggah Aksi Nyata			
Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan	Submit Aksi Nyata	Presentase
PAUD	629	49	7.79%
SD	485	144	29.69%

Tanggal Pemutakhiran Data Terakhir
 Jan 19, 2024

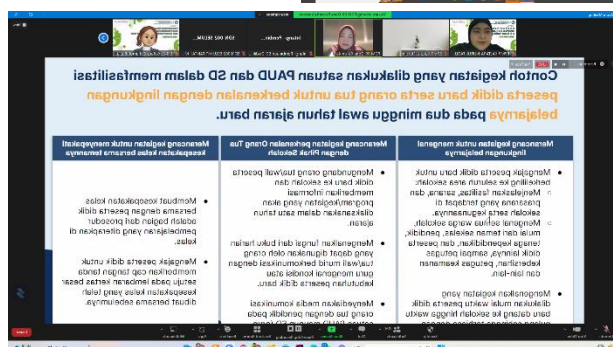
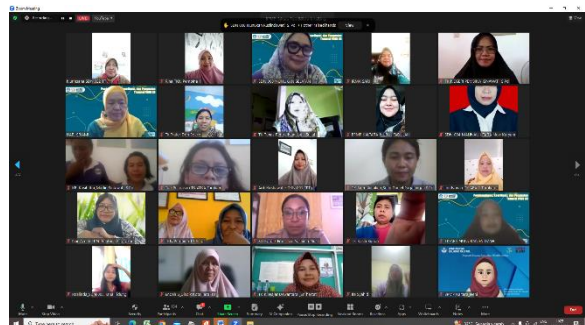
Berdasarkan data di atas, terdata 629 Satuan Pendidikan Jenjang PAUD di Provinsi Kalimantan Utara yang tersebar pada 5 (lima) Kabupaten/ Kota. Terdata 13,99% Satuan PAUD telah melakukan akses modul pembelajaran, dan terdata 7,79% Satuan PAUD yang telah melakukan unggah aksi nyata.

Program dan Kegiatan Pendukung PDM 09

Program yang telah dilaksanakan terkait Transisi PAUD SD ialah:

- a) Advokasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota;

- b) Menjalin komunikasi dengan mitra (dalam hal ini IGTKI Provinsi Kalimantan Utara) untuk beriringan dalam Gerakan Transisi PAUD SD;
- c) Melakukan kegiatan call to action yang menghadirkan Dinas serta Satuan Pendidikan terkait, yaitu PAUD dan SD kelas awal;
- d) Melakukan kegiatan pendampingan terhadap pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SD; dan
- e) Melakukan kegiatan diskusi bersama Guru PAUD dan SD yang telah diberi pembekalan terkait dengan pemanfaatan PMM dan pengimplementasiannya di Satuan Pendidikan.

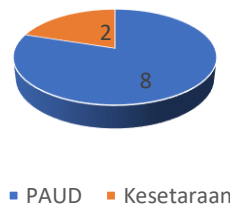


6) PDM 11 (Implementasi Kampanye Sekolah Sehat) Jenjang Paud Dikmas

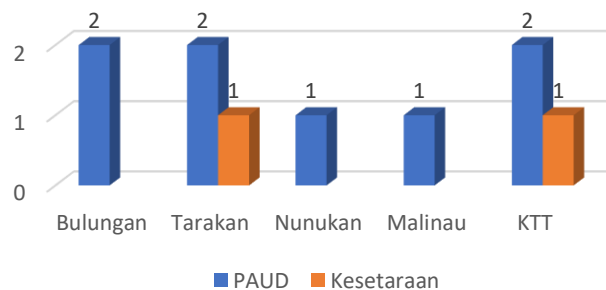
Kampanye sekolah sehat merupakan program yang lahir dilandasi karena adanya COVID 19, permasalahan kesehatan pada peserta didik (obesitas, gangguan organ tubuh, dll), PHBS yang belum membudaya, permasalahan imunisasi, dan trias UKS yang masih berstatus strata rendah. Kegiatan kampanye sekolah sehat berfokus pada 3 Sehat, yakni Sehat Gizi, Sehat Jasmani, dan Sehat Imunisasi. Dalam implementasi 3 sehat, sekolah dapat melakukan langkah-langkah sederhana yang akan menjadi pembiasaan bagi peserta didik itu sendiri.

Berdasarkan arahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam Implementasi Kampanye Sekolah Sehat, BPMP Provinsi Kalimantan Utara memiliki sekolah binaan dengan jumlah 40 sekolah. 40 sekolah tersebut terdiri dari berbagai jenjang, jenjang PAUD dan Kesetaraan terdiri dari 10 Sekolah dan Jenjang Dikdas dan Dikmen terdiri dari 30 sekolah yang tersebar di lima kabupaten/Kota.

Jumlah Sekolah Binaan KSS Tahun 2023



Sebaran Sekolah Binaan KSS Tahun 2023



Capaian PDM 11

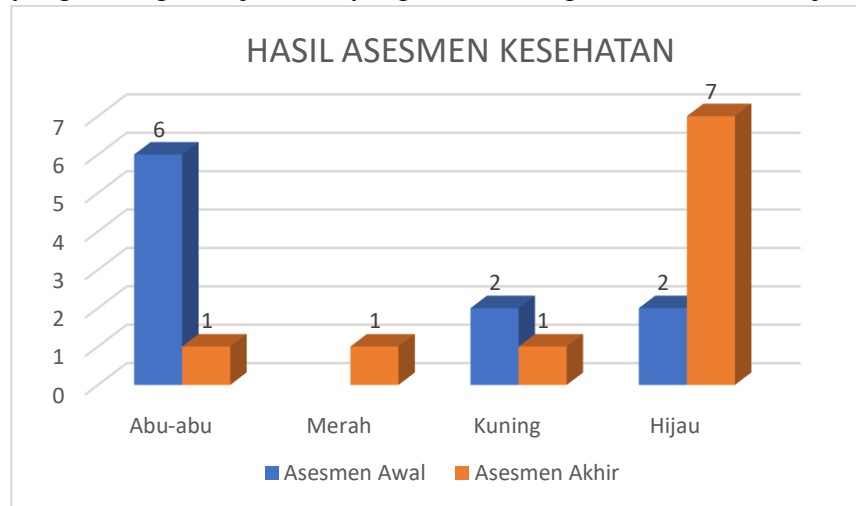
Terdapat 3 objective/capaian yang terdapat di PDM 11 BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

- 75% Pemba menerbitkan SE tentang kebijakan implementasi sekolah sehat;
- 40% satuan pendidikan meningkat kategori status kesehatannya dari merah menjadi kuning di tahun 2024; dan

c) 75% satuan pendidikan binaan mengimplementasikan program gerakan sekolah sehat dan terpetakan kesehatan peserta didiknya.

Berikut hasil capaian PDM 11 Gerakan Sekolah Sehat Tahun 2023:

- a) 100% Pemda menerbitkan SE tentang kebijakan implementasi sekolah sehat (Disdik Provinsi Kalimantan Utara, Disdik Bulungan, Disdik Tarakan, Disdik Nunukan, Disdik Malinau, dan Disdik KTT);
- b) Secara keseluruhan, terdapat peningkatan status kesehatan, baik yang kuning ke hijau atau yang belum mengisi (abu-abu) ke hijau.

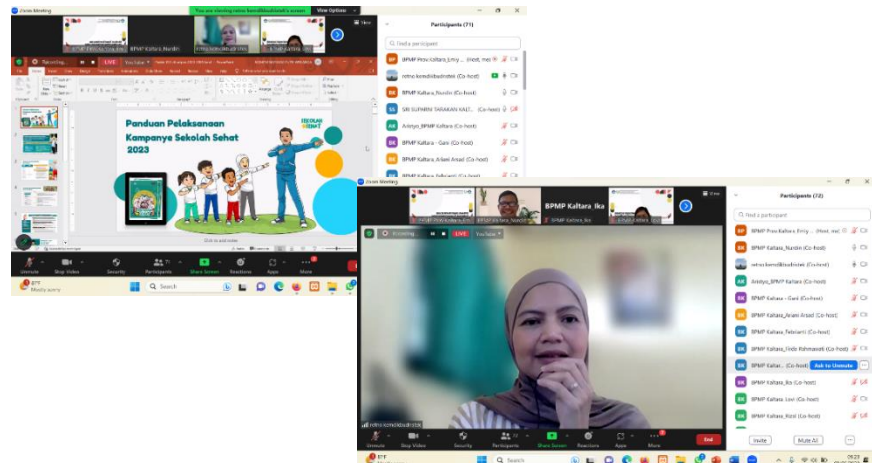


c) Implementasi program gerakan sekolah sehat telah diimplementasikan oleh seluruh sekolah binaan (100%).

Program dan Kegiatan Pendukung PDM 11

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh PDM 11 BPMP Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya untuk mendukung tercapainya objective/capaian, yaitu:

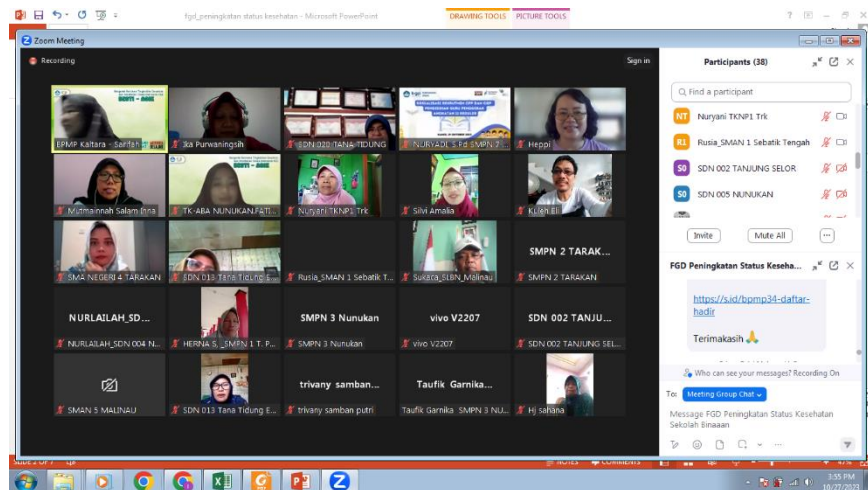
- a) Advokasi, Rapat Koordinasi, dan Sosialisasi Program Sekolah Sehat Kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 8 Juni 2023 secara daring dengan mengundang perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah Binaan, perwakilan Tim Penggerak UKS Provinsi Kalimantan Utara dengan Narasumber PIC PDM 11 Kemendikbud dr. Retno Wulandari.



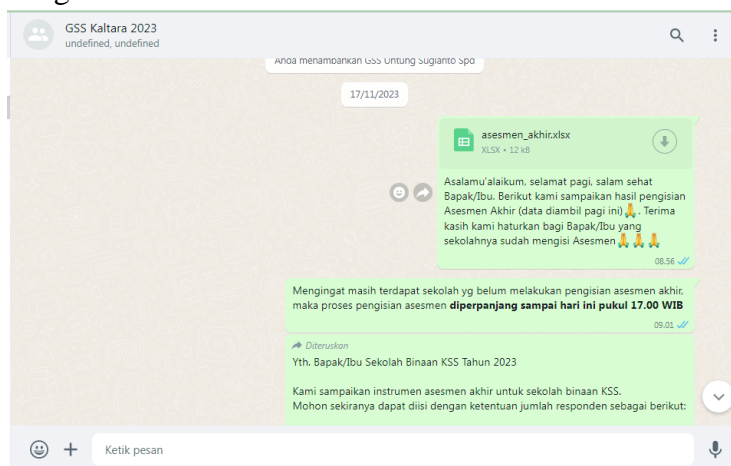
- b) Kegiatan Pendampingan Program Gerakan Sekolah Sehat Goes to School yang diadakan secara luring di Tarakan pada 23 – 25 Agustus dengan peserta dari perwakilan sekolah, sekolah binaan GSS Tahun 2023 dan perwakilan dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan nara sumber berasal dari HIMPSI dan PERSAGI Provinsi Kalimantan Utara



- c) FGD Peningkatan Status Kesehatan Sekolah Binaan yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2023 secara luring dengan peserta seluruh sekolah Binaan GSS Tahun 2023



- d) Komunikasi dan Koordinasi melalui WA Group GSS Kaltara 2023 dengan seluruh Sekolah Binaan.



Hambatan atau Permasalahan IKK 1.1

- 1) Masih banyaknya satuan pendidikan yang berada pada daerah remote area sehingga kesulitan mengakses PMM;
- 2) Kesulitan dalam mengakses PMM karena akun belajar.id;
- 3) Belum menganggap PMM sebagai salah satu sumber belajar dalam IKM
- 4) Rendahnya peningkatan aktivitas komunitas belajar intrasekolah berdasarkan permasalahan belajar pesdik karena sedikitnya jumlah PTK di satuan pendidikan sehingga merasa tidak perlu membentuk komunitas belajar dalam sekolah;
- 5) Masih rendahnya penggunaan SIPLah oleh satuan pendidikan dikarenakan masih ada satuan pendidikan yang berada pada area blank spot, harga yang masih relative lebih mahal, dan sedikitnya penyedia yang ada pada aplikasi SIPLah;
- 6) Hasil survei persepsi positif Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulingjar ini dilaksanakan 2 tahap dan dikoordinir oleh tim PDM 06 pusat, untuk hasil survei dari tahap 1 sudah dipublikasikan, namun untuk saat ini hasil survei tahap 2 masih sedang proses rencana publikasi. Sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan untuk mengetahui hasil capaian nomor 1 PDM 06;
- 7) Hasil capaian pada target nomor 2 tentang delta rata-rata 2% partisipasi AN dan Sulingjar Tahun 2023 untuk partisipasi AN sudah dapat terpenuhi karena partisipasi mengalami peningkatan dengan delta rata-rata sebesar 2%, namun untuk partisipasi Sulingjar masih belum terpenuhi karena adanya perbedaan jumlah Satuan Pendidikan secara signifikan, hal ini dikarenakan pelaksanaan Sulingjar tahun 2023 sudah melibatkan seluruh satuan PAUD, sedangkan tahun sebelumnya hanya Satuan PAUD yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak. Selain itu kendala yang ada adalah beberapa Satuan Pendidikan dan Satuan PAUD tidak mengetahui jadwal pengisian Sulingjar dan terdapat permasalahan seperti lupa akun yang sedikit menghambat pengisian Sulingjar;
- 8) Masih banyak Satuan Pendidikan yang berada pada daerah remote area, sehingga sulit mengakses PMM;
- 9) Masih terdapat Kabupaten/ Kota yang belum memiliki forkom (forum komunikasi);
- 10) Masih banyak Guru Satuan Pendidikan, utamanya PAUD yang belum maksimal memanfaatkan PMM sebagai salah satu sumber belajar terkait Transisi PAUD SD;
- 11) Terdapat sekolah yang tidak mengisi asesmen awal tetapi mengisi asesmen akhir, sehingga sulit untuk membandingkan hasil asesmen (terdapat gap antara awal dan akhir); dan
- 12) Jadwal kegiatan mengikuti dari PDM 11 Pusat, sehingga terdapat keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Langkah Antisipasi

- 1) Menggerakkan komunitas belajar dalam sekolah yang sudah terbentuk dalam meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan PMM;

- 2) Koordinasi ke pemerintah daerah terkait Pemanfaatan PMM oleh sekolah pelaksana IKM melalui PMO level pemerintah daerah;
- 3) MenKomunitas belajar dalam sekolah sangat penting karena komunitas belajar menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik;
- 4) Menghimbau pemerintah daerah untuk mendorong UMKM menjadi mitra pada aplikasi SIPLah;
- 5) Melakukan koordinasi dengan Tim PDM 06 Pusat tentang hasil capaian survei persepsi positif Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulingjar;
- 6) Melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Dinas dan mitra pendidikan (IGTKI Provinsi dan Pokja Bunda PAUD) dalam proses mengawal Gerakan Transisi PAUD SD;
- 7) Komunikasi secara intens dengan sekolah binaan melalui WAG dan komunikasi secara pribadi dengan sekolah binaan; dan
- 8) Berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PDM 11 Pusat untuk langkah-langkah dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Strategi yang Akan Dilakukan

- 1) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan dalam rangka pemanfaatan PMM;
- 2) Melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada pemerintah daerah maupun langsung ke satuan pendidikan melalui komunitas belajar secara daring dan luring terkait pemanfaatan PMM;
- 3) Mendorong pemerintah daerah merekrut guru PAUD dan Dikmas dengan kualifikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 4) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan khususnya PAUD dan Dikmas untuk membentuk komunitas belajar dalam sekolah;
- 5) Melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada pemerintah daerah maupun langsung ke satuan pendidikan melalui komunitas belajar secara daring dan luring terkait pentingnya komunitas belajar dalam sekolah menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik;
- 6) Mendorong pemerintah daerah merekrut guru PAUD dan Dikmas dengan kualifikasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 7) Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi Sulingjar adalah dengan mengadakan kegiatan Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Sulingjar PAUD di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, selain itu juga memantau perkembangan pengisian Sulingjar pada setiap jenjang dan memetakan sekolah - sekolah yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian khusus seperti belum adanya progres pengisian Sulingjar, sehingga melakukan koordinasi dengan Dinas

Pendidikan dan Satuan Pendidikan untuk mengetahui kendala yang dialami dan membuat layanan konsultasi terkait Sulingjar untuk memudahkan koordinasi dengan Satuan Pendidikan yang mengalami kesulitan dalam pengisian Sulingjar dapat menghubungi layanan konsultasi;

- 8) Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan pendampingan terhadap Satuan Pendidikan (PAUD dan SD) dalam pelaksanaan Gerakan Transisi PAUD SD;
- 9) Mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk dan mengaktifkan forum komunikasi di Daerahnya masing-masing;
- 10) Melakukan sosialisasi serta pendampingan terhadap Satuan Pendidikan, khususnya kepada SD kelas awal; dan
- 11) Mendorong Pemerintah Daerah (dalam hal ini Pokja Bunda PAUD) untuk dapat berperan aktif dalam Gerakan Transisi PAUD SD.

b. Indikator Kinerja Kegiatan 1.2

Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Indikator kinerja kegiatan ini menggambarkan kondisi mutu pendidikan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun berjalan dengan tahun sebelumnya yang sumber atau basis pengukurannya itu berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen nasional. Adapun definisi operasional Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya dan dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen pada provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Untuk mengukur capaian IKK 1.2 ini dibutuhkan rapor pendidikan hasil AN tahun 2022 dan tahun 2023, dikarenakan rapor pendidikan tahun 2023 belum terbit sampai dengan Januari 2024, maka untuk indikator 1.2 tentang persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) ini dihitung berdasarkan data rapor pendidikan hasil AN tahun 2021 dan tahun 2022 yang bersumber PSKP BSKAP.

Berikut ini adalah data indeks SPM yang bersumber dari hasil Asesmen Nasional satuan Dikdas dan Dikmen yang telah diolah oleh PSKAP – BSKAP di Provinsi Kalimantan Utara:

Wilayah	Kewenangan	Indeks SPM		Kenaikan	Ket
		2021	2022		
Provinsi Kalimantan Utara	SMA, SMK, Dikus	53,87	55,56	1,69	Naik
Kab. Bulungan	PAUD, SD, SMP	56,43	60,01	3,58	Naik
Kab. Malinau	PAUD, SD, SMP	53,06	53,76	0,70	Naik
Kab. Nunukan	PAUD, SD, SMP	52,44	54,80	2,36	Naik
Kab. Tana tidung	PAUD, SD, SMP	55,64	63,11	7,47	Naik
Kota Tarakan	PAUD, SD, SMP	60,36	67,20	6,84	Naik

Sumber: PSKAP BSKAP

Terdapat sedikit perbedaan metode perhitungan yang digunakan oleh PSKAP dalam menentukan capaian IKK 1.2 ini. Capaian IKK 1.2 dari PSKAP dihitung dengan formula:

$$\text{IKK 1.2} = \frac{\text{Jumlah daerah yang Indeks SPM-nya meningkat} \times 100}{\text{Jumlah daerah yang bersangkutan}}$$

Walaupun indeks SPM tersebut diperoleh dari pengolahan data hasil AN satuan pendidikan di masing-masing daerah. Oleh karena itu dengan

menggunakan metode perhitungan tersebut dapat diperoleh nilai capaian IKK 1.2 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKK 1.2} &= 6 / 6 \times 100 \\ &= 100 \end{aligned}$$

Setelah melalui proses perhitungan menggunakan formula diatas, maka ditemukan capaian IKK 1.2 tahun 2023 berdasarkan indeks SPM dari rapor pendidikan yakni sebesar 100%.

Berikut ini juga kami tampilkan Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra.



Tabel diatas menggambarkan capaian kinerja untuk IKK 1.2. terkait persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen). Dapat diketahui bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Utara dapat mencapai target bahkan melebihi target yang telah diperjanjikan. Adapun target IKK 1.2. pada tahun 2023 adalah sebesar 30% Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) dan capaiannya adalah sebesar 100%, hal ini menggambarkan bahwa persentase capaian IKK 1.2 ini tercapai sebesar 333,33% jauh diatas target yang telah ditetapkan.

Tabel diatas juga menyajikan perbandingan capaian tahun sebelumnya dengan capaian tahun berjalan dimana BPMP Provinsi Kalimantan Utara berhasil mempertahankan capaiannya yakni 100% di tahun 2022 dan juga 100% di tahun 2023. Selanjutnya perbandingan capaian tahun berjalan

dengan target akhir renstra yakni 35% sedangkan capaian tahun 2023 sebesar 100% sehingga dapat diketahui bahwa capaian tahun berjalan sudah jauh diatas target akhir renstra.

Program dan Kegiatan Pendukung IKK 1.2

Senada dengan IKK 1.1 dalam upaya mencapai target IKK 1.2 terkait Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) BPMP Kaltara juga didukung oleh beberapa program prioritas, dimana program tersebut diistilahkan dengan PDM singkatan dari Paud, Dikdas dan Dikmen yang terdiri dari 11 PDM dan 10 diantaranya mengintervensi IKK 1.2. Berikut ini disajikan capaian dari masing-masing PDM di BPMP Kaltara:

1) PDM 01 (Program Sekolah Penggerak)

Program Sekolah Penggerak (PSP) yang merupakan salah satu program prioritas dalam rangka percepatan transformasi di bidang pendidikan dengan menysasar sekolah-sekolah yang nantinya akan melakukan perubahan di sekolah yang ditandai dengan perubahan fokus pembelajaran ke peserta didik. Sekolah yang terpilih melalui seleksi ketat ini, mendapatkan lima intervensi sebagai bekal mereka melakukan transformasi pembelajaran, yaitu pendampingan konsultatif dan asimetris, penguatan sumber daya manusia di sekolah, pembelajaran dengan paradigma baru, perencanaan berbasis data dan digitalisasi sekolah. Setelah didampingi intensif selama tiga tahun, maka sekolah yang terpilih ini akan melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah sekitar untuk menjadi agen perubahan dan transformasi di bidang pendidikan di wilayahnya.

Pada tahun 2023 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, terdapat target-target yang diturunkan ke UPT sebagai alat ukur berjalan dan suksesnya Program Sekolah Penggerak. Target yang diturunkan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 80% PSP 1
- b) Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 60% PSP 2
- c) Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 40% PSP 3
- d) Minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM, dengan target 80% PSP 1
- e) Minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM, dengan target 50% PSP 2
- f) 35% pemda siap melanjutkan Implementasi PSP Angkatan 1 (regulasi dan anggaran)

Capaian PDM 01

- a) Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 80% PSP 1

Terdapat 13 sekolah lolos seleksi dan mengikuti Program Sekolah Penggerak yang semuanya berada di wilayah Kabupaten Nunukan dengan jenjang PAUD sampai dengan SMP merupakan tanggung jawab Kabupaten Nunukan dan jenjang SMA dan SLB berada di Provinsi Kalimantan Utara. Dari 13 sekolah penggerak, 10 sekolah mengalami peningkatan skor rapor pendidikan atau 76,92% jika memakai total sekolah penggerak angkatan 1. Hal ini terjadi karena 3 sekolah tidak/belum melaksanakan Asesmen Nasional sehingga tidak muncul skor rapornya, yaitu 2 sekolah jenjang PAUD dan 1 jenjang SLB. Jika menghitung sekolah yang sudah melaksanakan AN, maka capaian mencapai **100% atau mencapai target**.

Sekolah Penggerak Angkatan 1

No.	Nama Sekolah	Skor Rapor	Keterangan
1.	TK Pembina Nunukan Selatan	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN
2.	KB. Abi Al- Ummi	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN
3.	SD Negeri 001 Nunukan Selatan	Naik	
4.	SD Negeri 007 Nunukan	Naik	
5.	SD Negeri 004 Sebatik Barat	Naik	
6.	SD Negeri 008 Tulin Onsoi	Naik	
7.	SD Negeri 004 Nunukan Selatan	Naik	
8.	SMP Negeri 1 Lumbis	Naik	
9.	SMP Negeri 1 Nunukan	Naik	
10.	SMAN 1 Nunukan	Naik	
11.	SMAN 1 Sebatik	Naik	
12.	SMAIT Ibnu Sina Boarding School	Naik	
13.	SLB Negeri Nunukan	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN

- b) Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 60% PSP 2

Pada angkatan 2, sekolah penggerak melibatkan lebih banyak wilayah dengan total 26 sekolah, selain dari Kabupaten Nunukan

dan Provinsi Kalimantan Utara (jenjang SMA dan SLB), terdapat sekolah dari Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. Sama dengan angkatan 1, terdapat 4 sekolah yang tidak bisa masuk perhitungan skor rapor dikarenakan belum/tidak melaksanakan AN. Jika memasukkan seluruh sekolah penggerak maka capaian kenaikan skor rapornya adalah 80,77%, dan jika hanya memasukkan sekolah yang sudah melaksanakan AN adalah 100%, **dengan kata lain mencapai target.**

Sekolah Penggerak Angkatan 2

No.	Nama Sekolah	Skor Rapor	Keterangan
1.	KB Bina Kasih	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN
2.	TK Melati	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN
3.	TK Kihajar Dewantara Nunukan	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN
4.	TK Negeri Terpadu Unggulan Tana Tidung	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN
5.	SD Negeri 005 Tanjung Palas Timur	Naik	
6.	SD Negeri 009 Tanjung Palas	Naik	
7.	SD Negeri 026 Tanjung Selor	Naik	
8.	SD Negeri 008 Tanjung Palas Tengah	Naik	
9.	SD Negeri 007 Tanjung Palas	Naik	
10.	SD Negeri 012 Tanjung Selor	Naik	
11.	SD Negeri 020 Tanjung Selor	Naik	
12.	SD Negeri 002 Sembakung	Naik	
13.	SD Negeri 005 Lumbis	Naik	
14.	SD Negeri 004 Sembakung Atulai	Naik	
15.	SDS 002 Muhammadiyah Nunukan	Naik	
16.	SD IT Ibnu Sina Nunukan	Naik	
17.	SD Negeri Terpadu Unggulan 2 Tana Tidung	Naik	
18.	SMP Negeri 3 Tanjung Palas Tengah	Naik	

19.	SMP Negeri 6 Tanjung Selor	Naik	
20.	SMP Negeri 1 Sekatak	Naik	
21.	SMP Negeri 1 Sebatik Barat	Naik	
22.	SMP Negeri 1 Sebuku	Naik	
23.	SMPN 6 Tana Tidung	Naik	
24.	SMAN 2 Tana Tidung	Naik	
25.	SMAS K ST Gabriel Nunukan	Naik	
26.	SLB Negeri Tana Tidung	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN

- c) Peningkatan skor rapor pendidikan jenjang dasmen (index karakteristik satpen) 40% PSP 3

Angkatan 3 yang merupakan angkatan terakhir sekolah penggerak melibatkan 4 wilayah di Kalimantan Utara, yaitu Provinsi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau dengan total 21 sekolah. Terdapat 4 sekolah yang belum memiliki skor rapor pendidikan, kesemuanya berasal dari jenjang PAUD. Dengan mengesampingkan 4 sekolah tersebut, maka 17 sekolah tersebut mengalami peningkatan skor rapor pendidikan atau **100%**.

Sekolah Penggerak Angkatan 3

No.	Nama Sekolah	Skor Rapor	Keterangan
1.	SMAN 1 Sebuku	Naik	
2.	SMAN 1 Tanjung Palas	Naik	
3.	SMAN 2 Tanjung Selor	Naik	
4.	SMAN 1 Peso	Naik	
5.	SMAS Frater Don Bosco	Naik	
6.	TKIT Al Mustaqim 2	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN
7.	SD Negeri 005 Kampung I	Naik	
8.	SD Negeri 014 Gunung Belah	Naik	
9.	SD Negeri 036 Kampung Baru	Naik	
10.	SD Negeri 035 Pamusian	Naik	

11.	SD Negeri 032 Tanjung Batu	Naik	
12.	SDS IT Ibnu Abbas Tarakan	Naik	
13.	SMP Negeri 5 Tarakan	Naik	
14.	TK Tunas Rimba	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN
15.	SD Negeri 010 Tanjung Palas Utara	Naik	
16.	SMP Negeri 4 Tanjung Palas Timur	Naik	
17.	SMP Negeri 4 Malinau Selatan Hilir	Naik	
18.	KB Al Amin Hidayatullah	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN
19.	PAUD Nurul Jadid	Tidak Tersedia*	Tidak melaksanakan AN
20.	SD Negeri 018 Tana Tidung	Naik	
21.	SMPN 1 Tana Tidung	Naik	

- d) Minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM, dengan target 80% PSP 1

Kontributor praktik baik ini mendapatkan data yang sudah disediakan oleh pusat, untuk angkatan 1, seluruh sekolah sudah memiliki guru yang berkontribusi di PMM atau 100%, melebihi target dari pusat.

- e) Minimal 1 orang guru di sekolah pelaksana PSP melakukan pengimbasan dan kontributor konten/berbagi praktik baik di PMM, dengan target 50% PSP 2

Kontributor praktik baik ini mendapatkan data yang sudah disediakan oleh pusat, untuk angkatan 2, seluruh sekolah sudah memiliki guru yang berkontribusi di PMM atau 100%, melebihi target dari pusat.

- f) 35% pemda siap melanjutkan Implementasi PSP Angkatan 1 (regulasi dan anggaran)

Pada angkatan 1, terdapat dua wilayah yang menjalankan yaitu Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Nunukan sudah membuat regulasi yaitu Kabupaten Nunukan yang sudah membuat juknis BOSDA yang berisi tambahan dana BOS khusus untuk sekolah penggerak.

Program dan Kegiatan Pendukung PDM 01

Guna mendukung target-target yang diberikan oleh pusat, maka diadakanlah berbagai kegiatan-kegiatan baik secara daring maupun luring. Kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a) Pertemuan untuk koordinasi antara UPT PAUD Dikdasmen dengan UPT GTK
- b) Pertemuan Periodik PMO
- c) Pembentukan Project Management Officer (PMO) Tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/kota
- d) Penguatan literasi bersama-sama dengan BGP, FSP dan dinas pendidikan Ke sekolah PSP
- e) Forum Pemangku kepentingan PSP membuat komitmen bersama terkait keberlanjutan PSP
- f) Bimtek Penguatan Pengawas Sekolah dalam Pendampingan PSP Angkatan 1
- g) Pendampingan dan Fasilitasi Guru-guru PSP dalam melakukan pengimbasan bersama Pemda, BGP, dan FSP
- h) Pendampingan dan Koordinasi Penyusunan Strategi Peningkatan Rapor Pendidikan PSP dengan DISDIK, BGP dan FSP
- i) Pendampingan program GSS goes to school
- j) Advokasi dan Menjaring Isu Pemda dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar, guru Penggerak, dan Perkembangan Pendidikan
- k) Pendampingan dan advokasi terkait komitmen Pemda dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif
- l) Monitoring dan evaluasi implementasi PBD di Satuan Pendidikan
- m) Penguatan materi P5 ke Pemda dan Satuan Pendidikan

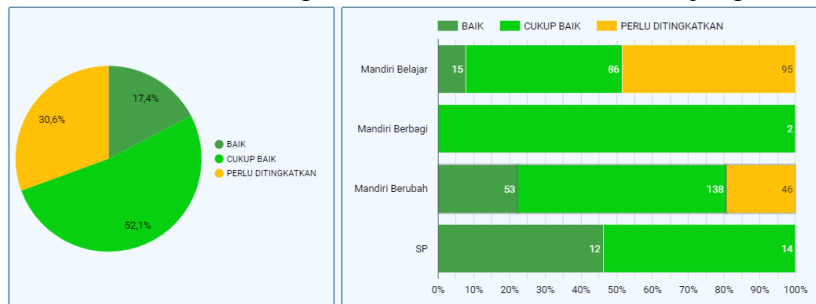




2) PDM 02 (Implementasi Kurikulum Merdeka) Capaian PDM

- a) Peningkatan Pemanfaatan PMM oleh guru pelaksana IKM menjadi 90% Dikdas dan Dikmen

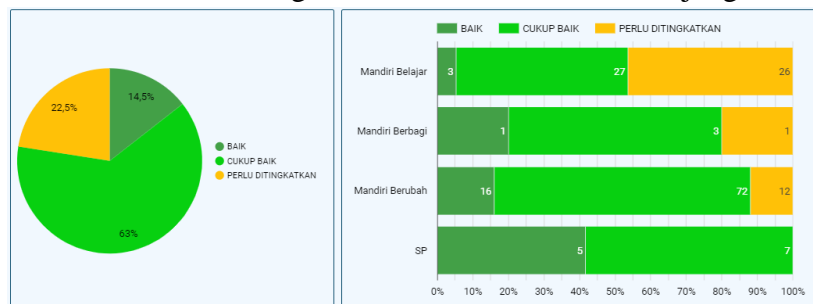
Pemanfaatan PMM Bagi Sekolah Pelaksana IKM Jenjang SD



Sumber : Dasbor Penggunaan PMM Nasional Per 14 Januari 2024

Data diatas menunjukkan persentasi capaian seluruh target PDM 02 terkait Peningkatan pemanfaatan PMM oleh sekolah pelaksana IKM jenjang SD kategori baik sebesar 17,4%, kategori cukup baik 52,1% dan perlu ditingkatkan 30,6%.

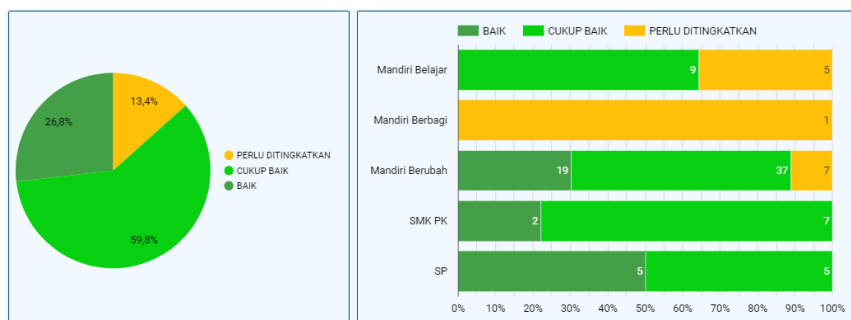
Pemanfaatan PMM Bagi Sekolah Pelaksana IKM Jenjang SMP



Sumber : Dasbor Penggunaan PMM Nasional Per 14 Januari 2024

Data Peningkatan pemanfaatan PMM oleh sekolah pelaksana IKM jenjang SMP pada data diatas untuk kategori baik sebesar 14,5%, kategori cukup baik 63% dan perlu ditingkatkan 22,5%.

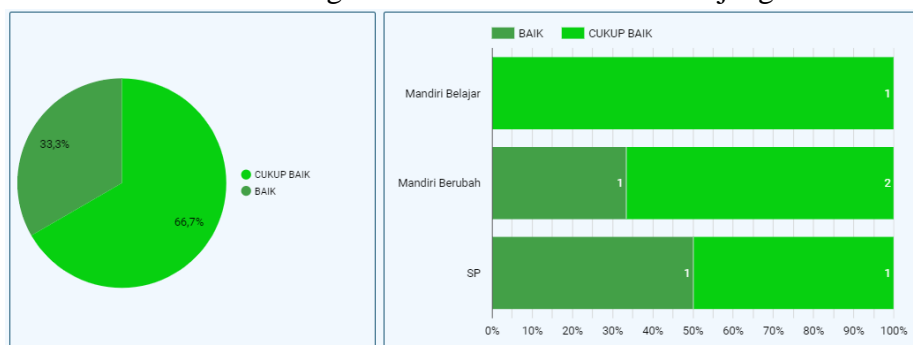
Pemanfaatan PMM Bagi Sekolah Pelaksana IKM Jenjang SMA/SMK



Sumber : Dasbor Penggunaan PMM Nasional Per 14 Januari 2024

Untuk jenjang SMA/SMK, data peningkatan pemanfaatan PMM oleh sekolah pelaksana IKM kategori baik sebesar 26,8%, kategori cukup baik 59,8% dan perlu ditingkatkan 13,4%.

Pemanfaatan PMM Bagi Sekolah Pelaksana IKM Jenjang SLB

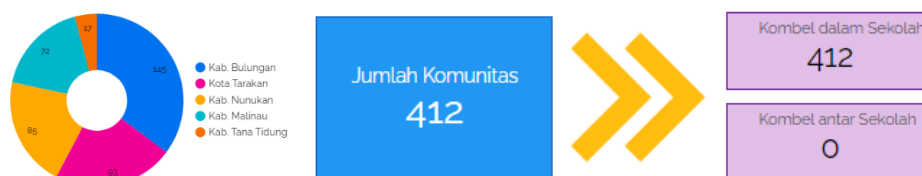


Sumber : Dasbor Penggunaan PMM Nasional Per 14 Januari 2024

Sedangkan untuk peningkatan pemanfaatan PMM oleh sekolah pelaksana IKM pada jenjang SLB kategori baik sebesar 33,3% dan kategori cukup baik 66,7%.

- b) Peningkatan Aktivitas Komunitas Belajar Intrasekolah Berdasarkan Permasalahan Belajar Pesdik Menjadi 50% Jenjang Dikdas dan Dikmen

Komunitas Belajar dalam Sekolah Pelaksana IKM Jenjang Dikdas Dikmen



Sumber : <https://s.id/sikomika> Per 14 Januari 2024)

Berdasarkan data di atas, jumlah komunitas belajar dalam sekolah untuk jenjang Dikdas dan Dikmen sebanyak 412 komunitas belajar yang tersebar di 5 (lima) kabupaten/kota di Kalimantan Utara.

	Bentuk Pendidikan	Jumlah Sekolah	Sudah IKM	Persentase
1.	SD	485	462	95,26%
2.	SMP	195	173	88,72%
3.	SMA	68	66	97,06%
4.	SMK	33	31	93,94%
5.	SLB	6	6	100%
Total keselu...		787	738	93,77%

Sumber : <https://s.id/sikomika> Per 14 Januari 2024

Perbandingan sekolah pelaksana IKM jenjang Dikdas dan Dikmen berjumlah 738 dengan 412 komunitas belajar dalam sekolah, sehingga untuk peningkatan aktivitas komunitas belajar intrasekolah berdasarkan permasalahan belajar pesdik sebesar 55,8%.

Program dan Kegiatan Pendukung PDM 02

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait Implementasi Kurikulum Merdeka:

- Melakukan pendampingan terkait miskonsepsi IKM
- Melakukan advokasi kepada pemerintah daerah dalam pendampingan IKM kepada satuan pendidikan
- Menggalang mitra pembangunan di daerah terkait IKM
- Rakor Pembahasan Miskonsepsi IKM dengan Pemda
- Pendampingan Komunitas Belajar
- Sosialisasi peran mitra pembangunan dalam mendukung IKM
- Melakukan refleksi dan koordinasi berkala dengan mitra pembangunan terkait perkembangan IKM
- Penguatan materi P5 ke Pemda dan Satuan Pendidikan



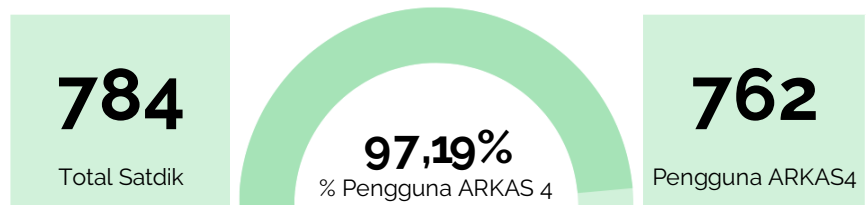


3) PDM 03 (Transformasi Digital)

Persentase capaian seluruh target PDM 03 terkait Transformasi Digital berada di atas 80% (Dikdas Dikmen) dan berikut uraiannya:

a) Satuan Pendidikan Penerima BOS Menggunakan ARKAS 4

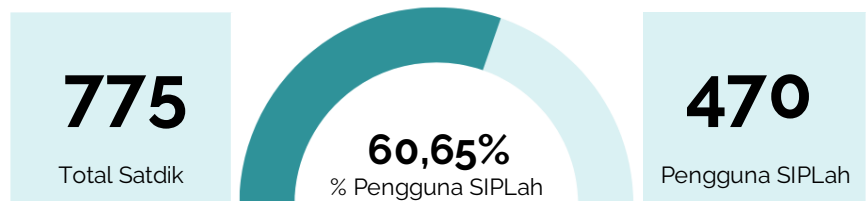
Jumlah satuan pendidikan pada jenjang Dikdas dan Dikmen penerima dana BOS yang telah mengadopsi ARKAS versi 4 adalah sebanyak 762 satuan pendidikan dari total jumlah satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen yaitu 784 satuan pendidikan. Terdapat 18 satuan pendidikan pada jenjang SD yang belum mengadopsi ARKAS 4, dengan persentase yang telah adopsi sebesar 96,28%. Pada jenjang SMP terdapat 4 satuan pendidikan yang belum mengadopsi ARKAS 4, dengan persentase yang telah mengadopsi ARKAS 4 adalah sebesar 97,92%. Sedangkan pada jenjang SMA dan SMA serta SLB seluruh satuan pendidikan telah mengadopsi ARKAS 4 dengan persentase masing-masing 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dan grafik di bawah ini:



Jenjang	Total Satdik	Pengguna ARKAS 4	Persentase
SD	484	466	96,28%
SMP	192	188	97,92%
SMA	68	68	100,00%
SMK	33	33	100,00%
SLB	7	7	100,00%

Sumber: *Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024*

b) Satuan Pendidikan Menggunakan SIPLAH



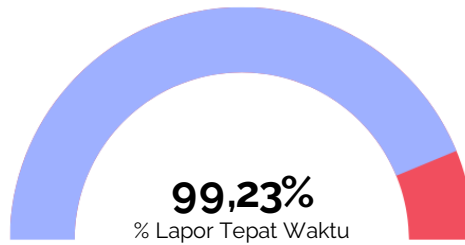
Jenjang	Total Satdik	Pengguna SIPLah	Persentase
SD	484	290	59,92%
SMP	189	122	64,55%
SMA	66	40	60,61%
SMK	31	14	45,16%
SLB	5	4	80,00%

Sumber: *Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024*

Terdapat 470 satuan pendidikan penerima BOS yang telah menggunakan SIPLah atau sebesar 60,65%.

c) Satuan Pendidikan Penerima BOS Melaporkan Dananya melalui ARKAS Tepat Waktu

Pelaporan dana melalui ARKAS pada jenjang SD sebesar 98,97% yaitu sebanyak 479 satuan pendidikan. Pada jenjang SMA sebesar 98,48% yaitu sebanyak 65 satuan pendidikan dari total 66 satuan pendidikan. Sedangkan untuk SMP, SMK dan SLB telah mencapai 100%. Untuk lebih jelasnya tentang pelaporan dana melalui ARKAS pada tiap-tiap jenjang dapat dilihat pada tabel dibawah:

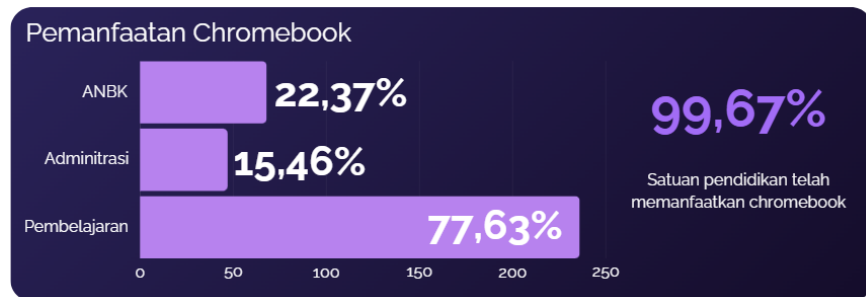


Jenjang	Total Satdik	Sudah	Belum	Persentase
SD	484	479	5	98,97%
SMP	189	189	0	100,00%
SMA	66	65	1	98,48%
SMK	31	31	0	100,00%
SLB	5	5	0	100,00%
Jumlah	775	769	6	99,23%

Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024

Terdapat 6 satuan pendidikan yang melapor dananya tepat waktu, yaitu jenjang SD sebanyak 5 satuan pendidikan dan jenjang SMA yaitu 1 satuan pendidikan.

d) Penerima Chromebook Memanfaatkan untuk Pembelajaran



(Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024)

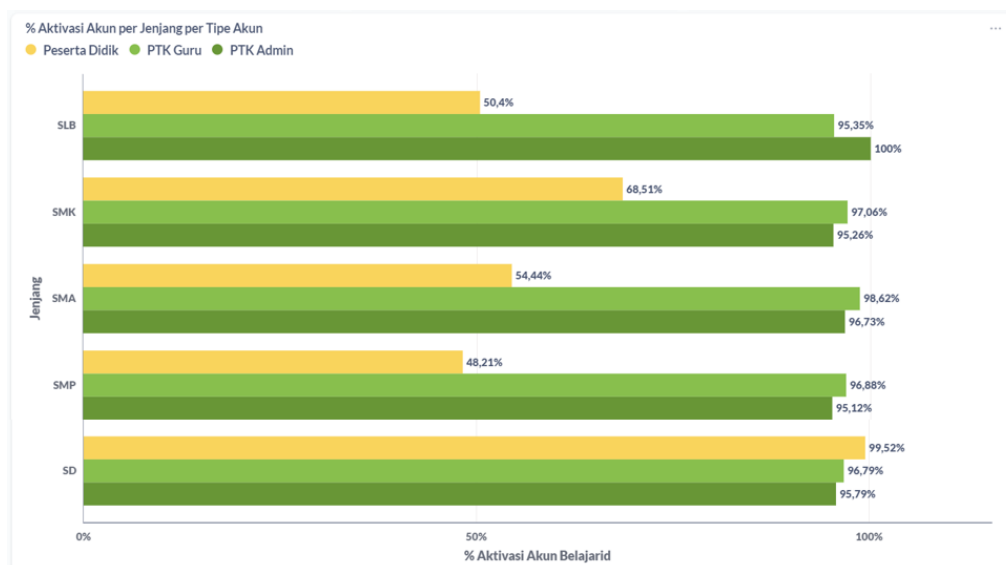
Pemanfaatan chromebook untuk pembelajaran sebesar 77,63, untuk adminitrasi sekolah sebesar 15,46% dan untuk ANBK sebesar 22,37%.

e) Akun belajar.id Aktif



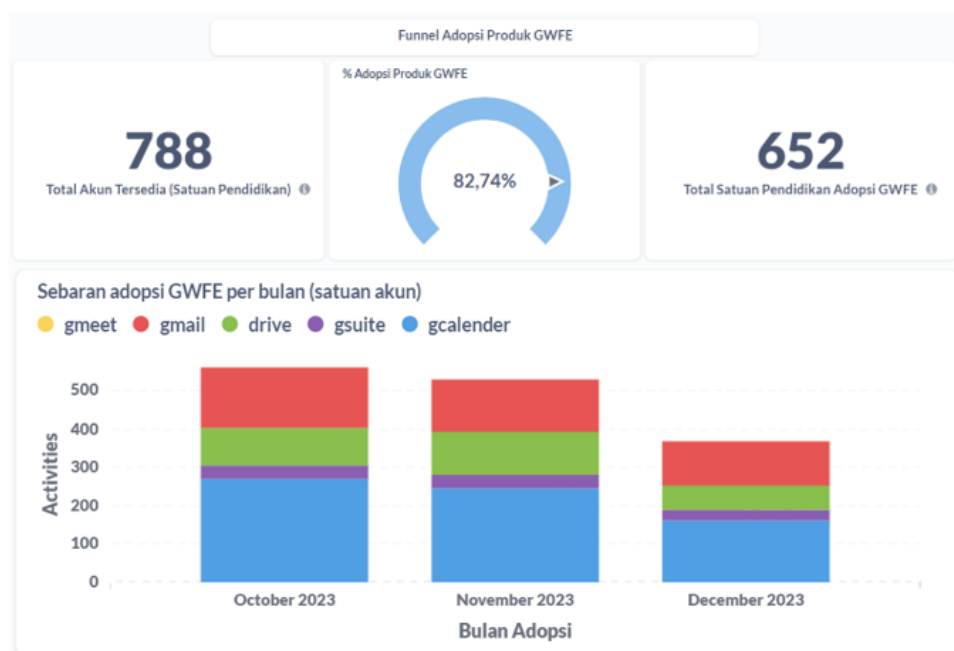
Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024

akun belajar.id yang tersedia di untuk jenjang Dikdas dan Dikmen sebanyak 24.325 akun, yang telah melakukan aktivasi sebanyak 20.148 akun. Aktivasi dari tiap akun yaitu sebanyak 9.669 atau sebesar 97,06% untuk akun PTK guru, untuk jenis akun PTK admin sebanyak 2.134 atau sebesar 95,74% sedangkan untuk peserta didik sebanyak 8.345 akun atau sebesar 68,77%. Adapun aktivasi akun belajar jika dipantau dari masing-masing jenjang adalah sebagai berikut:



Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024

f) Satuan Pendidikan Memanfaatkan Google Workspace for Education



Sumber: Dasbor Aktivasi Akun Pembelajaran pada laman: dapomart.kemdikbud.go.id Per 18 Januari 2024

Dari 788 satuan pendidikan jenjang Dikdas dan Dikmen terdapat 652 satuan pendidikan yang telah mengadopsi Google Workspace for Education dengan persentase sebesar 82,74% yang sudah melewati target dari PDM 03 yaitu sebesar 50%.

4) PDM 04 (Implementasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data)

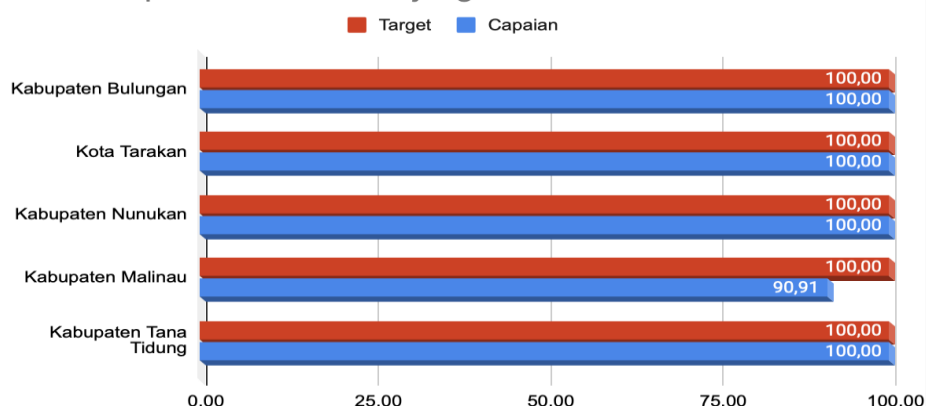
Berikut laporan Implementasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data di Provinsi Kalimantan Utara:

a) Akses Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan

Jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas)

Kemendikbudristek turut melakukan perilsan Rapor Pendidikan Pada jenjang Pendidikan Dasar yang melaksanakan Asesmen Nasional, yang diharapkan seluruh satuan pendidikan dapat mengakses rapor pendidikan dan melakukan Perencanaan Berbasis Data agar kualitas pendidikan lebih terarah dan efektif.

Akses Rapor Pendidikan Jenjang Dikdas

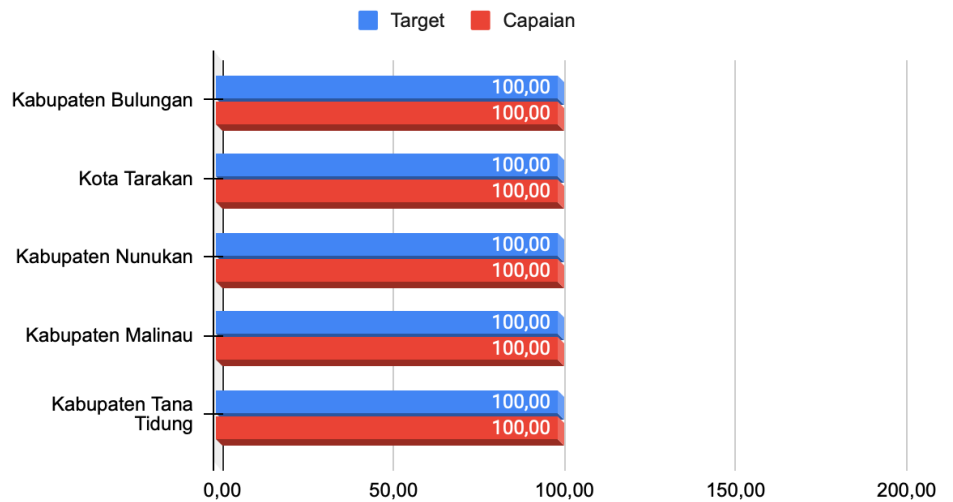


Grafik diatas menunjukkan kesesuaian laju pemenuhan target dengan capaian akses rapor pendidikan seluruh satuan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar di 4 wilayah yang tersebar diantaranya: Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung. Namun tidak demikian dengan Kabupaten Malinau yang capaiannya hanya 90,91% dari persentase target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh satuan pendidikan berada di wilayah yang sulit akses komunikasi dan sulit akses transportasi.

Jenjang Pendidikan Menengah (Dikmen)

Seperti halnya dengan jenjang PAUD, dan Pendidikan Dasar, pada Pendidikan menengah kita juga dapat melihat kondisi satuan pendidikan yang telah mengakses rapor pendidikan.

Akses Rapor Pendidikan Jenjang Dikmen

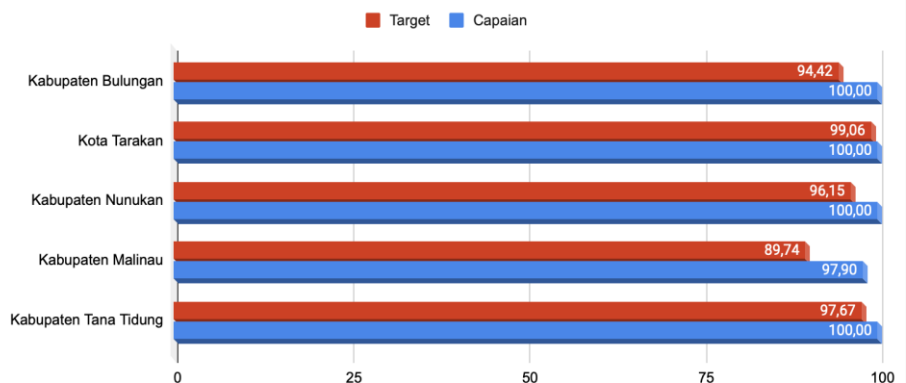


Dalam kurun waktu yang sama dengan jenjang lainnya, diketahui berdasarkan grafik yang ditampilkan bahwa jenjang Dikmen di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan akses rapor pendidikan, target dan capaian yang bergerak lurus beriringan tidak meninggalkan satupun satuan pendidikan jenjang Dikmen yang belum mengakses rapor pendidikan.

b) Implementasi Perencanaan Berbasis Data (PBD) Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar (Dikdas)

Perencanaan Berbasis Data (PBD) memiliki urgensi agar satuan pendidikan dapat melaksanakan program dan pengadaan yang tepat sasaran, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikannya. ditemukan berbagai persoalan teknis yang dialami oleh beberapa satuan pendidikan jenjang Dikdas sehingga belum melakukan implementasi PBD.

Perencanaan Berbasis Data Jenjang Dikdas



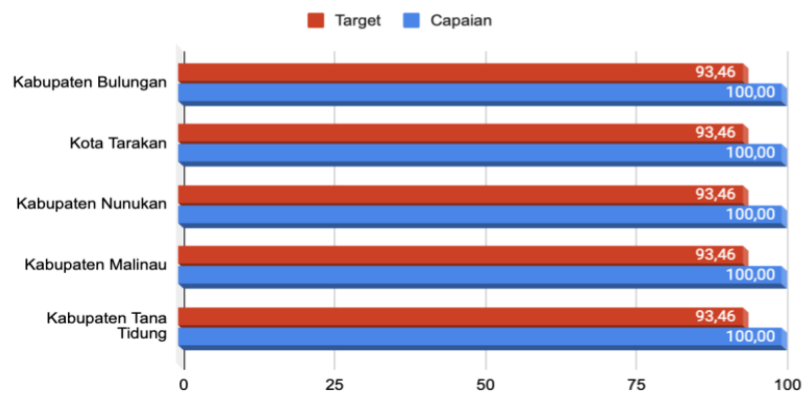
Capaian optimal implementasi PBD pada jenjang Dikdas sebesar 100% secara maksimal dipenuhi oleh 3 Kabupaten dan 1 Kota di

Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Kabupaten Malinau menjadi pengecualian namun angka 97,90 sebagai capaiannya pun melebihi dari target daerah sebesar 89,74%.

Jenjang Pendidikan Menengah (Dikmen)

Perencanaan Berbasis Data (PBD) memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan tidak terkecuali pun bagi satuan pendidikan jenjang Dikmen (Pendidikan Menengah). Melalui PBD satuan Pendidikan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta melakukan penyempurnaan dalam sistem pengelolaan satuan pendidikan dengan lebih efektif, akuntabel, dan konkret.

Perencanaan Berbasis Data Jenjang Dikmen



Grafik yang disajikan menampilkan ketercapaian seluruh satuan pendidikan mengimplementasikan PBD pada jenjang Dikmen di tiap Kab/Kota tanpa terkecuali telah eksesif sebanyak 6,54% dari besaran target 93,46%, atau dapat diartikan seluruh satuan pendidikan di setiap wilayah Provinsi Kalimantan Utara berhasil mengantongi besaran capaian sampai dengan 100%.

c) Rapor Pendidikan Pemerintah Daerah

Rapor Pendidikan Daerah adalah data yang menampilkan indikator dan hasil mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. Untuk mengetahui capaian dari suatu daerah diperlukan adanya perbandingan dengan kabupaten/kota atau provinsi serupa.

Sama seperti Rapor Pendidikan untuk satuan pendidikan, untuk mengakses dan melakukan eksplorasi Rapor Pendidikan daerah ini pengguna perlu login menggunakan Akun belajar.id dengan alamat email berakhiran @dinas.belajar.id.

Kemendagri dan Kemendikbud telah menetapkan Indikator Prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Indikator Prioritas SPM untuk Provinsi

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM Provinsi
1	Kualitas Hasil Belajar	Kompetensi Literasi
		Kompetensi Numerasi
2	Iklim Lingkungan Belajar	Iklim Keamanan
		Iklim Kebinekaan
		Iklim Inklusivitas
3	Kualitas Lulusan SMK	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
		Tingkat Kepuasan Dunia Kerja terhadap Lulusan SMK
4	Akses	Angka Partisipasi Sekolah

Indikator Prioritas SPM untuk Kab/Kota

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM Kab/Kota
1	Kualitas Hasil Belajar	Kompetensi Literasi
		Kompetensi Numerasi
2	Iklim Lingkungan Belajar	Iklim Keamanan
		Iklim Kebinekaan
		Iklim Inklusivitas
3	Kualitas Layanan PAUD	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Min. B
		Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV
4	Akses	Angka Partisipasi Sekolah

Apa itu Standar Pelayanan Minimal? Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah.

Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan mengatur tentang Jenis dan penerima Pelayanan Dasar; Mutu Pelayanan Dasar; pencapaian SPM Pendidikan; dan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 1: Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Pasal 2: SPM Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

Pasal 3: SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip:

- Kesesuaian kewenangan
- Ketersediaan;
- Keterjangkauan;
- Kestinambungan;

- keterukuran; dan
- ketepatan sasaran.

Capaian Indikator yang mempengaruhi Indeks SPM Provinsi Kalimantan Utara

Indikator Prioritas	SMA Umum	SMK Umum	SDLB	SMPLB	SMALB
Kemampuan Literasi	Sedang	Sedang	Capaian Tidak Tersedia	Sedang	Kurang
Kemampuan Numerasi	Sedang	Kurang	Capaian Tidak Tersedia	Sedang	Baik
Iklm Keamanan Satuan Pendidikan	Baik	Baik	Capaian Tidak Tersedia	Baik	Baik
Iklm Kebinekaan	Baik	Baik	Capaian Tidak Tersedia	Baik	Baik
Iklm Inklusivitas	Baik	Baik	Capaian Tidak Tersedia	Baik	Baik
Penyerapan Lulusan SMK		Baik			
Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan		Baik			

Indikator Prioritas	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas
Angka Partisipasi Sekolah	Rendah	Rendah

Berdasarkan tabel Capaian Rapor Pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memiliki Indikator yang sudah baik diantaranya adalah :

- Iklm Keamanan Sekolah SMA, SMK dan SLB
- Iklm Kebinekaan SMA, SMK dan SLB
- Iklm Inklusivitas SMA, SMK dan SLB
- Penyerapan Lulusan SMK
- Kepuasan Dunia Kerja terhadap Lulusan SMK

Namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga masih memiliki Indikator SPM yang belum baik sehingga perlu memprioritaskan anggaran SPM yang difokuskan pada :

- Kemampuan Literasi SMALB, SMPLB, SMA dan SMK
- Kemampuan Numerasi SMK, SMA dan SMPLB
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16- 18 Tahun
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas

Capaian Indikator yang mempengaruhi Indeks SPM Kabupaten Bulungan

Indikator Prioritas	PAUD	SD Umum	SMP Umum
Kemampuan Literasi		Sedang	Sedang
Kemampuan Numerasi		Sedang	Sedang
Iklm Keamanan Satuan Pendidikan		Baik	Baik
Iklm Kebinekaan		Baik	Baik
Iklm Inklusivitas		Baik	Baik
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Kurang		
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Baik		

Indikator Prioritas	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan
Angka Partisipasi Sekolah	Rendah	Tinggi	Rendah

Berdasarkan Tabel Capaian Rapor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah memiliki Indikator SPM yang sudah baik diantaranya adalah :

- Iklm Keamanan Sekolah SD dan SMP
- Iklm Inklusivitas SD dan SMP
- Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
- Angka Partisipasi (APS) 7-15 Tahun

Namun Pemerintah Kabupaten Bulungan juga perlu memprioritaskan anggaran SPM yang difokuskan pada indikator SPM yang belum baik, yaitu :

- Kemampuan Literasi SD dan SMP
- Kemampuan Numerasi SD dan SMP
- Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan

Capaian Indikator yang mempengaruhi Indeks SPM Kota Tarakan

Indikator Prioritas	PAUD	SD Umum	SMP Umum
Kemampuan Literasi		Baik	Baik
Kemampuan Numerasi		Sedang	Sedang
Iklm Keamanan Satuan Pendidikan		Baik	Baik
Iklm Kebinekaan		Baik	Baik
Iklm Inklusivitas		Baik	Baik
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Sedang		
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Baik		

Indikator Prioritas	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan
Angka Partisipasi Sekolah	Rendah	Tinggi	Rendah

Berdasarkan Tabel Capaian Rapor Pendidikan, Pemerintah Kota Tarakan telah memiliki Indikator SPM yang sudah baik, diantaranya adalah :

- Kemampuan Literasi SD dan SMP
- Iklm Keamanan SD dan SMP
- Iklm Kebinekaan SD dan SMP
- Iklm Inklusivitas SD dan SMP
- Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun

Namun Pemerintah Kota Tarakan masih perlu memprioritaskan anggaran SPM yang difokuskan pada Indikator SPM yang belum baik, yaitu :

- Kemampuan Numerasi SD dan SMP
- Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan

Capaian Indikator yang mempengaruhi Indeks SPM Kabupaten Nunukan

Indikator Prioritas	PAUD	SD Umum	SMP Umum
Kemampuan Literasi		Sedang	Sedang
Kemampuan Numerasi		Kurang	Kurang
Iklim Keamanan Satuan Pendidikan		Baik	Baik
Iklim Kebinekaan		Baik	Baik
Iklim Inklusivitas		Baik	Sedang
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Kurang		
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Sedang		
Indikator Prioritas	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan
Angka Partisipasi Sekolah	Rendah	Tinggi	Rendah

Berdasarkan tabel capaian Rapor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah memiliki Indikator SPM yang sudah baik, diantaranya adalah :

- Iklim Keamanan SD dan SMP
- Iklim Kebinekaan SD dan SMP
- Iklim Inklusivitas SD
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun

Namun Pemerintah Kabupaten Nunukan masih perlu untuk memprioritaskan anggaran SPM yang difokuskan pada Indikator SPM yang belum baik, yaitu :

- Kemampuan Literasi SD dan SMP
- Kemampuan Numerasi SD dan SMP
- Iklim Inklusivitas SMP
- Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
- Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan

Capaian Indikator yang mempengaruhi Indeks SPM Kabupaten Malinau

Indikator Prioritas	PAUD	SD Umum	SMP Umum
Kemampuan Literasi		Sedang	Sedang
Kemampuan Numerasi		Kurang	Kurang
Iklm Keamanan Satuan Pendidikan		Baik	Baik
Iklm Kebinekaan		Baik	Baik
Iklm Inklusivitas		Sedang	Sedang
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Kurang		
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Sedang		

Indikator Prioritas	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan
Angka Partisipasi Sekolah	Rendah	Tinggi	Rendah

Berdasarkan Tabel Capaian Rapor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Malinau telah memiliki Indikator SPM yang telah baik, diantaranya adalah :

- Iklm Keamanan SD dan SMP
- Iklm Kebinekaan SD dan SMP
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun

Namun Pemerintah Kabupaten Malinau sangat perlu untuk memprioritaskan anggaran SPM yang difokuskan pada Indikator SPM yang belum baik, yaitu:

- Kemampuan Literasi SD dan SMP
- Kemampuan Numerasi SD dan SMP
- Iklm Inklusivitas SD dan SMP
- Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
- Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan

Capaian Indikator yang mempengaruhi Indeks SPM Kabupaten Tana Tidung

Indikator Prioritas	PAUD	SD Umum	SMP Umum
Kemampuan Literasi		Sedang	Baik
Kemampuan Numerasi		Sedang	Sedang
Iklm Keamanan Satuan Pendidikan		Baik	Baik
Iklm Kebinekaan		Baik	Baik
Iklm Inklusivitas		Baik	Baik
Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Sedang		
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Sedang		

Indikator Prioritas	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan
Angka Partisipasi Sekolah	Rendah	Tinggi	Rendah

Berdasarkan Tabel Capaian Rapor Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah memiliki Indikator SPM yang sudah baik, diantaranya adalah :

- Kemampuan Literasi SMP
- Iklm Keamanan SD dan SMP
- Iklm Inklusivitas SD dan SMP
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun

Namun Pemerintah Kabupaten Tana Tidung masih perlu memprioritaskan anggaran SPM yang difokuskan pada Indikator SPM yang belum baik, yaitu :

- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun
- Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun Kesetaraan
- Kemampuan Literasi SD
- Kemampuan Numerasi SD dan sMP
- Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
- Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4

5) PDM 05 (Kemitraan Daerah)

Kebijakan Merdeka Belajar merupakan kebijakan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Sampai dengan bulan Desember 2023 sudah ada 26 episode kebijakan Merdeka belajar yang telah diluncurkan. BPMP Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merupakan kepanjangan tangan pusat dalam meneruskan kebijakan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut, BPMP Provinsi Kalimantan Utara menjalin kemitraan dengan beberapa stakeholder di daerah diantaranya yang paling utama yakni dengan Dinas Pendidikan baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Di wilayah Provinsi Kalimantan Utara terdapat satu Dinas Pendidikan Provinsi, 4 Dinas Pendidikan Kabupaten dan satu Dinas Pendidikan Kota. Untuk mengawal tersampainya kebijakan pusat terkait Pendidikan maka BPMP provinsi Kalimantan Utara perlu melakukan advokasi ke Daerah. Advokasi ini menjadi salah satu peran dari PDM 05 – Kemitraan Daerah untuk mengawal tersampainya dan terlaksananya program pemerintah.

Capaian PDM 05

Capaian atau Objektif PDM-05 tahun 2023 antara lain:

- a) Persepsi PEMDA terhadap Dampak Positif Kebijakan Merdeka Belajar meningkat minimal positif 90% melalui advokasi UPT.

Adapun capaian tersebut di dapat dari hasil pengisian Dasbor UPT dengan melampirkan bukti pendukung yang diperoleh dari kegiatan Advokasi kepada Pemda. Hasil pengisian Dasbor UPT untuk semester 2 belum diolah oleh pusat sehingga hasil akhirnya belum dapat diketahui, untuk itu pada capaian ini akan ditampilkan hasil pengisian Dasbor UPT pada semester 1 sebagai berikut.

NO	WILAYAH	PSP	IKM	PGP	AN	PBD	DIKSUS	RATA-RATA
1	PROVINSI	50%	0%	50%	0%	75%	0%	29%
2	BULUNGAN	75%	50%	50%	50%	100%	0%	54%
3	MALINAU	50%	50%	50%	50%	75%	0%	46%
4	NUNUKAN	100%	50%	50%	50%	75%	0%	54%
5	KTT	75%	75%	50%	50%	75%	50%	63%
6	TARAKAN	50%	75%	50%	50%	75%	50%	58%

- b) Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah meningkat sebesar 80 - 100% melalui advokasi UPT kepada PEMDA. Pada tahun 2023 capaian Guru Penggerak yang diangkat menjadi Kepala Sekolah berdasarkan data Dasbor GTK sebagai berikut:

NO	WILAYAH	PERSENTASE
1	PROVINSI	75%
2	BULUNGAN	42,86%
3	MALINAU	0%
4	NUNUKAN	28,57%
5	KTT	100%
6	TARAKAN	100%

- c) Peningkatan capaian delta AN sebesar 30% melalui advokasi UPT kepada PEMDA (peningkatan skor AN untuk 30% satpen di Indonesia). Untuk capaian ini masih belum dapat diukur delta peningkatannya karena hasil AN tahun 2023 belum keluar.

Program dan Kegiatan Pendukung PDM 05

Untuk mendukung kegiatan Kemitraan Daerah, ada beberapa program atau kegiatan pendukung yang dilaksanakan, antara lain :

- a) Internalisasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB)

Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan di internal BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Kegiatannya yakni pendalaman materi KMB yang dipaparkan oleh masing-masing PIC PDM. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan penguatan kepada pegawai BPMP Provinsi Kalimantan Utara terkait Kebijakan Merdeka Belajar dalam rangka advokasi kepada Pemerintah Daerah.



- b) Berbagi Cerita Baik antar UPT

Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dan ada 5 tahap. Dalam kegiatan ini BPMP Provinsi Kalimantan Utara mengundang narasumber dari Dinas Pendidikan dan Sekolah yang memiliki praktik baik untuk ditularkan kepada Dinas atau Satuan Pendidikan lain. Kegiatan dilaksanakan secara daring. Peserta adalah semua Dinas Pendidikan dan satuan Pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Setiap episode memiliki tema berbeda dengan narasumber 2 sampai 3 orang. Dalam kegiatan berbagi cerita ini

akan ada diskusi antara narasumber dengan peserta setelah narasumber bercerita praktik baik yang telah dilaksanakan, tujuannya adalah saling memberi saran dan solusi terkait permasalahan yang kemungkinan dihadapi oleh peserta sehingga praktik baik narasumber dapat dijadikan suatu acuan yang nantinya dapat di tiru dan dimofidikasi.



6) PDM 06 (Asesmen Nasional)

Asesmen Nasional (AN) sebagai salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, bertujuan untuk mengukur hasil belajar kognitif, hasil belajar nonkognitif, dan kualitas lingkungan belajar pada

satuan pendidikan. Asesmen Nasional tidak bertujuan untuk mengukur hasil belajar individu peserta didik dan tidak untuk pemeringkatan antar satuan pendidikan/daerah. Instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek pada asesmen Nasional yaitu Instrumen Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Instrumen Survei Karakter, dan Instrumen Survei Lingkungan Belajar (Sulingjar)

Capaian PDM

Obective PDM 06 pada Tahun 2023 yaitu:

- Meningkatkan persepsi positif Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulingjar 30%
- Meningkatkan delta rata – rata 2% partisipasi AN dan Sulingjar Tahun 2023.

Capaian PDM 06 pada Tahun 2023 yaitu:

- Meningkatkan persepsi positif Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulingjar 30%. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengukur tingkat persepsi stakeholders daerah dan satuan pendidikan terhadap urgensi kebijakan pelaksanaan AN, dan untuk mengetahui keberagaman dan kedalaman kualitas persepsi stakeholders daerah dan satuan pendidikan terhadap urgensi kebijakan pelaksanaan AN.

Survei persepsi yang melibatkan unsur dari Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan yaitu dari Kepala Bidang, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Pendidik dan Peserta Didik. Survei ini dilakukan secara 2 tahap, namun untuk saat ini hasil survei yang sudah dipublikasikan adalah survei pada tahap 1 yaitu sebagai berikut:

Indeks Persepsi Dinas Pendidikan	Indeks Persepsi Satuan Pendidikan
82,13	85,26

Sumber: berdasarkan hasil survei persepsi positif stakeholder daerah dan satuan pendidikan terhadap AN oleh Tim PDM 06 Pusat

- b) Meningkatkan delta rata – rata 2% partisipasi AN dan Sulingjar Tahun 2023. Perhitungan peningkatan delta berdasarkan data website anbk.kemdikbud.go.id dan website dashboardslb.kemdikbud.go.id sehingga kita dapat mengetahui delta peningkatan partisipasinya. Dari data rekapitulasi terkait partisipasi AN sudah dapat terpenuhi karena partisipasi mengalami peningkatan dengan delta rata-rata sebesar 2%, namun untuk partisipasi Sulingjar masih belum terpenuhi karena adanya beberapa faktor seperti pelaksanaan Sulingjar tahun 2023 ini baru melibatkan seluruh satuan PAUD yang pada tahun sebelumnya hanya dilaksanakan pada satuan PAUD yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak. Detail untuk capaian partisipasi AN dan Sulingjar dapat dilihat pada tabel berikut:

Rekapitulasi Partisipasi Asesmen Nasional

Asesmen Nasional	2022			2023		
	Jumlah Satuan	Jumlah yang melaksanakan AN	Persentase	Jumlah Satuan	Jumlah yang melaksanakan AN	Persentase
Provinsi	107	103	96.26%	113	112	99.12%
Bulungan	223	217	97.31%	215	215	100.00%
Tarakan	108	106	98.15%	124	124	100.00%
Nunukan	213	203	95.31%	218	215	98.62%
Malinau	160	153	95.63%	159	153	96.23%
Tana Tidung	44	44	100.00%	45	45	100.00%
Jumlah	855	826	96.61%	874	864	98.86%

Sumber: berdasarkan anbk.kemdikbud.go.id

Rekapitulasi Partisipasi Survei Lingkungan Belajar

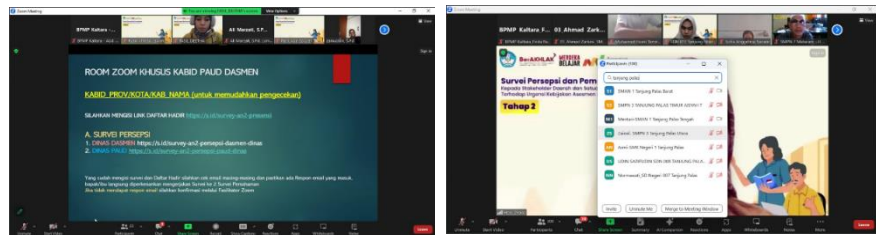
Survei Lingkungan Belajar	2022			2023		
	Jumlah Satuan	Jumlah yang melaksanakan Sulingjar	Persentase	Jumlah Satuan	Jumlah yang melaksanakan Sulingjar	Persentase
Provinsi	103	102	99.03%	111	109	98.20%
Bulungan	218	218	100.00%	383	357	93.21%
Tarakan	107	100	93.46%	215	213	99.07%

Nunukan	208	194	93.27%	387	384	99.22%
Malinau	152	148	97.37%	281	212	75.44%
Tana Tidung	44	44	100.00%	89	88	98.88%
Jumlah	832	806	96.88%	1466	1363	92.97%

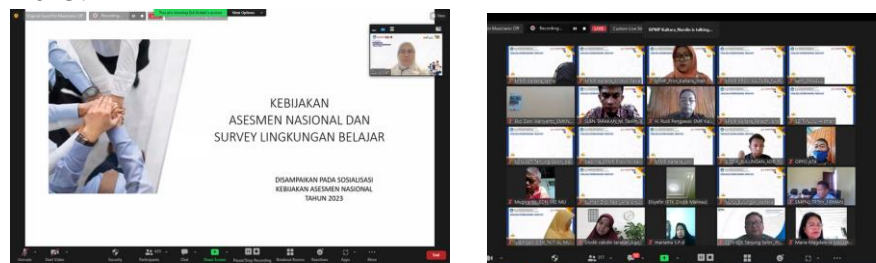
Sumber: berdasarkan dashboardslb.kemdikbud.go.id

Program dan Kegiatan Pendukung PDM 06

- a) Pelaksanaan Survei Persepsi dan Pemahaman Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap Urgensi Kebijakan Asesmen Nasional. Survei ini dikordinir oleh Tim PDM 06 Pusat, kegiatan ini dilaksanakan secara 2 tahap, tahap pertama dimulai pada bulan April dilakukan dengan memberikan informasi kepada sasaran responden untuk mengisi tautan survei, dan tahap kedua dilaksanakan pada bulan Oktober dengan cara mengumpulkan responden secara daring melalui zoom meeting dan didampingi oleh Tim PDM 06 Pusat dan Tim PDM 06 UPT.



- b) Koordinasi Persiapan Sosialisasi Pelaksanaan Asesmen Nasional 2023 bagi Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis tanggal 22 Juni 2023 secara daring dengan menghadirkan Narasumber dari Pusmendik dan Pusdatin Kemendikbudristek. Peserta kegiatan ini adalah seluruh stakeholder Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan informasi terkait Kebijakan Asesmen Nasional dan Survei Lingkungan Belajar tahun 2023.



- c) Fasilitasi Proses Verifikasi dan Validasi Data Sarana Prasarana / TIK. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Juni 2023 dengan melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan dan beberapa perwakilan Satuan Pendidikan untuk meverifikasi dan memvalidasi data sarana prasarana / TIK yang ada di Satuan Pendidikan dalam melakukan persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional.



- d) Fasilitasi Proses Verifikasi dan Validasi Data Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan dan beberapa perwakilan Satuan Pendidikan pada tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2023. Tujuan kegiatan ini untuk memastikan satuan pendidikan telah melakukan update data terbaru terkait kesiapan Satuan Pendidikan dalam rangka melaksanakan Asesmen Nasional.



- e) Monitoring Pelaksanaan Asesmen Nasional pada jenjang SMA, SMK, SLB, SMP, dan SD. Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap jenjang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Asesmen Nasional yang dimulai dari tanggal 28 s.d. 30 Agustus 2023 untuk jenjang SMA/SMK/Sederajat, tanggal 18 s.d. 20 September 2023 untuk jenjang SMP/Sederajat, dan pelaksanaan jenjang SD/Sederajat dengan rentang tanggal 23 s.d. 27 Oktober 2023. Monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional ini dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang tahapan pelaksanaan Asesmen Nasional apakah telah sesuai dengan POS Penyelenggaraan Asesmen Nasional, memastikan pelaksanaan Asesmen Nasional di sekolah berjalan lancar dan sesuai dengan POS penyelenggaraan Asesmen Nasional yang telah ditentukan, mengumpulkan data riil peserta dan sekolah penyelenggara yang mengikuti Asesmen Nasional, dan memetakan isu-isu terkini terkait pelaksanaan Asesmen Nasional di daerah.





7) PDM 09 (Transisi PAUD SD)

Capaian PDM

10% Satuan Pendidikan (SD) mengerjakan aksi nyata penguatan pembelajaran pada awal tahun ajaran baru dan sepanjang tahun ajaran baru.

Mulai Belajar			
Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan	Mulai Belajar	Presentase
PAUD	629	103	16.38%
SD	485	248	51.13%

Akses Modul Pembelajaran (Lulus Posttest)			
Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan	Akses Modul (Lulus Posttest)	Presentase
PAUD	629	88	13.99%
SD	485	209	43.09%

Unggah Aksi Nyata			
Jenjang	Jumlah Satuan Pendidikan	Submit Aksi Nyata	Presentase
PAUD	629	49	7.79%
SD	485	144	29.69%

Tanggal Pemutakhiran Data Terakhir
Jan 19, 2024

Berdasarkan data di atas, terdapat 485 Satuan Pendidikan Jenjang SD di Provinsi Kalimantan Utara yang tersebar pada 5 (lima) Kabupaten/ Kota. Terdapat 43,09% Satuan PAUD telah melakukan akses modul pembelajaran, dan terdapat 29,69% Satuan SD yang telah melakukan unggah aksi nyata.

8) PDM 10 (Pemulihan Pembelajaran)

Capaian PDM

- 20% SD level 1 nilai hasil AN 2021 meningkat 0,2 pada capaian literasi dan numerasi berdasarkan hasil AN 2023

- b) 20% SD level 2 nilai hasil AN 2021 meningkat 0,2 pada capaian literasi dan numerasi berdasarkan hasil AN 2023

Program dan Kegiatan Pendukung

Kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan Intervensi yang dilakukan oleh PDM 10 BPMP Provinsi Kalimantan Utara untuk Peningkatan literasi yang hasilnya akan terlihat pada hasil AN 2023 yang tergambarkan dalam Rapor Pendidikan 2024, untuk mendukung ketercapaian tersebut BPMP Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan beberapa Program diantaranya :

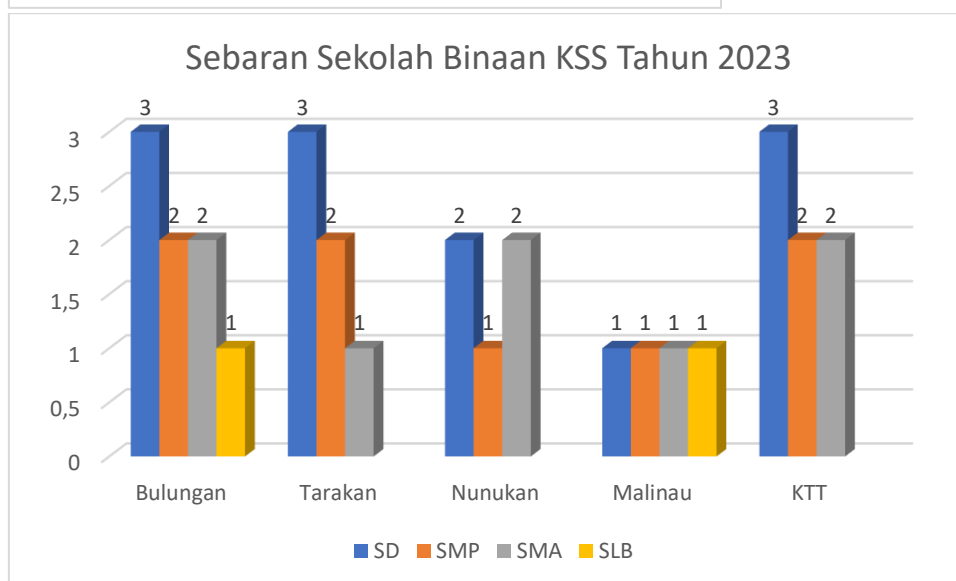
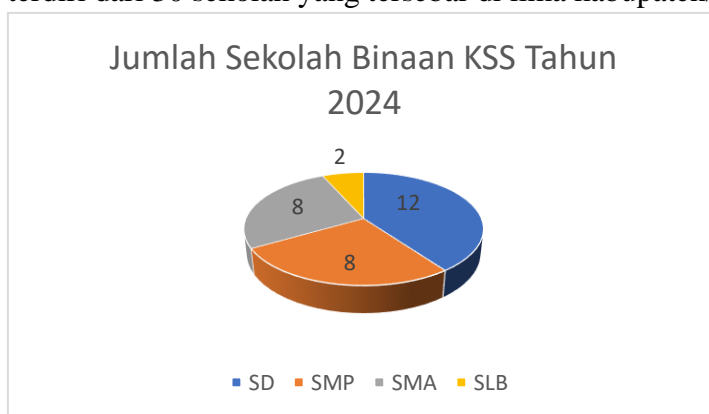
- a) Bimbingan Teknis kepada Sekolah sasaran PDM 10 yang memiliki nilai literasi berada pada kategori 1. Dalam kegiatan ini 100% persen sekolah sasaran telah mengikuti kegiatan yang terdiri dari 3 Tahap secara luring dan 1 Tahap secara daring
- b) Pendampingan Komunitas Belajar untuk peningkatan literasi. 27% Sekolah Sasaran PDM 10 mengikuti kegiatan yang dilaksanakan secara luring di Kabupaten/kota masing – masing.
- c) Refleksi Intervensi Pemulihan Pembelajaran untuk peningkatan literasi yang dilaksanakan 2 Tahap
- d) FGD Pemanfaatan Buku Bacaan Bermutu



9) PDM 11 (Implementasi Kampanye Sekolah Sehat)

Kampanye sekolah sehat merupakan program yang lahir dilandasi karena adanya COVID 19, permasalahan kesehatan pada peserta didik (obesitas, gangguan organ tubuh, dll), PHBS yang belum membudaya, permasalahan imunisasi, dan trias UKS yang masih berstatus strata rendah. Kegiatan kampanye sekolah sehat berfokus pada 3 Sehat, yakni Sehat Gizi, Sehat Jasmani, dan Sehat Imunisasi. Dalam implementasi 3 sehat, sekolah dapat melakukan langkah-langkah sederhana yang akan menjadi pembiasaan bagi peserta didik itu sendiri.

Berdasarkan arahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam Implementasi Kampanye Sekolah Sehat, BPMP Provinsi Kalimantan Utara memiliki sekolah binaan dengan jumlah 40 sekolah. 40 sekolah tersebut terdiri dari berbagai jenjang, jenjang PAUD dan Kesetaraan terdiri dari 10 Sekolah dan Jenjang Dikdas dan Dikmen terdiri dari 30 sekolah yang tersebar di lima kabupaten/Kota.



Capaian PDM

Terdapat 3 objective/capaian yang terdapat di PDM 11 BPMP Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

- a) 75% Pemba menerbitkan SE tentang kebijakan implementasi sekolah sehat
- b) 40% satuan pendidikan meningkat kategori status kesehatannya dari merah menjadi kuning di tahun 2024
- c) 75% satuan pendidikan binaan mengimplementasikan program gerakan sekolah sehat dan terpetakan kesehatan peserta didiknya.

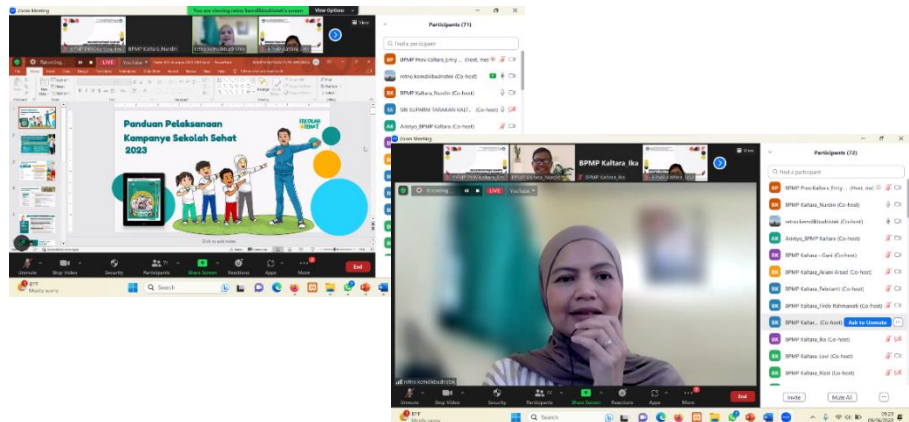
Berikut hasil capaian PDM 11 Gerakan Sekolah Sehat Tahun 2023

- a) 100% Pemda menerbitkan SE tentang kebijakan implementasi sekolah sehat (Disdik Provinsi Kalimantan Utara, Disdik Bulungan, Disdik Tarakan, Disdik Nunukan, Disdik Malinau, dan Disdik KTT)
- b) Secara keseluruhan, terdapat peningkatan status kesehatan, baik yang kuning ke hijau atau yang belum mengisi (abu-abu) ke hijau
- c) Implementasi program gerakan sekolah sehat telah diimplementasikan oleh seluruh sekolah binaan (100%).

Program dan Kegiatan Pendukung PDM 11

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh PDM 11 BPMP Provinsi Kalimantan Utara dalam upaya untuk mendukung tercapainya objective/capaian, yaitu:

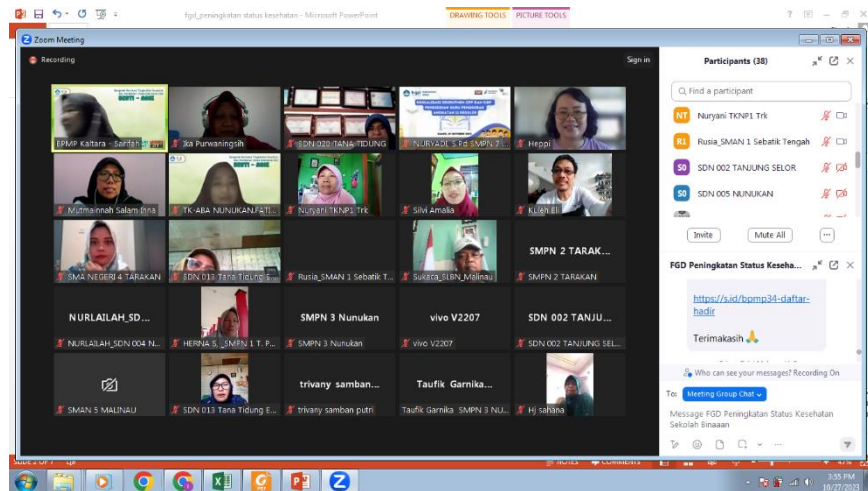
- e) Advokasi, Rapat Koordinasi, dan Sosialisasi Program Sekolah Sehat Kepada Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 8 Juni 2023 secara daring dengan mengundang perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, Sekolah Binaan, perwakilan Tim Penggerak UKS Provinsi Kalimantan Utara dengan Narasumber PIC PDM 11 Kemendikbud dr. Retno Wulandari.



- f) Kegiatan Pendampingan Program Gerakan Sekolah Sehat Goes to School yang diadakan secara luring di Tarakan pada 23 – 25 Agustus dengan peserta dari perwakilan sekolah, sekolah binaan GSS Tahun 2023 dan perwakilan dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dengan nara sumber berasal dari HIMPSI dan PERSAGI Provinsi Kalimantan Utara



- g) FGD Peningkatan Status Kesehatan Sekolah Binaan yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2023 secara luring dengan peserta seluruh sekolah Binaan GSS Tahun 2023



- h) Komunikasi dan Koordinasi melalui WA Group GSS Kaltara 2023 dengan seluruh Sekolah Binaan.

10) PDM 12 (Transformasi Pendidikan Khusus)

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Pendidikan secara khusus adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus (UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).

Sedangkan Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang mencakup semua peserta didik, dan menyambut serta mendukung mereka untuk belajar, siapa pun mereka dan apa pun kemampuan atau persyaratan mereka. Ini berarti memastikan bahwa pengajaran dan kurikulum, gedung sekolah, ruang kelas, area bermain, transportasi, dan toilet sesuai untuk semua anak di semua tingkatan. Pendidikan inklusif

berarti semua peserta didik belajar bersama di sekolah dan kelas yang sama (UNICEF 2017).

Capaian PDM

Capaian atau Objektif PDM-12 pada tahun 2023 yaitu Peningkatan skor sebesar 0,2 untuk 30% satuan Pendidikan umum dan kejuruan yang memiliki iklim inklusivitas merintis.

Berikut hasil capaian objektif PDM-12 pada tahun 2023 disajikan dalam bentuk data dibawah ini :

Hasil Capaian Peningkatan Skor Iklim Inklusivitas Pendidikan Umum Dan Kejuruan Jenjang Dikdas Dikmen

No	Jenjang	Jumlah Satdik	Jumlah Satdik Skor \geq 0,2	Persentase Satdik Skor \geq 0,2	Jumlah Satpen Skor \leq 0,2	Tidak Mengikuti AN	Target Peningkatan Skor Iklim Inklusivitas	Skor Indikator Iklim Inklusivitas		
								2022	Peningkatan Skor Iklim Inklusivitas	2023
1	SD	485	404	83,30%	3	78	0,2	52,04	3,10	55,14
2	SMP	193	151	78,24%	7	35	0,2	53,06	1,95	55,01
3	SMA	68	56	82,35%	0	12	0,2	53,59	2,63	56,22
4	SMK	33	26	78,79%	1	6	0,2	52,58	3,23	55,81

Sumber: Hasil Rapor Pendidikan Tahun 2023

No	Kab/Kota	Target Peningkatan Skor Iklim Inklusivitas	Peningkatan Skor Iklim Inklusivitas	
			SD	SMP
1	Bulungan	0,2	3,72	2,11
2	Tarakan	0,2	2,53	1,35
3	Malinau	0,2	1,75	1,25
4	Nunukan	0,2	3,73	2,56
5	Tana Tidung	0,2	3,04	3,57

Sumber: Hasil Rapor Pendidikan Tahun 2023

Program dan Kegiatan Pendukung

Pada tanggal 25 s.d. 27 September 2023 BPMP Provinsi Kalimantan Utara mengadakan kegiatan Pendampingan Dan Advokasi Terkait Komitmen Pemda Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kota Tarakan dengan mengundang perwakilan Dinas Pendidikan, perwakilan Pengawas Sekolah, dan

perwakilan Sekolah dengan menghadirkan Narasumber dari PDM-12 Kemdikbudristek dan juga Perwakilan Guru Pendamping Khusus wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

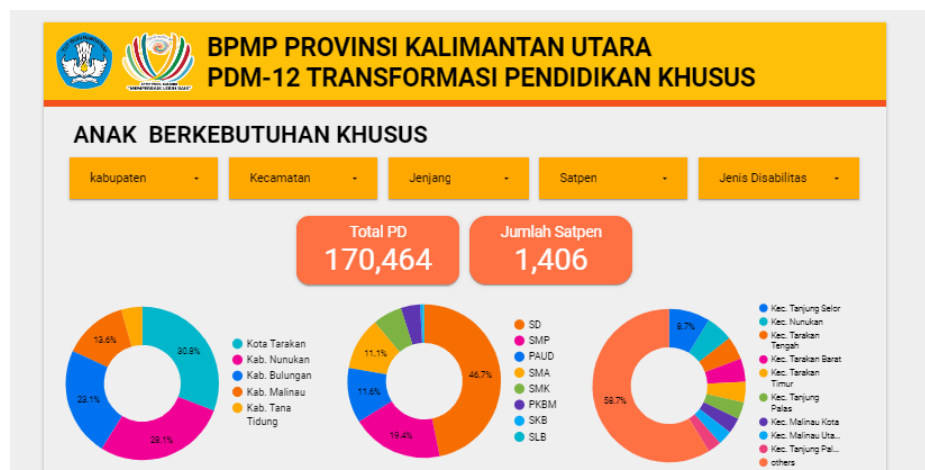


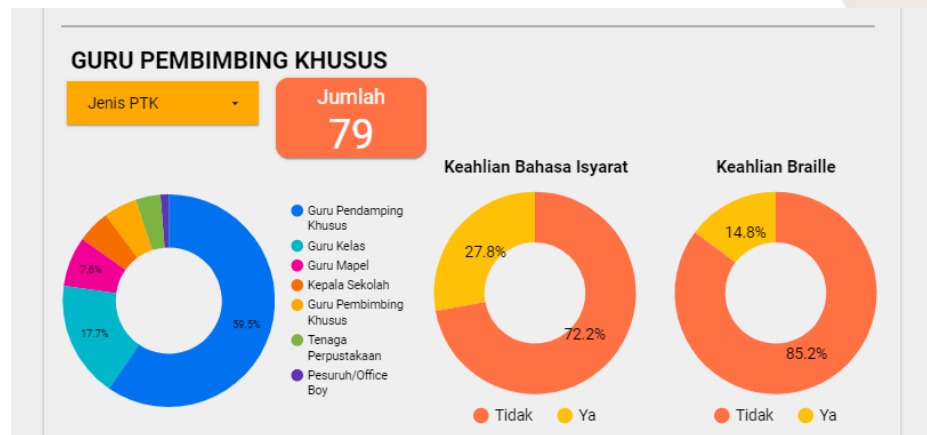
Program Inovasi

Dasbor PDM-12 Transformasi Pendidikan Khusus

Dashboard PDM-12 Transformasi Pendidikan Khusus tergabung di dalam Dashbor yang bernama SIKOMIKA (Sistem Komunitas Belajar dan Akun Pembelajaran) yang merupakan inovasi dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Dalam SIKOMIKA terdapat beberapa menu data diantaranya terkait Komunitas Belajar, IKM dan PMM, Tata Kelola Satuan Pendidikan yang termasuk didalamnya tentang PDM-03, PDM-09 dan PDM-12. Di dalam dashboard PDM-12 menyajikan data anak berkebutuhan khusus yang terdata di sekolah umum dan sekolah kejuruan di Provinsi Kalimantan Utara. Aktivitas yang dapat dipantau melalui dashboard ini adalah diantaranya:

- a) Jumlah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- b) Jumlah Guru Pembimbing Khusus se-Provinsi Kalimantan Utara.





👉 Hambatan atau Permasalahan IKK 1.2

- 1) Dalam mengejar capaian PDM 01 yang sudah diberikan, terdapat beberapa tantangan yang membuat proses pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dan melakukan analisis menjadi tertunda dan baru didapatkan di akhir tahun 2023. Kendala yang paling terasa adalah dalam pemenuhan target objektif 1 sampai dengan 3. Angka yang dibutuhkan UPT berdasarkan hasil perhitungan dari rapor pendidikan dimensi A, D dan E tidak memiliki kejelasan mengenai cara perhitungan, rumus maupun siapa yang melakukan analisis perhitungan, apakah UPT atau menerima data jadi dari pusat. Baru di akhir bulan November, disepakati dalam pertemuan bahwa, data yang dilihat dengan melihat persentase kenaikan dimensi A, D dan E saja, tanpa perlu perhitungan melalui rumus, dan yang melakukan hal tersebut adalah UPT;
- 2) Masih banyaknya satuan pendidikan yang berada pada daerah remote area sehingga kesulitan mengakses PMM;
- 3) Kesulitan dalam mengakses PMM karena akun belajar.id;
- 4) Belum menganggap PMM sebagai salah satu sumber belajar dalam IKM;
- 5) Pemahaman tentang komunitas belajar intrasekolah masih rendah;
- 6) Rendahnya penggunaan SIPLah dikarenakan satuan pendidikan berada pada area blank spot atau jaringan yang tidak stabil, harga yang relative lebih mahal termasuk ongkos kirim, dan penyedia yang masih kurang;
- 7) Pemanfaatan chromebook belum 100% disebabkan satuan pendidikan fokus hanya untuk ANBK, masih banyak guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik belum memahami penggunaan chromebook, dan takut rusak;
- 8) Rendahnya aktivasi akun belajar peserta didik disebabkan peserta didik belum mempunyai gawai/android dan satuan pendidikan atau tempat tinggal yang berada di area tanpa jaringan;

- 9) Dalam memenuhi capaian Persepsi PEMDA terhadap Dampak Positif Kebijakan Merdeka Belajar meningkat minimal positif 90% melalui advokasi UPT. Hambatan atau permasalahan pada capaian semester 1 tahun 2023 terletak pada Advokasi BPMP ke Pemda yang masih belum merata karena masih di awal tahun dan kegiatan belum berjalan banyak. Sehingga capaian masih rendah karena Pemda belum mendapat Advokasi secara merata terkait enam program Prioritas Kemdikbudristek yakni PSP, IKM, PBD, AN, GP dan Dikusus.
- 10) Capaian pada Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah meningkat sebesar 80 - 100% melalui advokasi UPT kepada PEMDA juga belum dapat terpenuhi karena beberapa kendala diantaranya masih ada beberapa daerah yang belum memiliki Guru Penggerak dan kebutuhan Kepala Sekolah yang tidak banyak sehingga tidak semua Guru Penggerak dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah;
- 11) Peningkatan capaian delta AN sebesar 30% melalui advokasi UPT kepada PEMDA juga belum dapat terpenuhi karena hasil AN tahun 2023 belum ada, sehingga belum dapat mengidentifikasi peningkatan capaian delta AN nya;
- 12) Hasil survei persepsi positif Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulingjar ini dilaksanakan 2 tahap dan dikoordinir oleh tim PDM 06 pusat, untuk hasil survei dari tahap 1 sudah dipublikasikan, namun untuk saat ini hasil survei tahap 2 masih sedang proses rencana publikasi. Sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan untuk mengetahui hasil capaian nomor 1 PDM 06;
- 13) Masih terdapat Sekolah yang tidak memanfaatkan buku bacaan bermutu yang didapatkan secara maksimal;
- 14) Beberapa Guru atau Kepala Sekolah yang menerima pelatihan peningkatan literasi tidak membagikan ilmu melalui Komunitas belajar ke Guru – Guru lain di Sekolah;
- 15) Banyak Sekolah penerima buku yang mengeluhkan buku yang telah didapatkan habis terbawa banjir;
- 16) Terdapat sekolah yang tidak mengisi asesmen awal tetapi mengisi asesmen akhir, sehingga sulit untuk membandingkan hasil asesmen (terdapat gap antara awal dan akhir);
- 17) Pemda di wilayah Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD); dan
- 18) Belum tersedianya data anak berkebutuhan khusus di satuan Pendidikan umum dan kejuruan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Langkah Antisipasi

- 1) Ketika belum mendapatkan kepastian dan formulasi mengenai cara pencapaian objektif 1 sampai dengan 3, tim PDM 01 berinisiatif mengumpulkan nilai rapor pendidikan sekolah penggerak dan melakukan analisis secara internal untuk melihat delta dari indikator-indikator yang menjadi prioritas. Hal ini sangat membantu, karena data hasil analisis tersebut terpakai untuk melihat ketercapaian objektif 1 sampai dengan 3;
- 2) Menggerakkan komunitas belajar dalam sekolah yang sudah terbentuk dalam meningkatkan pemahaman terkait pemanfaatan PMM;
- 3) Koordinasi ke pemerintah daerah terkait Pemanfaatan PMM oleh sekolah pelaksana IKM melalui PMO level pemerintah daerah.
- 4) Koordinasi dengan kapten dan co kapten untuk permasalahan akun belajar.id;
- 5) Koordinasi dengan penggerak komunitas belajar disetiap kabupaten/kota untuk mensosialisasikan ke sekolah di sekitarnya tentang peran penting komunitas belajar sebagai wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik;
- 6) Menghimbau pemerintah daerah untuk mendorong UMKM menjadi mitra pada aplikasi SIPLah;
- 7) Mengadvokasi satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan chromebook terutama dalam pembelajaran;
- 8) Mendorong satuan pendidikan untuk menyediakan perangkat untuk dipakai bersama oleh peserta didik dalam rangka mengaktifkan akun belajar.id;
- 9) Melakukan strategi pendekatan dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan agar dipermudah dalam menggali jawaban dan mengumpulkan dokumen pendukung saat pengisian Dasbor UPT;
- 10) Berkoordinasi dengan Balai Guru Penggerak dan Operator Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah di Dinas Pendidikan dalam rangka pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah;
- 11) Berkoordinasi dengan PDM 06 terkait progress pengolahan hasil AN tahun 2023;
- 12) Melakukan koordinasi dengan Tim PDM 06 Pusat tentang hasil capaian survei persepsi positif Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap urgensi Kebijakan Pelaksanaan AN dan Sulingjar;
- 13) Mendorong sekolah untuk melaksanakan aksi nyata setelah bimtek dengan mengupload bukti kegiatan pada link https://s.id/_AKSinyata_Penguatanliterasi yang telah disediakan oleh Tim PDM 10. Bagi Peserta yang telah melaksanakan aksi nyata akan mendapatkan sertifikat;

- 14) Mendorong Pengaktifan komunitas belajar seperti KKG untuk peningkatan literasi; dan
- 15) Melakukan pendataan sekolah yang mendapatkan musibah banjir dan kerugian yang dialami.

☞ Strategi yang akan dilakukan

- 1) Strategi dalam mengantisipasi masalah-masalah dalam pemenuhan target PDM adalah, rutin berkoordinasi dengan PIC PDM 01 pusat terkait capaian, formulasi, cara perhitungan dan permasalahan yang ada. Selanjutnya rutin melakukan koordinasi dengan BGP, Dinas Pendidikan dan Konsultan BPMP;
- 2) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan dalam rangka pemanfaatan PMM;
- 3) Melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada pemerintah daerah maupun langsung ke satuan pendidikan melalui komunitas belajar secara daring dan luring terkait pemanfaatan PMM;
- 4) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan terhadap satuan pendidikan untuk membentuk komunitas belajar dalam sekolah;
- 5) Melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada pemerintah daerah maupun langsung ke satuan pendidikan melalui komunitas belajar secara daring dan luring terkait pentingnya komunitas belajar dalam sekolah menjadi wadah untuk merealisasikan terjadinya kolaborasi antar pendidik;
- 6) Melaksanakan bimbingan teknis atau pendampingan satuan pendidikan dalam optimalisasi pemanfaatan bantuan chromebook tersebut;
- 7) Melakukan advokasi daerah untuk mendukung pemulihan pembelajaran melalui penyediaan buku bacaan bermutu dan pemanfaatan buku bacaan bermutu;
- 8) Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan aksi nyata program benahi literasi atau numerasi;
- 9) Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah maupun langsung ke satuan pendidikan melalui kegiatan daring maupun luring terkait pemulihan pembelajaran;
- 10) Menjaring Mitra pembangunan untuk pemulihan pembelajaran;
- 11) Berkoordinasi ke Pemda terkait pembentukan ULD; dan
- 12) Membuat dashboard data anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan umum dan kejuruan se Provinsi Kalimantan Utara.

2. Sasaran Kegiatan 2 (dua)

Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

Peningkatan tata kelola juga merupakan salah satu prioritas BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada Renstra tahun 2020-2024 untuk mentransformasi pelayanan publik, yang antara lain tercermin dari membaiknya tingkat implementasi reformasi birokrasi, perampingan struktur organisasi, serta peningkatan kualitas layanan publik. BPMP Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk perbaikan pelayanan publik, antara lain dengan terus melakukan upaya peningkatan pelayanan publik, pemenuhan kebutuhan pendukung terhadap implementasi ZI WBK, dan pembenahan sistem akuntabilitas instansi mulai dari pembenahan kinerja pegawai maupun kinerja instansi khususnya BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, kebijakan Merdeka Belajar yang diusung oleh Kemendikbudristek pada tahun 2020-2024 juga ditujukan untuk memperbaiki tata kelola pendidikan khususnya di wilayah provinsi Kalimantan Utara yang sebelumnya sangat kompleks menjadi lebih sederhana, misalnya pemanfaatan asesmen nasional pendidikan untuk memperbaiki kualitas satuan pendidikan dan penyederhanaan kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik.

Peningkatan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan (IKK). Berikut ini disajikan capaian kedua IKK dari sasaran kegiatan 1 dari BPMP Provinsi Kalimantan Utara :

a. Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 12 Tahun 2015, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ditetapkan pembobotan nilai dari 4 komponen SAKIP sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	30%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%

Berikut ini juga kami tampilkan Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra.

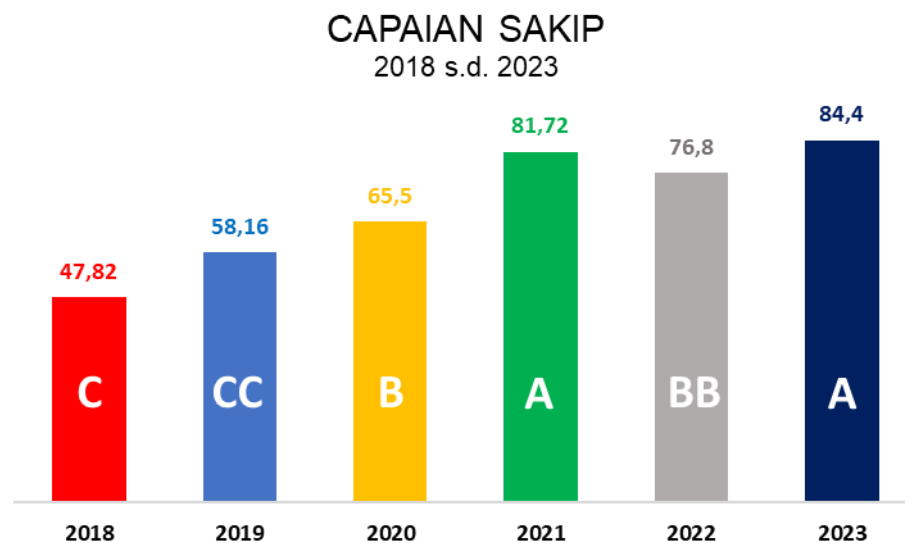


Data diatas menggambarkan perbandingan capaian sakip pada tahun 2022 dengan capaian sakip tahun 2023 dimana pada tahun 2022 capaian sakip adalah **BB** dengan akumulasi bobot sebesar 76,80 sedangkan capaian tahun 2023 adalah **A** dengan bobot sebesar 84,40 sehingga dapat diketahui bahwa sakip BPMP Kaltara telah meningkat di tahun 2023. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target tahun berjalan, maka dapat diketahui bahwa BPMP Kaltara juga telah mencapai bahkan melampaui target yang telah diperjanjikan. Sedangkan jika capaian tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir renstra, maka diketahui bahwa target akhir renstra untuk IKK 2.1 telah tercapai di tahun 2023.

Adapun rincian capaian tiap indikator penilaian Sakip berdasarkan LHE Sakip yang dinilai oleh inspektorat Kemdikbudristek dapat dirincikan sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,6
2	Pengukuran Kinerja	30%	25,5
3	Pelaporan Kinerja	15%	13,5
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	21,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			84,4

Capaian Sakip BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun mengalami progres peningkatan yang sangat baik, namun pada tahun 2022 ini mengalami penurunan dikarenakan beberapa permasalahan tersebut diatas. Siklus capaian Sakip BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



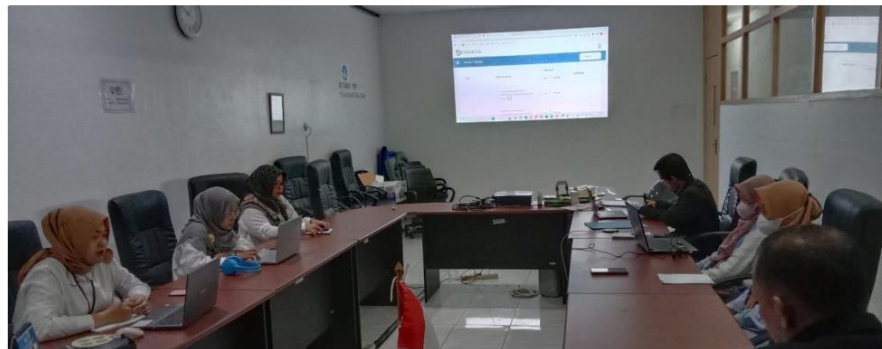
Berdasarkan data diatas, maka diketahui bahwa nilai sakip BPMP Kaltara dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan walaupun di tahun 2022 sempat mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2023 ini kembali naik lagi menjadi A bahkan melebihi bobot nilai pada tahun 2021.

☞ Program dan Kegiatan Pendukung IKK 2.1

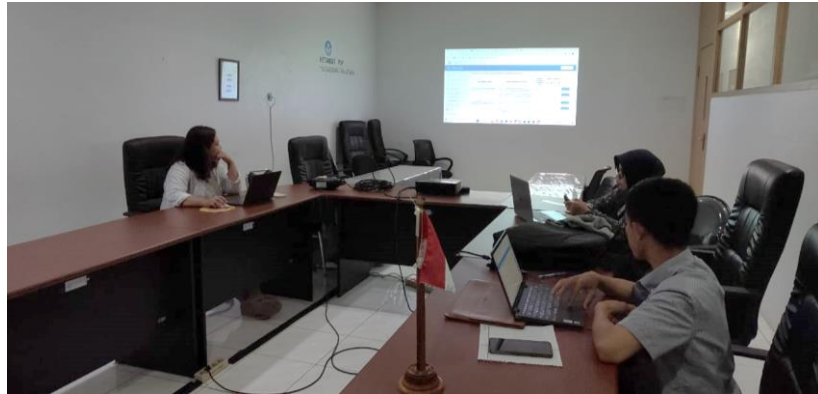
- 1) Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Peta Risiko Tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya serta melakukan pemetaan resiko yang mungkin akan terjadi selama tahun 2023;
- 2) Rapat penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dan penyusunan perjanjian kinerja 2023;



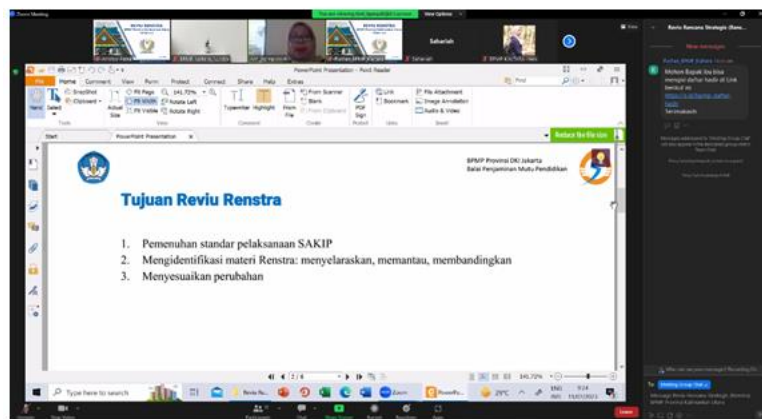
- 3) Rapat reviu SPI terhadap Laporan Kinerja 2023;



- 4) Rapat Penyusunan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja 2023 dan Tindak Lanjut LHE Sakip 2022;



- 5) Rapat Reviu Renstra Tahun 2023;



- 6) Rapat evaluasi kinerja triwulanan;

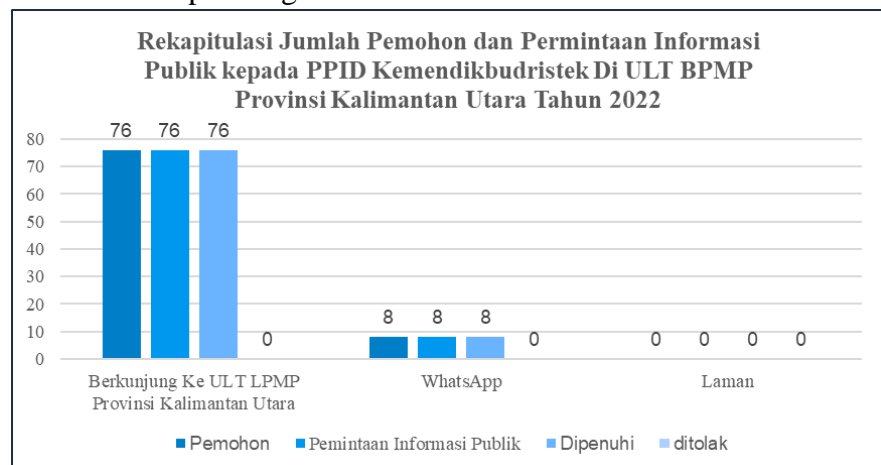


7) Pelaksanaan layanan informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jumlah Pemohon Informasi Publik

Dari total 113 Kunjungan yang masuk melalui ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara, pemohon informasi publik kepada PPID Kemendikbudristek di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 2 Januari sampai dengan 29 Desember 2023 berjumlah 84 pemohon. Dari 84 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi yang diminta sebanyak 84 permintaan dan dipenuhi 84 informasi serta permintaan informasi yang ditolak sebanyak 0 permintaan. Berikut rekapitulasi jumlah pemohon dan permintaan informasi publik kepada PPID Kemendikbudristek di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara sejak 2 Januari sampai dengan 29 Desember 2023:



Perkembangan Jumlah Pemohon Informasi Publik

Berikut adalah perkembangan jumlah pemohon informasi publik ke PPID Kemendikbud di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari Tahun 2019 sampai dengan 2023:

	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Perkembangan Jumlah Pemohon	5	56	67	231	84

☞ Hambatan dan Permasalahan IKK 2.1

- 1) Kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah masih kurangnya SDM yang memahami dengan baik proses bisnis dari sakip sehingga penanganan terkait sakip tidak terlalu optimal; dan
- 2) Kemudian jumlah pegawai yang sedikit dibandingkan kompleksitas pekerjaan pada satker membuat kurang fokusnya pegawai yang ditugaskan untuk menangani sakip.

☞ Langkah Antisipasi

- 1) Mengikutkan beberapa pegawai pada kegiatan pelatihan Sakip;
- 2) Memaksimalkan kemampuan pegawai yang ada untuk menjalankan pekerjaan yang kompleks tersebut.

☞ Strategi yang akan Dilakukan

- 1) Upaya yang bisa dilakukan kedepannya terkait kendala tersebut adalah memberikan treatment khusus kepada beberapa pegawai untuk peningkatan kapasitas terkait sakip dengan menugaskan melakukan benchmarking ke satker dengan nilai sakip terbaik;
- 2) Menugaskan untuk mengikuti pelatihan sakip; dan
- 3) Terkait jumlah pegawai agar mengupayakan pengajuan rekrutmen untuk jabatan-jabatan yang masih kosong ke unit utama.

b. Indikator Kinerja Kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara.

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 /PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator yaitu:

- 1) Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
- 2) Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Namun pada tahun 2023 IKPA dan EKA berkontribusi terhadap NKA masing-masing sebesar 50%. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. Sesuai dengan PMK tersebut, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran	Kategori
>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

Berdasarkan data dari SMART Kemenkeu dan OM SPAN diketahui bahwa:

Nilai EKA BPMP Kaltara = 99,95

Nilai IKPA BPMP Kaltara = 92,75

Maka dapat diketahui nilai kinerja anggaran (NKA) BPMP Kaltara tahun 2023 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NKA} &= (50\% \times \text{EKA}) + (50\% \times \text{IKPA}) \\ &= 49,98 + 46,37 \\ &= 96,35 \end{aligned}$$

Setelah melalui proses perhitungan menggunakan formula diatas, maka ditemukan bahwa capaian IKK 2.2 terkait NKA tahun 2023 berdasarkan yakni sebesar 96,35.

Berikut ini diuraikan data perbandingan capaian Indikator Kinerja 2.2 yaitu “Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara” berdasarkan data capaian EKA dari SMART Kemenkeu dan data IKPA dari OMSPAN. Perbandingan yang kami tampilkan diantaranya perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dan perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target akhir renstra.:



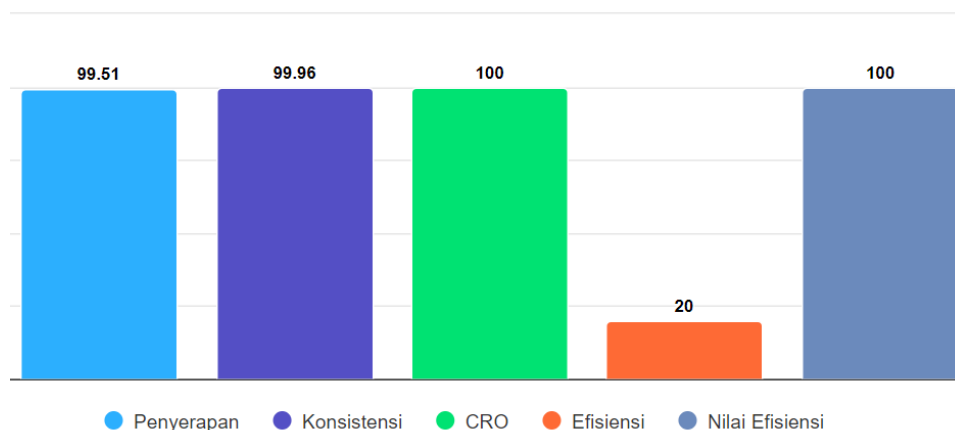
Data diatas menggambarkan perbandingan capaian NKA pada tahun 2022 dengan capaian sakip tahun 2023 dimana pada tahun 2022 capaian NKA adalah sebesar 94,22 sedangkan capaian tahun 2023 adalah sebesar 96,35, sehingga dapat diketahui bahwa NKA BPMP Kaltara telah meningkat di tahun 2023. Selanjutnya jika dibandingkan dengan target tahun berjalan, maka dapat diketahui bahwa NKA BPMP Kaltara juga telah mencapai bahkan melampaui target yang telah diperjanjikan. Sedangkan jika capaian tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir renstra, maka diketahui bahwa target akhir renstra untuk IKK 2.1 telah tercapai di tahun 2023 bahkan juga telah jauh melampaui target akhir renstra tersebut.

Jika diuraikan lagi masing-masing indikator penilaian dari EKA dan IKPA, maka gambarannya adalah sebagai berikut:

Capaian EKA

99.95

Sangat Baik



Sumber: Smart Kemenkeu

Grafik diatas menunjukkan capaian dari masing-masing indikator EKA dimana nilai untuk indikator penyerapan anggaran sebesar 99,51, Konsistensi sebesar 99,96, Capaian Output sebesar 100, dan efisiensi sebesar 100. Oleh karena nilai EKA diperoleh dengan pembobotan berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot Penyerapan} & : 9,7\% \times 99,51 = 9,65 \\
 \text{Bobot Konsistensi} & : 18,2\% \times 99,96 = 18,19 \\
 \text{Bobot Capaian Rincian Output} & : 43,5\% \times 100 = 43,50 \\
 \text{Bobot Efisiensi} & : 28,6\% \times 100 = \underline{28,60} + \\
 \text{Maka diperolehlah nilai EKA sebesar:} & = \underline{99,95}
 \end{aligned}$$

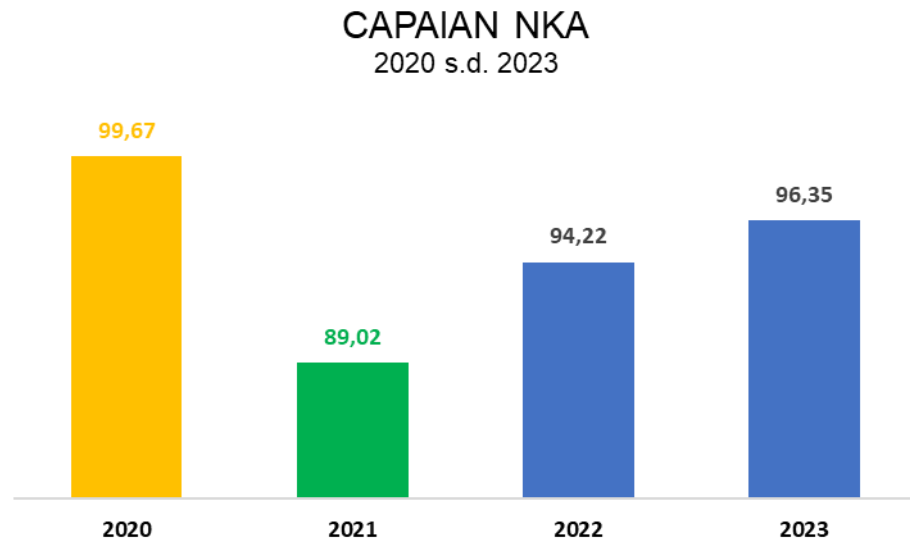
Capaian IKPA

URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL
		REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM		
BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Nilai	100.00	64.54	85.54	92.00	100.00	99.84	100.00	100.00	92.75
	Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25	
	Nilai Akhir	10.00	6.45	17.11	9.20	10.00	9.98	5.00	25.00	
	Nilai Aspek	82.27		95.48					100.00	

Sumber: Om Span Kemenkeu 2023

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa IKPA 2023 memiliki 8 indikator yang dinilai dengan nilai capaian sampai dengan Desember 2023 berturut-turut Revisi DIPA 100%, Deviasi Halaman III Dipa 64,54%, Penyerapan Anggaran 85,54%, Belanja Kontraktual 92%, Penyelesaian Tagihan 100%, Pengelolaan UP dan TUP 99,84%, dispensasi SPM 100%, dan Capaian Output 100%. Dengan melakukan pembobotan sesuai tabel diatas maka ditemukanlah hasil nilai IKPA sebesar **92,75%**.

Adapun siklus capaian NKA BPMP Provinsi Kalimantan Utara dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut:



Berdasarkan grafik diatas bisa dilihat bahwa pada tahun 2020 BPMP Kaltara pernah mengalami nilai kinerja anggaran yang paling maksimal bahkan memperoleh penghargaan NKA terbaik dari Kemdikbud. Namun waktu itu di tahun 2020 adalah masa puncak dari pandemi covid 19 sehingga banyak dispensasi penilaian indikator IKPA sehingga BPMP Kaltara bisa memperoleh nilai maksimal. Namun setelah pandemi penilaian IKPA tidak lagi didispensasi mengharuskan BPMP Kaltara harus berusaha lagi memperbaiki kinerja anggaran sehingga pada tahun 2021 sampai dengan 2023 ini kinerja anggaran BPMP Kaltara kembali menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

👉 Program dan Kegiatan Pendukung IKK 2.2

- 1) Evaluasi Kinerja Tahun 2022 dan Penyusunan Peta Risiko Tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya serta melakukan pemetaan resiko yang mungkin akan terjadi selama tahun 2023;
- 2) Melakukan revisi penyesuaian kegiatan-kegiatan PDM yang telah direncanakan;
- 3) Melakukan upaya revisi buka blokir anggaran belanja modal agar dapat melakukan percepatan realisasi;
- 4) Melakukan rapat evaluasi anggaran rutin;
- 5) Membuat dashboard data kinerja anggaran untuk memudahkan pemantauan kinerja;
- 6) Secara berkala memantau setiap capaian baik capaian EKA maupun capaian IKPA melalui dashboard tersebut;
- 7) Melakukan penyesuaian RPD halaman III dipa; dan
- 8) Mengupayakan penyesuaian antara RPD dan serapan.

☞ **Hambatan dan Permasalahan IKK 2.2**

- 1) Adapun kendala yang dihadapi adalah sulitnya melaksanakan kegiatan dan melakukan serapan anggaran di triwulan 1 ini dikarenakan unit utama masih melakukan revisi yang melibatkan satker sehingga satker tidak dapat melakukan revisi POK;
- 2) Kendala selanjutnya adalah tidak dapat melakukan penyesuaian halaman III dipa untuk TW 1 akibat dari revisi unit utama;
- 3) Seringnya terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan RPD tidak sesuai realisasi RPD;
- 4) Belanja pegawai yang belum memperhitungkan pegawai yang resign sehingga mempengaruhi RPD; dan
- 5) Penyesuaian RKAKL dengan project charter mengakibatkan banyaknya revisi kegiatan.

☞ **Langkah Antisipasi**

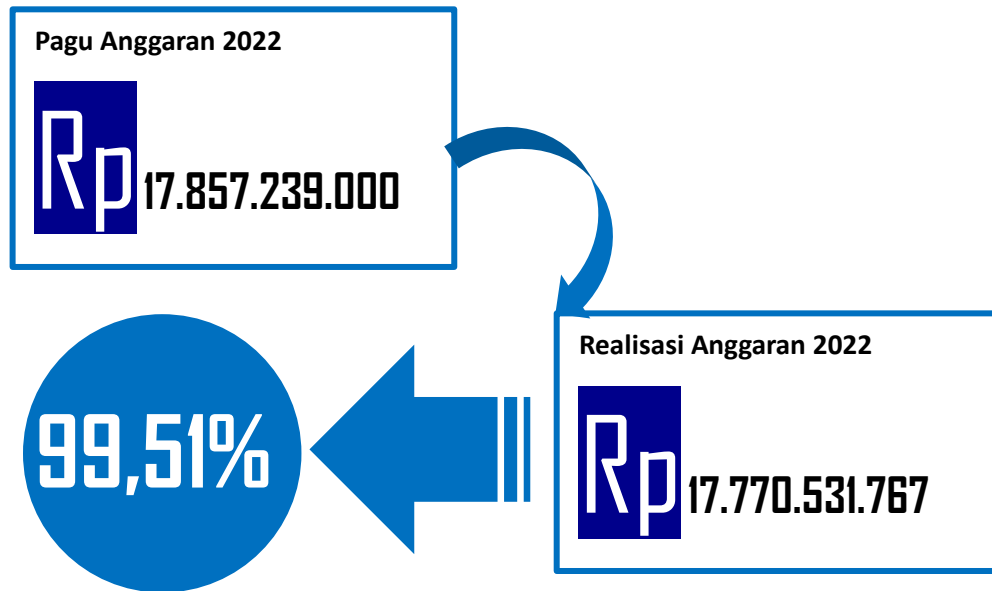
- 1) Intens melakukan koordinasi dengan unit utama terkait dengan percepatan revisi unit utama;
- 2) Berkoordinasi dengan kanwil DJPB Kaltara tentang dengan kendala yang dihadapi terkait penyesuaian halaman III dipa TW 1;
- 3) Menyesuaikan waktu pelaporan SP2D agar bisa meminimalisir deviasi hal III dipa;
- 4) Memperbaiki RPD pada periode selanjutnya; dan
- 5) Mengupayakan revisi tidak mengakibatkan perubahan DS agar nilai untuk indikator IKPA terkait revisi anggaran tidak menurun.

☞ **Strategi yang akan Dilakukan**

- 1) Kedepannya berkoordinasi ke unit utama untuk memberikan kesempatan kepada satker melakukan penyesuaian POK dan RPD;
- 2) Terkait seringnya perubahan jadwal, maka kedepannya dibutuhkan komitmen bersama pelaksana kegiatan;
- 3) Menyesuaikan semua kebutuhan jenis belanja dengan RPD; dan
- 4) Mengupayakan penyusunan project charter lebih awal.

B. Realisasi Anggaran

BPMP Provinsi Kalimantan Utara hingga akhir tahun 2023 menerima pagu anggaran sebesar **Rp. 17.857.239.000,-**. Dari pagu tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp. 17.770.531.767,-** dengan persentase daya serap anggaran sebesar **99,51%**.



Berikut rincian pagu dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran/indikator kinerja dan anggaran untuk dukungan manajemen.

Sasaran Kegiatan (SK)/ Sasaran Indikator	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen			
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	566.413.000	566.378.000	99,99%
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	5.282.123.000	5.226.601.532	98,95%
Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Kalimantan Utara			

Sasaran Kegiatan (SK)/ Sasaran Indikator	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
[IKK 2.1] Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kalimantan Utara	12.008.703.000	11.977.552.235	99,74%
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/KL			

Jika dilihat dari perjenis belanja, maka serapan BPMP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Realisasi Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	2.363.962.000	0	2.334.275.477	98,74	2.334.275.477	98,74
2	BELANJA BARANG	9.343.277.000	54.000.000	9.286.673.882	99,39	9.286.673.882	99,39
3	BELANJA MODAL	6.150.000.000	0	6.149.582.408	99,99	6.149.582.408	99,99
	TOTAL	17.857.239.000	54.000.000	17.770.531.767	99,51	17.770.531.767	99,51

Sumber: MOLK Kemdikbud 2023

c. Analisis Efisiensi

Sasaran Kegiatan /Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian IKK	Realisasi Anggaran
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen				
[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96	1.41	71,94%	99,99%
[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30	100	333,33%	98,95%
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara				
[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	BB (76,80)	A (84,40)	109,90%	99,74%
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	84	96,35	114,70%	
RATA-RATA CAPAIAN			157,47%	99,51%

Tabel diatas menyajikan informasi capaian IKK dan realisasi anggaran masing-masing IKK di BPMP Provinsi Kalimantan Utara. Terlihat bahwa rata-rata capaian IKK melebihi target yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian IKK adalah sebesar 157,47% sedangkan realisasi anggaran rata-rata masing-masing IKK adalah sebesar 99,51%, oleh karena itu dapat diketahui efisiensi anggaran dengan metode perhitungan berikut:

*Efisiensi = (Persentase capaian IKK * Pagu Anggaran 2023) – realisasi anggaran 2023*

*Efisiensi = (157,47% *17.857.239.000) - 17.770.531.767*

Efisiensi = 28.119.794.253 - 17.770.531.767

Efisiensi = 10.349.262.486

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa BPMP Provinsi Kalimantan Utara berhasil mengefisiensi anggaran sebesar Rp. 10.349.262.486,- (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah). Hasil dari efisiensi tersebut dimanfaatkan untuk mengoptimalkan beberapa program diantaranya:

1. Program Pemulihan Pembelajaran;
2. Program pemantauan transfer daerah; dan
3. Program Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah / Pengawas Sekolah.

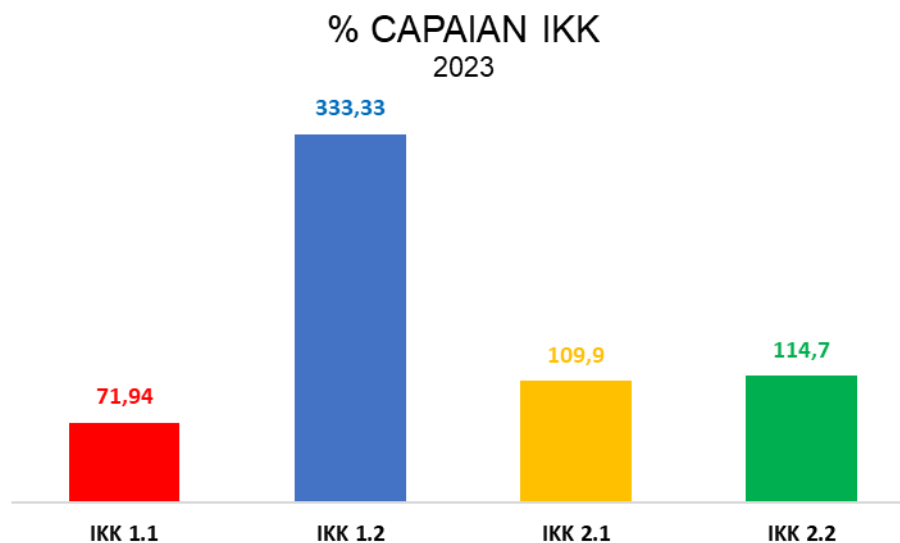
BAB IV

PENUTUP



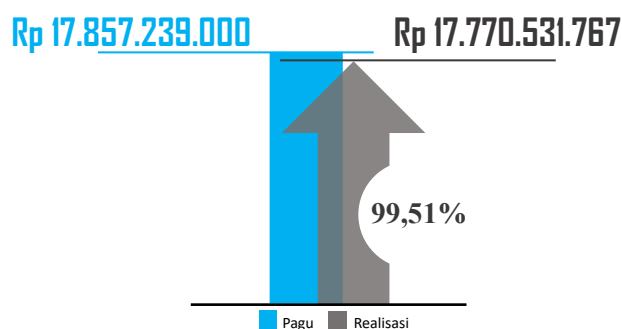
BPMP Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 menetapkan dua sasaran kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen; dan
2. Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Kalimantan Utara.



Dari empat indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dua sasaran kegiatan tersebut, tiga indikator kinerja kegiatan realisasi capaiannya telah melebihi target (>100%) yang ditetapkan sedangkan satu indikator kinerja kegiatan yang realisasinya belum mencapai target (71,94%) yakni indikator IKK 1.1 terkait Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya. Hal itu kemungkinan disebabkan karena proses perhitungan capaiannya tidak sesuai dengan definisi operasional IKK tersebut.

Dari segi penyerapan anggaran, BPMP Provinsi Kalimantan Utara berhasil menyerap anggaran sebesar **Rp 17.770.531.767,-** dari total **Rp 17.857.239.000,-** dengan persentase **99,51%** sebagaimana ditunjukkan pada grafik dibawah:



Dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan, beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian ke depan antara lain:

1. BPMP Provinsi Kalimantan Utara tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi langsung dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan;

2. Implementasi Kurikulum Merdeka belum diadopsi oleh seluruh satuan pendidikan;
3. Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar oleh satuan pendidikan pelaksana IKM belum optimal di wilayah remote area;
4. Rapor Pendidikan belum digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah maupun satuan pendidikan untuk menyusun perencanaan berbasis data; dan
5. Belum maksimalnya pencapaian nilai Literasi dan Numerasi berdasarkan Profil Pendidikan;

Untuk meningkatkan kinerja BPMP Provinsi Kalimantan Utara ke depan, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

1. Membangun kemitraan dengan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan;
2. Memfasilitasi pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri;
3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan pelaksana IKM di daerah remote area untuk mengoptimalkan pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar;
4. Membangun koordinasi kepada pemangku kepentingan dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan berbasis data dengan memanfaatkan rapor pendidikan; dan
5. Melakukan sosialisasi dan pendampingan ke pemerintah daerah untuk mendorong satuan pendidikan dalam meningkatkan kompetensi Literasi dan Numerasi peserta didik.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja



Pengukuran Kinerja



Pernyataan Telah
Direviu





**Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jarwoko

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Tanjung Selor, 30 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,



Iwan Syahril



Jarwoko

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 12.104.393.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 6.087.407.000
		TOTAL	Rp. 18.191.800.000

Tanjung Selor, 30 Januari 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,



Iwan Syahril



Jarwoko



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jarwoko

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Tanjung Selor, 18 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,



Iwan Syahril



Jarwoko

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.96
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 5.848.536.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 12.008.703.000
		TOTAL	Rp. 17.857.239.000

Tanjung Selor, 18 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara,



Iwan Syahril



Jarwoko



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1.96	TW4 : 1,96	TW4 : 1,41
2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30	TW4 : 30	TW4 : 100
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	Predikat	BB	TW4 : BB	TW4 : A
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara	Nilai	84	TW4 : 84	TW4 : 96,35

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.17.857.239.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 16 Januari 2024 sebesar **Rp. 17.770.531.767** atau **99,51%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 16 Januari 2024 **Rp. 86.707.233**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

Untuk IKK 1.1 terkait Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya berdasarkan data dari BAN telah dicapai sebesar 1,41% dari atau sebesar 71,94% dari target (1,96%). Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah diantaranya:

PDM 1:

1. PMO Daerah bulan Oktober
2. Evaluasi Efektivitas dan Dampak Penguatan Komunikasi UPT dan Pemda
3. Rapat Koordinasi Kesenambungan Program Sekolah Penggerak (PSP)

PDM 2:

1. PMO IKM Provinsi Kalimantan Utara,, Kabupaten Bulungan , Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan
2. Memantau dan mengupdate data pada dashboard <https://s.id/sikomika> untuk melihat perkembangan dan pemanfaatan PMM dan Komunitas Belajar
3. Memantau pusat layanan IKM pada aplikasi data helpdesk IKM dan Klinik Kurikulum Merdeka
4. Workshop Praktek Baik P5 Regional Tengah di Swiss-Belresort Pocatu Bali pada tanggal 10 s.d. 13 Oktober 2023

PDM 3:

1. Advokasi Pemanfaatan Chromebook dan Belajar.id untuk Satuan PAUD Tahap 44. Rapat monitoring pelaksanaan pendampingan percepatan penyaluran Dana BOSP tahun 2023

PDM 4:

1. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan
2. PMO Bulan Oktober
3. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait Percepatan Akses Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data

PDM 5:

Melaksanakan PMO PDM (Rapat Evaluasi PDM Bulan September 2023) tanggal 19 Oktober 2023

PDM 6:

- Melakukan pemantauan dashboard Sulingjar
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan semua jenjang terkait progres pengisian Sulingjar
- Mengikuti kegiatan untuk pendampingan Survei Pengukuran Persepsi dan Pemahaman kepada Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap Urgensi Kebijakan Asesmen Nasional Tahap 2 yang diselenggarakan oleh Tim PDM 06 Pusat
- Mengikuti kegiatan Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Sulingjar PAUD yang diselenggarakan oleh Direktorat PAUD
- Melaksanakan kegiatan Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Sulingjar PAUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan mengundang seluruh Satuan PAUD dengan narasumber dari tim Direktorat PAUD
- Melakukan monev pelaksanaan Sulingjar PAUD di beberapa satuan PAUD yang dilaksanakan secara daring dan luring khusus untuk wilayah Kab. Bulungan
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Asesmen Nasional jenjang SD

PDM 7:

1. Melaksanakan kegiatan advokasi dan menjangkau isu pemda (PDM 07 berkolaborasi dengan PDM 05 dalam melaksanakan kegiatan)
2. Mengikuti kegiatan Refleksi Kinerja Tim Publikasi PDM-07 dan UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
3. Melakukan glorifikasi program prioritas kemendikbudristek di sosial media lembaga
4. Membuat Video Duta Merdeka Belajar

PDM 9:

- Penyampaian Update Dashboard Transisi PAUD-SD secara rutin
- Melakukan koordinasi dengan Guru yang telah di bimtek oleh Kemdikbudristek terkait dengan pemanfaatan PMM Transisi PAUD SD

PDM 10:

1. Mengikuti kegiatan Tot Bimtek dan Transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi Regional 7 di Surabaya
2. Diskusi RTL dan Desain Kombel melalui zoom
3. Melaporkan tgl pelaksanaan Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui penguatan literasi
4. Pemetaan data sekolah sasaran Bimtek yang diberikan oleh pusat
5. Melaksanakan Bimtek Pemulihan dan Transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi Tahap 1
6. Melaksanakan Bimtek pemulihan dan Transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi Tahap 2
7. Melakukan pengisian Dashboard Pemulihan Pembelajaran, sekolah - sekolah yang telah mengikuti Bimtek

PDM 11:

1. Rakor Optimalisasi Advokasi Implementasi KSS di Sekolah Binaan dengan PDM 11 Pusat secara daring (13 Oktober)
2. FGD Peningkatan Status Sehat Sekolah Binaan secara daring sebagai tindak lanjut Optimalisasi Advokasi Implementasi KSS
3. Koordinasi dengan Sekolah Binaan terkait dengan lomba video sekolah sehat dan diperpanjang hingga 6 November 2023
5. Pengisian TKSI sedang berlangsung

PDM 12:

Mengisi Dashboard UPT terkait Dashboard Pendidikan Khusus

Kendala / Permasalahan :

PDM 1:

1. Capaian 4 dan 5 sudah ada namun belum spesifik per wilayah/ nama sekolah

PDM 2:

- Data Dashboard PMM pusat belum menyajikan angka sehingga capaian target PMM belum terukur
- Perkembangan komunitas Belajar dalam sekolah pada beberapa kabupaten/kota rasionya masih rendah jika dibandingkan dengan sekolah yang sudah IKM

PDM 3:

- Target 1. Sekolah masih ragu menggunakan ARKAS 4.0
- Target 2. Satuan PAUD belum menggunakan ARKAS
- Target 3. Harga yang relatif lebih mahal bila menggunakan SIPLah

PDM 4:

- sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses internet, belum melakukan akses rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data.

PDM 5:

Capaian AN masih belum dapat diidentifikasi

PDM 6:

- Kendala yang permasalahannya adalah saat koordinasi terkait pengisian Sulingjar adalah beberapa satuan pendidikan tidak bisa dihubungi karena berlokasi di wilayah susah jaringan
- Beberapa satuan PAUD yang lupa terkait akun SDM
- Beberapa satuan PAUD tidak mengetahui cara pengisian Sulingjar

PDM 7:

Tidak ada

PDM 9:
Tidak ada

PDM 10:

1. Ketidaksesuaian nama yang hadir dengan fasilitator yang pernah dilatih terkait literasi
 2. -
 3. Tanggal pelaksanaan beberapa kali berubah
 4. Pemahaman terkait data sekolah yang digunakan untuk bimtek masih tidak satu persepsi
 5. kurangnya koordinasi dengan dinas terkait peserta yang diundang
 6. Kurangnya respon dari peserta terkait konfirmasi kehadiran karena kondisi jaringan, sehingga ada beberapa peserta yang datang terlambat
 7. Banyak nama sekolah yang berubah nomenklatur baru di kabupaten Nunukan
- PDM 11:
terjadi beberapa kasus, dimana sekolah sudah mengisi tetapi saat penarikan data oleh pusat isian asesmen oleh sekolah masih kosong.

PDM 11

Masih terdapat hasil asesmen kesehatan yang merah dan kuning dengan komposisi yang lebih besar dari hijau

PDM 12

Belum ada kabupaten/kota di Prov kaltara yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD)

Strategi / Tindak Lanjut :

PDM 1:

1. Rutin berkordinasi dengan PIC PDM 01 dan tim di pusat mengenai cara perhitungan capaian 1 sd 3
2. Berkordinasi dengan BGP untuk capaian 4 dan 5
3. Berkordinasi dengan konsultan untuk capaian 6 terkait regulasi dan anggaran untuk serah terima PSP Angkatan 1.

PDM 2:

- Koordinasi dengan PDM 02 pusat terkait pemanfaatan PMM
- Terus melakukan advokasi tentang pentingnya Komunitas Belajar melalui kegiatan-kegiatan baik secara daring maupun luring serta menginformasikan melalui WAG maupun media sosial

PDM 3:

Melakukan advokasi ke Pemda/Satuan Pendidikan

PDM 4:

- berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan sesuai pembagian wali wilayah

PDM 5:

Koordinasi dengan PDM 06

PDM 6:

- Berkoordinasi dengan pengawas terkait beberapa sekolah yang berada di daerah susah sinyal untuk dapat mendorong melakukan pengisian Sulingjar
- Berkoordinasi dengan Satuan PAUD agar dapat segera melakukan pembuatan akun atau memanfaatkan fitur lupa password dan menyarankan untuk dapat berkoordinasi langsung dengan pihak admin Dinas Pendidikan
- Memberi informasi kepada Satuan PAUD terkait cara pengisian Sulingjar dengan memberikan materi materi Sulingjar dan memandu langkah-langkah pengisian Sulingjar

PDM 7:

1. Mempublikasikan konten-konten yang sesuai dengan permintaan PIC PDM dan informasi glorifikasi melalui WAGrub PIC PDM 07 UPT
2. Dilakukan pembagian tugas kerja dengan tim PDM 07 terkait pembuatan konten dan publikasi di media sosial lembaga.

PDM 9:

Tidak ada

PDM 10:

1. Memetakan Fasilitator yang akan digunakan dalam Bimtek di daerah
- 2.-
3. Update pada link
4. Pemetaan Sekolah sasaran dengan menyesuaikan data penerima buku hibah dan Sekolah yang literasinya berada pada kategori 1
5. Mengkonfirmasi kehadiran peserta jauh hari sebelum kegiatan dimulai
6. Peserta yang konfirmasi tidak hadir dialihkan ke Tahap selanjutnya
7. Koordinasi dengan dinas meminta SK terbaru untuk perubahan nama sekolah

PDM 11:

intens berkomunikasi dan pendampingan dengan sekolah binaan.

PDM 12

Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan se Kalimantan Utara terkait percepatan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)

B . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Untuk IKK 1.2 terkait Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) berdasarkan data dari BAN telah dicapai sebesar 96,35% dari atau sebesar 114,70%% dari target (84%). Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan adalah diantaranya:

PDM 1:

1. PMO Daerah bulan Oktober
2. Evaluasi Efektivitas dan Dampak Penguatan Komunikasi UPT dan Pemda
3. Rapat Koordinasi Kesenambungan Program Sekolah Penggerak (PSP)

PDM 2:

1. PMO IKM Provinsi Kalimantan Utara,, Kabupaten Bulungan , Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan
2. Memantau dan mengupdate data pada dashboard <https://s.id/sikomika> untuk melihat perkembangan dan pemanfaatan PMM dan Komunitas Belajar
3. Memantau pusat layanan IKM pada aplikasi data helpdesk IKM dan Klinik Kurikulum Merdeka
4. Workshop Praktek Baik P5 Regional Tengah di Swiss-Belresort Pocatou Bali pada tanggal 10 s.d. 13 Oktober 2023

PDM 3:

1. Advokasi Pemanfaatan Chromebook dan Belajar.id untuk Satuan PAUD Tahap 44. Rapat monitoring pelaksanaan pendampingan percepatan penyaluran Dana BOSP tahun 2023

PDM 4:

1. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan
2. PMO Bulan Oktober
3. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait Percepatan Akses Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data

PDM 5:

Melaksanakan PMO PDM (Rapat Evaluasi PDM Bulan September 2023) tanggal 19 Oktober 2023

PDM 6:

- Melakukan pemantauan dashboard Sulingjar
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan semua jenjang terkait progres pengisian Sulingjar
- Mengikuti kegiatan untuk pendampingan Survei Pengukuran Persepsi dan Pemahaman kepada Stakeholder Daerah dan Satuan Pendidikan terhadap Urgensi Kebijakan Asesmen Nasional Tahap 2 yang diselenggarakan oleh Tim PDM 06 Pusat
- Mengikuti kegiatan Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Sulingjar PAUD yang diselenggarakan oleh Direktorat PAUD
- Melaksanakan kegiatan Koordinasi Optimalisasi Pelaksanaan Sulingjar PAUD di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan mengundang seluruh Satuan PAUD dengan narasumber dari tim Direktorat PAUD
- Melakukan monev pelaksanaan Sulingjar PAUD di beberapa satuan PAUD yang dilaksanakan secara daring dan luring khusus untuk wilayah Kab. Bulungan
- Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Asesmen Nasional jenjang SD

PDM 7:

1. Melaksanakan kegiatan advokasi dan menjangkau isu pemda (PDM 07 berkolaborasi dengan PDM 05 dalam melaksanakan kegiatan)
2. Mengikuti kegiatan Refleksi Kinerja Tim Publikasi PDM-07 dan UPT Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
3. Melakukan glorifikasi program prioritas kemendikbudristek di sosial media lembaga
4. Membuat Video Duta Merdeka Belajar

PDM 9:

- Penyampaian Update Dashboard Transisi PAUD-SD secara rutin
- Melakukan koordinasi dengan Guru yang telah di bimtek oleh Kemdikbudristek terkait dengan pemanfaatan PMM Transisi PAUD SD

PDM 10:

1. Mengikuti kegiatan Tot Bimtek dan Transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi Regional 7 di Surabaya
2. Diskusi RTL dan Desain Kombel melalui zoom
3. Melaporkan tgl pelaksanaan Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran melalui penguatan literasi
4. Pemetaan data sekolah sasaran Bimtek yang diberikan oleh pusat
5. Melaksanakan Bimtek Pemulihan dan Transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi Tahap 1
6. Melaksanakan Bimtek pemulihan dan Transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi Tahap 2
7. Melakukan pengisian Dashboard Pemulihan Pembelajaran, sekolah - sekolah yang telah mengikuti Bimtek

PDM 11:

1. Rakor Optimalisasi Advokasi Implementasi KSS di Sekolah Binaan dengan PDM 11 Pusat secara daring (13 Oktober)
2. FGD Peningkatan Status Sehat Sekolah Binaan secara daring sebagai tindak lanjut Optimalisasi Advokasi Implementasi KSS
3. Koordinasi dengan Sekolah Binaan terkait dengan lomba video sekolah sehat dan diperpanjang hingga 6 November 2023
5. Pengisian TKSI sedang berlangsung

PDM 12:

Mengisi Dashboard UPT terkait Dashboard Pendidikan Khusus

Kendala / Permasalahan :

PDM 1:

1. Capaian 4 dan 5 sudah ada namun belum spesifik per wilayah/ nama sekolah

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

PDM 2:

- Data Dashboard PMM pusat belum menyajikan angka sehingga capaian target PMM belum terukur
- Perkembangan komunitas Belajar dalam sekolah pada beberapa kabupaten/kota rasionya masih rendah jika dibandingkan dengan sekolah yang sudah IKM

PDM 3:

- Target 1. Sekolah masih ragu menggunakan ARKAS 4.0
- Target 2. Satuan PAUD belum menggunakan ARKAS
- Target 3. Harga yang relatif lebih mahal bila menggunakan SIPLah

PDM 4:

- sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses internet, belum melakukan akses rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data.

PDM 5:

Capaian AN masih belum dapat diidentifikasi

PDM 6:

- Kendala yang permasalahannya adalah saat koordinasi terkait pengisian Sulingjar adalah beberapa satuan pendidikan tidak bisa dihubungi karena berlokasi di wilayah susah jaringan
- Beberapa satuan PAUD yang lupa terkait akun SDM
- Beberapa satuan PAUD tidak mengetahui cara pengisian Sulingjar

PDM 7:

Tidak ada

PDM 9:

Tidak ada

PDM 10:

1. Ketidaksihesuaian nama yang hadir dengan fasilitator yang pernah dilatih terkait literasi
 2. -
 3. Tanggal pelaksanaan beberapa kali berubah
 4. Pemahaman terkait data sekolah yang digunakan untuk bimtek masih tidak satu persepsi
 5. kurangnya koordinasi dengan dinas terkait peserta yang diundang
 6. Kurangnya respon dari peserta terkait konfirmasi kehadiran karena kondisi jaringan, sehingga ada beberapa peserta yang datang terlambat
 7. Banyak nama sekolah yang berubah nomenklatur baru di kabupaten Nunukan
- PDM 11:
terjadi beberapa kasus, dimana sekolah sudah mengisi tetapi saat penarikan data oleh pusat isian asesmen oleh sekolah masih kosong.

PDM 11

Masih terdapat hasil asesmen kesehatan yang merah dan kuning dengan komposisi yang lebih besar dari hijau

PDM 12

Belum ada kabupaten/kota di Prov kaltara yang memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD)

Strategi / Tindak Lanjut :

PDM 1:

1. Rutin berkordinasi dengan PIC PDM 01 dan tim di pusat mengenai cara perhitungan capaian 1 sd 3
2. Berkordinasi dengan BGP untuk capaian 4 dan 5
3. Berkordinasi dengan konsultan untuk capaian 6 terkait regulasi dan anggaran untuk serah terima PSP Angkatan 1.

PDM 2:

- Koordinasi dengan PDM 02 pusat terkait pemanfaatan PMM
- Terus melakukan advokasi tentang perntingnya Komunitas Belajar melalui kegiatan-kegiatan baik secara daring maupun luring serta menginformasikan melalui WAG maupun media sosial

PDM 3:

Melakukan advokasi ke Pemda/Satuan Pendidikan

PDM 4:

- berkomunikasi dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan sesuai pembagian wali wilayah

PDM 5:

Koordinasi dengan PDM 06

PDM 6:

- Berkoordinasi dengan pengawas terkait beberapa sekolah yang berada di daerah susah sinyal untuk dapat mendorong melakukan pengisian Sulingjar
- Berkoordinasi dengan Satuan PAUD agar dapat segera melakukan pembuatan akun atau memanfaatkan fitur lupa password dan menyarankan untuk dapat berkoordinasi langsung dengan pihak admin Dinas Pendidikan
- Memberi informasi kepada Satuan PAUD terkait cara pengisian Sulingjar dengan memberikan materi materi Sulingjar dan memandu langkah-langkah pengisian Sulingjar

PDM 7:

1. Mempublikasikan konten-konten yang sesuai dengan permintaan PIC PDM dan informasi glorifikasi melalui WAgub PIC PDM 07 UPT

2. Dilakukan pembagian tugas kerja dengan tim PDM 07 terkait pembuatan konten dan publikasi di media sosial lembaga.

PDM 9:
Tidak ada

PDM 10:

1. Memetakan Fasilitator yang akan digunakan dalam Bimtek di daerah
- 2.-
3. Update pada link
4. Pemetaan Sekolah sasaran dengan menyesuaikan data penerima buku hibah dan Sekolah yang literasinya berada pada kategori 1
5. Mengkonfirmasi kehadiran peserta jauh hari sebelum kegiatan dimulai
6. Peserta yang konfirmasi tidak hadir dialihkan ke Tahap selanjutnya
7. Koordinasi dengan dinas meminta SK terbaru untuk perubahan nama sekolah

PDM 11:

intens berkomunikasi dan pendampingan dengan sekolah binaan.

PDM 12

Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan se Kalimantan Utara terkait percepatan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)

C . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Progress / Kegiatan :

capaian untuk sakip 2023 setelah dilakukan evaluasi oleh unit utama dan inspektorat pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 84,40 dengan predikat A atau sebesar 109,90% dari target 76,8. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendukung ketercapaian target sakip diantaranya: 1. Menyusun laporan kinerja triwulan dan triwulan 4

2. Melakukan evaluasi sakip
3. Melakukan pemenuhan data dukung evaluasi sakip
4. Melakukan rapat evaluasi rutin setiap bulan terkait kinerja lembaga

Kendala / Permasalahan :

kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah masih kurangnya SDM yang memahami dengan baik proses bisnis dari sakip sehingga penanganan terkait sakip tidak terlalu optimal, kemudian jumlah pegawai yang sedikit dibandingkan kompleksitas pekerjaan pada satker membuat kurang fokusnya pegawai yang ditugaskan untuk menangani sakip.

Strategi / Tindak Lanjut :

Upaya yang bisa dilakukan kedepannya terkait kendala tersebut adalah memberikan treatment khusus kepada beberapa pegawai untuk peningkatan kapasitas terkait sakip dengan menugaskan melakukan benchmarking ke satker dengan nilai sakip terbaik. Terkait jumlah pegawai agar mengupayakan pengajuan rekrutmen untuk jabatan-jabatan yang masih kosong

D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Progress / Kegiatan :

Capaian kinerja anggaran bersumber dari 50% nilai EKA SMART dan 50% nilai IKPA OM SPAN yakni sebesar 96,35 atau sebesar 114,70% dari target 84. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk ketercapaian target kinerja anggaran diantaranya:

1. Melakukan revisi penyesuaian kegiatan-kegiatan PDM yang telah direncanakan triwulan 3 dan 4
2. Melakukan upaya revisi buka blokir anggaran AAI agar dapat melakukan percepatan realisasi
3. Melakukan rapat evaluasi anggaran rutin
4. Membuat grup pemantauan kinerja anggaran
5. Membuat dashboard pemantauan nilai EKA dan IKPA.

Kendala / Permasalahan :

1. Sulitnya melakukan penyesuaian antara RPD dengan realisasi khususnya untuk belanja Modal
2. Perubahan jadwal kegiatan yang sering terjadi mengakibatkan RPD mengalami deviasi.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Melakukan perencanaan yang baik untuk RPD di triwulan berikutnya
2. berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

Sama dengan triwulan 3 sebelumnya tolong dipantau dengan baik untuk kinerja anggaran khususnya untuk RPD halaman III dipa, ikuti masukan dari KPPN seperti yang mereka sampaikan saat rapat evaluasi anggaran K/L bersama KPPN. Semua indikator IKPA harus diperhatikan oleh masing PIC yang bertanggung jawab. Sebagai tambahan pastikan realisasi anggaran bisa semaksimal mungkin sambil memperhatikan ketercapaian outputnya. Khusus untuk capaian pada program prioritas mohon masing-masing PIC PDM melakukan pengukuran capaiannya masing-masing agar dapat mendorong tercapainya kinerja lembaga. Maksimalkan anggaran untuk ketercapaian program prioritas. lakukan revisi anggaran jika terdapat sisa untuk memaksimalkan serapan.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Tanjung Selor, 16 Januari 2024

**Kepala BPMP Provinsi Kalimantan
Utara**



Jarwoko

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

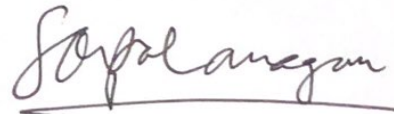
Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tarakan, 29 Januari 2024

Ketua Tim Reviu



Qudratullah Polanagau, S.Ag.,M.Pd
197104302006041013



BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Jalan Kolonel Soetadji Nomor 76 RT 13 RW 5, Tanjung Selor, Bulungan 77212

Telepon (0552) 2034391

Laman <http://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id>

Posel bpmp.kaltara@kemdikbud.go.id

Hubungi Kami

 bpmpkaltara.kemdikbud.go.id

 [@bpmp.kaltara](https://www.instagram.com/bpmp.kaltara)

 [@bpmpkaltara](https://www.facebook.com/bpmpkaltara)

 [@bpmpkaltara](https://www.twitter.com/bpmpkaltara)

 [BPMP Provinsi Kalimantan Utara](https://www.youtube.com/BPMPProvinsiKalimantanUtara)

 +62 851-7213-4343